



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang daerah dan nasional terutama pada sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2025 - 2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah

jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian *Universal Acces* tahun 2019 dan *Sustainable Development Goal's* tahun 2030.

6. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029.
7. Kepala Perangkat Daerah terkait adalah Kepala Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029.
8. *Sustainable Development Goal's* yang diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB) ini mengupayakan perubahan-perubahan signifikan pada setiap aspek kehidupan. Hal tersebut harus berlandaskan pada hak asasi manusia dan kesetaraan, sehingga pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat tercapai. Prinsip utama yang diangkat TPB adalah *no-one left behind*, tidak ada siapa pun yang boleh tertinggal. Maka, dalam implementasi TPB pun harus mengedepankan nilai universal, integrasi, dan inklusif.
9. Sumber Air Minum Yang Layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
10. Sumber Air Minum Tidak Layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya yang mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

11. Fasilitas Sanitasi Yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
12. Fasilitas Sanitasi Yang Tidak Layak adalah toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
13. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

20. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
28. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program yang bertujuan meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (*peri-urban*).
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RAD-AMPL Tahun 2025-2029 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access* dan menyiapkan Program *Sustainable Development Goal's (SDG'S)* tahun 2030 khususnya Goal's keenam, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua maka perlu menyusun RAD-AMPL.

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2025 - 2029 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

- (1) RAD-AMPL Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk mendukung percepatan pencapaian 100% (seratus persen) pelayanan air minum aman dan 100% (seratus persen) pelayanan sanitasi layak dan aman.
- (2) RAD-AMPL Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2029.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 menggunakan dana di luar APBD, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing melalui Tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2025-2029 dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL Tahun 2025-2029 menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (6) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (7) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan hasil pemantauan kepada Sekretaris Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan arahan dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.
- (9) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (10) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris dan Bupati.

BAB V

DOKUMEN RAD-AMPL

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 6

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten. Jawa Tengah 57424
Telepon 0272.321046 Psw 314,318 Faksimile 0272.328730,
Laman <https://bappeda-litbang.klaten.go.id/>, email : bapedalitbang@klaten.go.id



LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Klaten periode Tahun 2025-2029 dengan tepat waktu.

Laporan Akhir ini berisi tentang laporan kegiatan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Klaten periode Tahun 2025-2029 yang berisi tentang Pendahuluan, Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan, Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan, Kebutuhan Investasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penutup.

Laporan Akhir ini disusun sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dalam hal ini PT. POLA KARYA yang sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penyusunan RAD AMPL Kabupaten Klaten 2025-2029

Kami menyadari masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki demi kesempurnaan dalam penyusunan Dokumen RAD AMPL Tahun 2025-2029. Masukan dan saran dari pihak-pihak terkait sangat kami butuhkan.

Akhirnya tim penyusun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak telah membantu dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL Kabupaten Klaten 2025-2029.

Klaten, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	5
1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	5
1.3.2 Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029	5
1.4 Ruang Lingkup	7
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi	7
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	9
BAB 2 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ...	11
2.1 Kondisi Umum Wilayah	11
2.1.1 Kondisi Geografis	11
2.1.2 Kondisi Topografi	14
2.1.3 Kondisi Geologi	16
2.1.4 Hidrogeologi	20
2.1.5 Kondisi Demografi	24
2.1.6 Sosial	28
2.2 Kondisi Air Minum dan Sanitasi	30
2.2.1 Air Minum	30
2.2.2 Sanitasi	50
2.3 Permasalahan	73
2.3.1 Air Minum	73
2.3.2 Sanitasi	74
2.4 Tantangan	77
2.4.2 Air Minum	78

2.4.3 Air Limbah Domestik.....	79
2.4.4 Jaringan Persampahan.....	81
2.4.5 Jaringan Drainase.....	81
BAB 3 ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	84
3.1 Isu Strategis	84
3.2 Arah Kebijakan.....	85
3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.....	85
3.2.2 Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029	88
3.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Klaten	91
3.2.4 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Klaten.....	95
3.2.5 Nomenklatur Bidang AMPL berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023.....	96
3.3 Strategi Pencapaian.....	107
BAB 4 PROGRAM DAN KEGIATAN	109
4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2025-2029.....	109
4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi Tahun 2025-2029	114
BAB 5 KEBUTUHAN INVESTASI	118
5.1 Rencana Pembiayaan	118
5.2 Rencana Kebutuhan Investasi	128
BAB 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	129
6.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi.....	129
6.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL.....	130
6.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Klaten	132
6.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.....	132
6.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Klaten.....	13
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten	15
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Klaten.....	19
Gambar 2.4 Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten	23
Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	25
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	26
Gambar 2.7 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024.....	29
Gambar 2.8 Peta Layanan Eksisting Jaringan Perpipaan SPAM Kota Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	37
Gambar 2.9 Peta Layanan Eksisting jaringan Perpipaan SPAM IKK Kabupaten Klaten	43
Gambar 2.10 Peta Layanan Air Bersih Pamsimas Kabupaten Klaten	49
Gambar 2.11 TPS Desa Gembengan, Kecamatan Kalikotes	62
Gambar 2.12 Armada Pengangkut Sampah di Kabupaten Klaten	65
Gambar 2.13 TPA Troketon di Desa Troketon Kcamatan Pedan	67
Gambar 2.14 Peta Sebaran Pelayanan TPS di Kabupaten Klaten	68
Gambar 2.15 Lokasi Genangan Perkotaan Kabupaten Klaten	72
Gambar 3.1 Tahapan Mewujudkan Transformasi Sosial.....	85
Gambar 3.2 Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	86
Gambar 3.3 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025- 2045.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/ <i>Improved</i>	9
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten	11
Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Klaten	20
Tabel 2.3 Embung di Kabupaten Klaten	22
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	24
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Klaten Tahun 2023	25
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2023	27
Tabel 2.7 Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029	28
Tabel 2.8 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024	29
Tabel 2.9 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024	30
2.10 Kondisi Pelayanan Air Minum di Kabupten Klaten Tahun 2023	31
2.11 Kondisi Capaian Pelayanan Air Minum di Kabupten Klaten Tahun 2023	32
Tabel 2.12 Persentase Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2023	34
Tabel 2.13 Unit Air Baku SPAM Kota/ Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	35
Tabel 2.14 Unit Produksi SPAM Kota/ Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	35
Tabel 2.15 Unit Distribusi SPAM Kota/Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	36
Tabel 2.16 Unit Pelayanan SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	38
Tabel 2.17 Unit Air Baku SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	39
Tabel 2.18 Unit Produksi SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	40
Tabel 2.19 Unit Distribusi SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten	41
Tabel 2.20 Desa Sasaran Pamsimas di Kabupaten Klaten	44
Tabel 2.21 Kinerja Teknis KP-SPAMS di Kabupaten Klaten	47
Tabel 2.22 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Klaten	50
Tabel 2.23 Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Klaten	51
Tabel 2.24 Capaian Akses Air Limbah Domestik	52
Tabel 2.25 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD Setempat	52
Tabel 2.26 Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD- Setempat)	53
Tabel 2.27 Jumlah SR Tangki Septik Individu, IPAL Komunal, MCK di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2023	54
Tabel 2.28 Daftar IPAL Komunal dan MCK Kabupaten Klaten Tahun 2010-2023	54
Tabel 2.29 Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024	60
Tabel 2.30 Ketersediaan Sarana Persampahan di Kabupaten Klaten	61

Tabel 2.31 Jumlah TPS Tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023	61
Tabel 2.32 Kegiatan Budidaya Maggot di Desa Jambukulon Ceper	63
Tabel 2.33 Komposisi Sampah Kabupaten Klaten	64
Tabel 2.34 Sarana Pengangkutan di Kabupaten Klaten	65
Tabel 2.35 Profil TPA Troketon.....	66
Tabel 2.36 Neraca Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Klaten Tahun 2023	69
Tabel 2.37 Hasil Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Semester I).....	69
Tabel 2.38 Hasil Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Semester 2).....	70
Tabel 2.39 Jaringan Drainase di Kabupaten Klaten	71
Tabel 2.40 Permasalahan Mendesak Air Minum	73
Tabel 2.41 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik	74
Tabel 2.42 Permasalahan Mendesak Jaringan Persampahan	75
Tabel 2.43 Permasalahan Mendesak Jaringan Drainase.....	76
Tabel 2.44 Tantangan Pengembangan Air Minum.....	78
Tabel 2.45 Tantangan Pengembangan Air Limbah Domestik.....	79
Tabel 2.46 Tantangan Pengembangan Jaringan Persampahan	81
Tabel 2.47 Tantangan Pengembangan Jaringan Drainase	81
Tabel 3.1 Indikator Capaian Transformasi Sosial (Bidang AMPL) dalam RPJPN 2025- 2045	86
Tabel 3.2 Indikator Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Bidang AMPL) RPJPN 2025-2045	88
Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial di Bidang AMPL	89
Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi di Bidang AMPL	90
Tabel 3.5 Sasaran Pokok 1: Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode 2025-2029).....	93
Tabel 3.6 Sasaran Pokok 3: Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target RPJPD 2025-2045 (Periode 2025-2029)	94
Tabel 3.7 Sasaran Pokok 6: Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode 2025-2029).....	95
Tabel 3.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	96
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2025-2029	111
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) Tahun 2025-2029.....	115
Tabel 5.1 Kebutuhan Investasi Bidang AMPL	119
Tabel 5.2 Kebutuhan Investasi RAD AMPL Kabupaten Klaten 2025-2029	128
Tabel 6.1 Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2022.....	132
Tabel 6.2 Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2023.....	146

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB, khususnya tujuan ke 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dan juga mendukung Program Nasional dalam rangka pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten akan menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2025-2029.

Hal ini seiring pula dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, terutama Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2024, dimana kepala daerah terpilih wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD). Maka Penyusunan RAD AMPL Tahun 2025-2029 mempunyai peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang daerah dan nasional terutama pada sektor air minum dan sanitasi.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang di mutakhirkan beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tetang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka semua dokumen perencanaan dan keuangan di daerah wajib mempedomani kepmendagri tersebut, termasuk juga dokumen RAD AMPL.

Capaian akses air minum Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 93,35% dan cakupan akses sanitasi layak sebesar 100 % serta rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 1,43%. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2029 sebesar

100%. Sedangkan target rumah tangga dengan sanitasi aman, pada tahun 2029 adalah 5%.

Untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke 6 (enam) yaitu Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua, perlu adanya upaya yang keras dan terus menerus dari semua pihak. Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (*implementatif*). Pencapaian SDGs harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Sebagai instrument kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi kabupaten yang sedang

menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

1.2 Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan perencanaan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Pusat, melalui Program Nasional Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), membantu Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat terutama

miskin terhadap air minum dan sanitasi. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Klaten adalah untuk memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Dalam rangka itu Pemerintah Kabupaten Klaten menempatkan pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pemerintah Kabupaten melakukan pengakomodasian kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat, kedalam dua cara:

- (1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota serta SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten).
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan, Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) IPAL, KSM Pengelola Sampah, Kader STBM Desa dan Kader AMPL, (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk AMPL maupun dana desa, (3) pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (4) pengembangan regulasi yang mengatur

penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).

1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan. Misi terkait Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tertuang dalam :

1. Misi pertama yaitu **Mewujudkan Transformasi Sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Dalam hal penyusunan RAD AMPL ini, nantinya akan diselaraskan dengan RPJPN Tahap 1 yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Misi kelima yaitu **Memantapkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

1.3.2 Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik tahun 2025-2029 meliputi 5 (lima) tema dan arah kebijakan. Sementara itu, tema dan arah kebijakan RPJMN yang berkaitan dengan bidang air minum dan penyehatan lingkungan meliputi:

1. Tranformasi Sosial. Arah kebijakan yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Highlight intervensi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

- a. Investasi kesehatan primer melalui: (a) pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat (SPA) dan SDM di puskesmas dan pustu, (b) peningkatan kompetensi kader;
 - b. Penurunan kematian ibu melalui: (a) penguatan kapasitas pelayanan emergensi PONED-PONEK; (b) peningkatan cakupan dan kualitas ANC, KF, KN sesuai standar; (c) penguatan deteksi dini, manajemen risiko dan tata laksana kasus;
 - c. Penurunan stunting melalui: (a) penanggulangan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil; (b) penyediaan PMT bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia (*weight flatering*); (c) suplementasi gizi mikro pada balita;
 - d. Pengendalian penyakit menular melalui: (a) penemuan dan pengobatan TBC; (b) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB; (c) peningkatan kapasitas penemuan kasus TB;
 - e. Pengendalian penyakit tidak menular (PTM) melalui: (a) peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM; (b) pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM melalui pengendalian konsumsi GGL (gula, garam, lemak) pangan cepat saji, dan pengendalian konsumsi rokok;
 - f. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melayani skema JKN; dan
 - g. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan melalui regulasi/ peraturan perundangan yang memberikan fleksibilitas pemerintah pusat untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama daerah sulit akses.
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Arah kebijakan yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Highlight intervensi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

- a. Perbaikan kualitas ekosistem dan LH;
- b. Penurunan laju *deforestasi*;
- c. Penegakan hukum lingkungan;
- d. Percepatan pemenuhan sanitasi aman dan berkelanjutan;

- e. Reformasi pengolahan sampah terintegrasi hulu-hilir menuju *Circular Economy*;
- f. Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan air;
- g. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air (bendungan) dan pemulihan tampungan alami air (danau);
- h. Penyediaan pasokan air berkelanjutan;
- i. Pengelolaan risiko daya rusak air;
- j. Rehabilitasi hutan dan lahan;
- k. Penyediaan data dan informasi DAS yang berkualitas;
- l. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- m. Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki

septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

Tabel berikut ini menjelaskan berbagai jenis sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang layak maupun tidak layak.

Tabel 1.1 Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/*Improved*

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/ Tidak Layak
Air Minum	• <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR)) • <i>Standpost/pipe</i> (hidran) • <i>Borehole</i> (sumur bor) • <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi) • <i>Collected rain water</i> (air hujan) • <i>Water disinfected at the point of use</i>	• <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi) • <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi) • <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang) • <i>Bottled water</i> (Air kemasan) • <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)
Sanitasi	• <i>Sewer connection</i> (sewer) • <i>Septic tank</i> • <i>Pour flush</i> (closet duduk) • <i>Simple pit latrine</i> (cubluk) • <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara)	• <i>Service or bucket latrines</i> • <i>Public latrines</i> • <i>Latrines with an open pit</i>

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam

program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
 - a. Pembangunan SPAM baru
 - b. Perluasan layanan SPAM
 - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju 5 Pilar STBM
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

BAB 2**KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN****2.1 Kondisi Umum Wilayah****2.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Klaten berada diantara 110° 26' 14" - 110° 47' 51" Bujur Timur dan 7° 32' 19" - 7° 48' 33" Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Klaten terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
 Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
 Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DIY)
 Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Apabila dilihat menurut luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas di Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Kemalang dengan luas 60,19 km². Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan luas 9,59 km². Secara rinci luas wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Prambanan	26,09	3,72
2	Gantiwarno	26,44	3,77
3	Wedi	26,26	3,74
4	Bayat	42,1	6,00
5	Cawas	35,94	5,12
6	Trucuk	34,69	4,94
7	Kalikotes	14,11	2,01
8	Kebonarum	10,42	1,49
9	Jogonalan	27,59	3,93
10	Manisrenggo	30,6	4,36
11	Karangnongko	29,49	4,20
12	Ngawen	18,45	2,63
13	Ceper	25,77	3,67
14	Pedan	20	2,85
15	Karangdowo	30,83	4,39
16	Juwiring	30,9	4,40

LAPORAN AKHIR

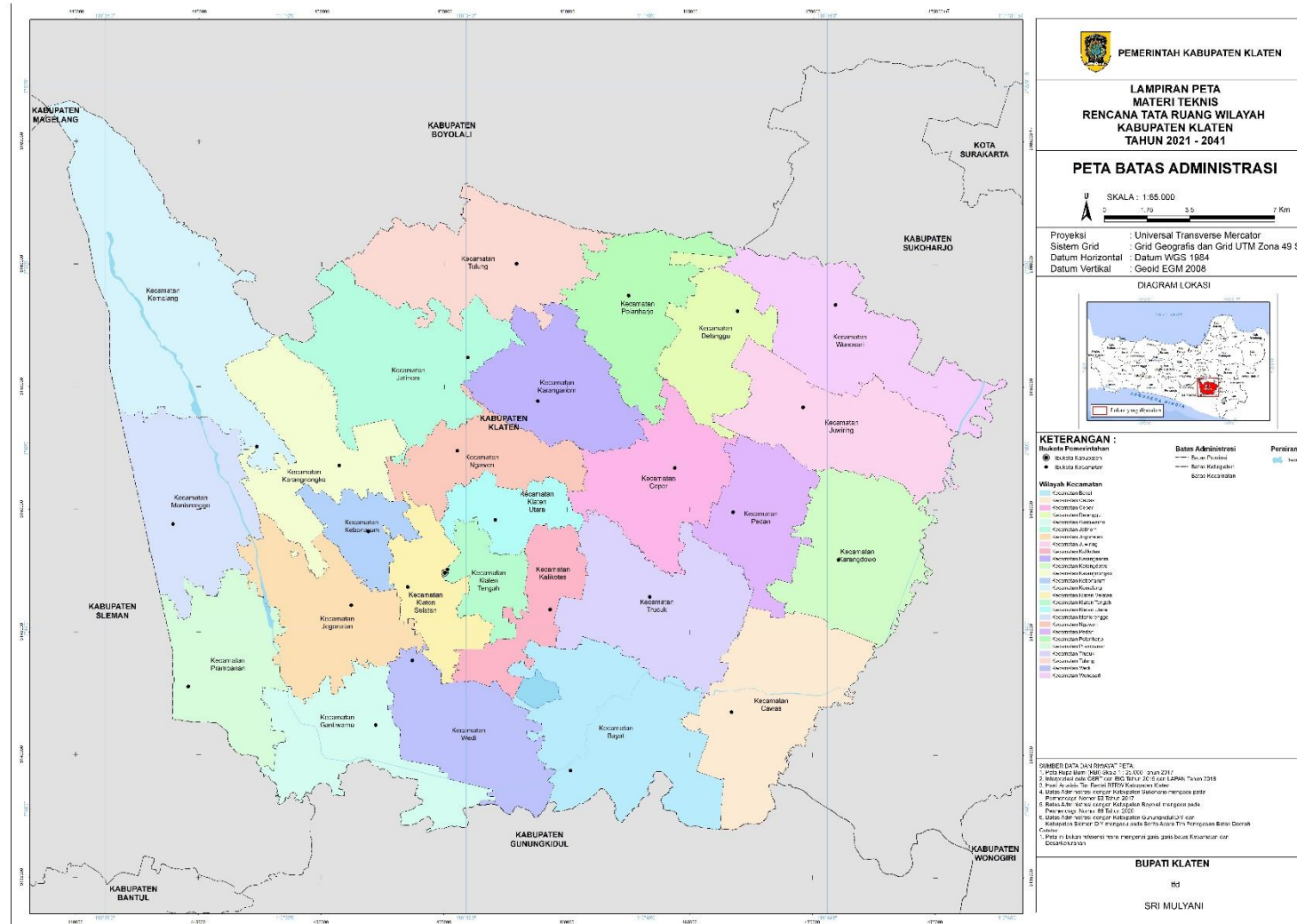
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
17	Wonosari	33,38	4,76
18	Delanggu	20,03	2,86
19	Polanharjo	25,22	3,60
20	Karanganom	25,62	3,65
21	Tulung	34,44	4,91
22	Jatinom	37,11	5,29
23	Kemalang	60,19	8,58
24	Klaten Selatan	15,09	2,15
25	Klaten Tengah	9,59	1,37
26	Klaten Utara	11,17	1,59
Kabupaten Klaten		701,52	100,00

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2024

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Klaten
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten, 2021-2041

2.1.2 Kondisi Topografi

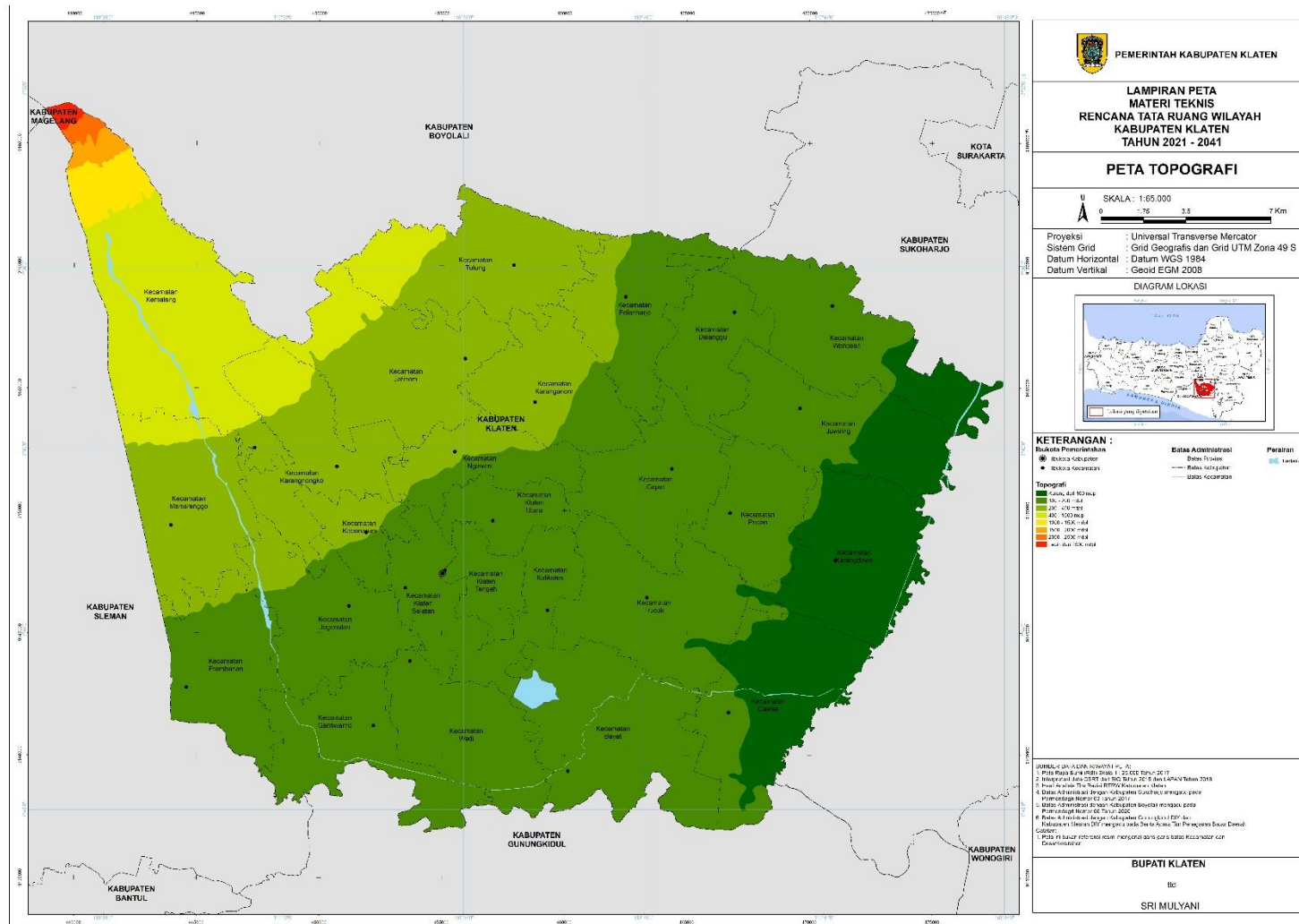
Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 meter hingga 160 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran yaitu:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah Dataran (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonharum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, PEdan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo.
3. Wilayah Berbukit/Gunung Kapur (wilayah bagian selatan) yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian Gantiwarno.

Kondisi dataran yang bervariasi tersebut memberikan keuntungan bagi setiap daerahnya. Setiap daerah atau kecamatan di Kabupaten Klaten memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut dapat berupa sumber daya alam ataupun yang lainnya. Kecamatan Polanharjo, memiliki sumber daya air yang melimpah, bahkan potensi sumber daya air ini mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat sekitar Kabupaten Klaten.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten, 2021-2041

2.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan pembagian fisiografi yang dikemukakan oleh Van Bemmelen (1949), Kabupaten Klaten termasuk dalam jalur Pegunungan Selatan. Jalur ini dimulai dari sebelah Selatan Yogyakarta memanjang ke Timur hingga Timur dari ujung Jawa Timur yang membentuk rangkaian pegunungan memanjang sejajar dengan pantai Selatan Pulau Jawa. Jalur Pegunungan Selatan di Jawa Timur oleh Van Bemmelen (1949), dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Bagian Utara yang dibentuk rangkaian pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur, mulai dari Pegunungan Baturagung di bagian Barat, ke arah Timur Pegunungan Popoh dan pada bagian Timur adalah Pegunungan Kembangan.
- b. Bagian Selatan, membentuk rangkaian perbukitan batugamping dengan puncak-puncaknya yang banyak sekali dan dikenal dengan nama pegunungan seribu, yang membentuk topografi karst. Bagian Utara dan bagian Selatan dipisahkan oleh Cekungan Wonosari dan Cekungan Baturetno.

Perbukitan Jiwo di Bayat merupakan inlier (terpisah menyendiri) dari kelompok batuan Pra-Tersier dan Tersier disekitar endapan Kuartar, yang terutama terdiri dari endapan fluvio-vulkanik dari Merapi. Elevasi tertinggi dari puncak-puncak yang ada di Perbukitan Jiwo, tidak lebih dari 300 mdpl, sehingga perbukitan tersebut dapat dikategorikan perbukitan rendah. Perbukitan Jiwo dipisahkan oleh aliran sungai Dengkeng sehingga sering disebut Perbukitan Jiwo bagian Barat dan Perbukitan Jiwo bagian Timur. Daerah Perbukitan Jiwo bagian Barat mempunyai puncak-puncak berarah Utara-Selatan, yang diwakili oleh puncak-puncak Jabalkat, Kebo, Merak, Cakaran, Budo, Sari dan Tugu dengan dibagian paling Utara membelok ke arah Barat, yaitu Perbukitan Kampak. Daerah Perbukitan Jiwo Puncak Konang, Pendul dan Temas, dengan percabangan ke arah Utara yang diwakili oleh puncak Jokotuo dan Bawak.

Daerah Perbukitan Jiwo, yang tersusun oleh batugamping menunjukkan perbukitan memanjang dengan punggung yang tumpul sehingga kenampakan puncak-puncak tidak begitu nyata. Tebing-tebing perbukitannya tidak terlalu terjal dan curam sehingga alur-alurnya tidak banyak dijumpai (perbukitan Bawak-Temas di Jiwo bagian Timur dan Tugu- Kampak di Jiwo bagian Barat). Untuk daerah yang

tersusun oleh batuan metamorf, perbukitannya menunjukkan relief yang nyata, dengan tebing-tebing yang terjal dan curam. Kuatnya proses penorehan tersebut berakibat di kaki perbukitan ini banyak terakumulasi endapan hasil pelapukan dan juga erosi yang dikenal sebagai endapan koluvial. Puncak-puncak perbukitan yang tersusun oleh batuan metamorf ini kelihatannya lebih menonjol dan beberapa diantaranya cenderung berbentuk kerucut, misalkan puncak Jabalkat dan puncak Semangu. Daerah yang memiliki relief yang kuat ini berada pada Jiwo bagian Timur mulai dari puncak Konang ke arah Timur hingga puncak Semangu dan Jokotuo. Daerah di sekitar puncak Pendul merupakan satu-satunya tubuh bukit yang seluruhnya tersusun oleh batuan beku. Kondisi morfologinya cukup kasar mirip perbukitan metamorf, namun relief yang ditunjukkan tidak sekuat dengan perbukitan metamorf.

Di bagian Utara dan Tenggara Perbukitan Jiwo bagian Timur terdapat bukit terisolir yang menonjol dari dataran alluvial yang disekitarnya. Bukit terpisah atau solited hill ini adalah bukit Jeto di Utara dan bukit Lanang di Tenggara. Bukit jeto secara umum tersusun oleh batugamping yang bertumpu secara tidak selaras diatas batuan metamorf, sedangkan bukit Lanang secara keseluruhan tersusun oleh batugamping. Di Perbukitan Jiwo bagian Barat juga ditemukan 2 inlier, masing-masing bukit Wungkal dan bukit salam. Bukit Wungkal semakin lama semakin rendah akibat penggalian penduduk untuk diambil batu asah (batu wungkal) yang terdapat di bukit tersebut. Perbukitan Jiwo bagian Barat dan Perbukitan Jiwo bagian Timur di pisahkan oleh aliran sungai Dengkeng.

Sungai Dengkeng mempunyai aliran yang memutar kompleks Jiwo bagian Barat, semula mengalir ke arah Selatan-Tenggara, berbelok ke arah Timur kemudian ke Utara, memotong perbukitan untuk selanjutnya mengalir ke arah Timur laut. Sungai Dengkeng ini merupakan pengering utama dari dataran rendah di sekitar perbukitan Jiwo. Dataran yang rendah ini semula merupakan rawa yang luas, akibat air yang mengalir dari Gunung Merapi tertahan oleh Pegunungan Selatan. Genangan air di perbukitan Jiwo di bagian Utara mengendap pasir yang berasal dari lahar merapi, sedangkan di bagian Selatan atau pada lekukan antar bukit di Perbukitan Jiwo merupakan endapan air tenang yang berupa lempung hitam.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Berdasarkan uraian diatas, Kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Klaten antara lain aluvium tua, batuan gunung api merapi, batuan gunung api tua, batuan malihan, batuan merapi tua, dasit, diorit pendul, endapan aluvium, formasi gamping wungkal, formasi kebobutak, formasi mandalika, formasi semilir, dan formasi wonosari.

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



2.1.4 Hidrogeologi

Kabupaten Klaten memiliki 2 karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, dan sebagainya. Sementara air tanah (hidrogeologi) mencakup mata air, air sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar 5 sampai dengan 15 meter dan berbeda kedalaman antara satu tempat dengan tempat yang lain. Hidrogeologi di Kabupaten Klaten terdiri dari 6 (enam) klasifikasi yaitu: 1) akuifer produktif setempat, 2) akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, 3) akuifer dengan produktivitas sedang terdapat setempat, 4) akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, 5) akuifer produktif dengan penyebaran luas, dan 6) daerah air tanah langka.

Sungai di Kabupaten Klaten sebanyak 80 sungai dengan induk Sungai Bengawan Solo dan Sungai Dengkeng merupakan sungai dengan klasifikasi Ordo I. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Klaten

No	Nama Sungai	Klasifikasi	Panjang
1	Bengawan Solo	Induk	8,50
2	Dengkeng	Ordo I	40,75
3	Brambang	Ordo II	16,00
4	Buntung	Ordo II	10,00
5	Pusur	Ordo II	30,00
6	Bloro	Ordo II	5,00
7	Babadan	Ordo II	6,50
8	Ngolodono	Ordo II	7,0
9	Mlese	Ordo II	23,50
10	Tambong	Ordo II	1,70
11	Padangan	Ordo II	11,00
12	Kalikuning	Ordo II	10,20
13	Papah	Ordo II	2,75
14	Ujung	Ordo II	32,50
15	Birin	Ordo II	15,40
16	Mindi	Ordo II	1,20
17	Widoro	Ordo II	2,50
18	Ngawu-awu	Ordo II	1,20
19	Lusah	Ordo II	24,75
20	Sambomerten	Ordo II	1,50
21	Banyuurip	Ordo II	2,50
22	Af. Paten	Ordo II	13,20

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Nama Sungai	Klasifikasi	Panjang
23	Menggah	Ordo II	1,50
24	Simping	Ordo II	12,65
25	Kangklangan	Ordo II	7,30
26	Borongan	Ordo II	10,75
27	Opak	Ordo III	64,00
28	Kauman	Ordo III	9,00
29	Jebol	Ordo III	22,50
30	Kingkang	Ordo III	8,00
31	Dandang	Ordo III	6,50
32	Ceper	Ordo III	30,00
33	Bajing	Ordo III	7,50
34	Macanan	Ordo III	4,50
35	Trucuk	Ordo III	11,50
36	Afur Kalijaran	Ordo III	6,70
37	Afur Deres	Ordo III	4,15
38	Merbung	Ordo III	15,25
39	Modin	Ordo III	8,86
40	Jiwan	Ordo III	7,50
41	Gemampir	Ordo III	6,10
42	Banaran	Ordo III	2,75
43	Logede	Ordo III	7,70
44	Gempolan	Ordo III	4,40
45	Somokaton	Ordo III	5,50
46	Afur Birit	Ordo III	3,85
47	Slegrengan	Ordo III	4,40
48	Mlese	Ordo III	3,00
49	Panggang	Ordo III	3,80
50	Depok	Ordo III	2,75
51	Sampan	Ordo III	0,80
52	Ondo	Ordo III	4,65
53	Ciling	Ordo III	5,50
54	Song	Ordo III	1,65
55	Gebang	Ordo III	1,75
56	Sangiran	Ordo III	2
57	Gupak Warak	Ordo III	0,5
58	Kluwih	Ordo III	3,65
59	Woro	Ordo III	16,80
60	Sukunan	Ordo III	4,50
61	Ipik	Ordo III	2,00
62	Deleran	Ordo III	7,00
63	Cewok	Ordo III	7,50
64	Putih	Ordo III	6,05
65	Klegung	Ordo III	6,60
66	Jumok	Ordo III	7,25
67	Wonggo	Ordo III	18,00
68	Gamping	Ordo III	6,85
69	Metuk	Ordo III	4,30
70	Lunyu	Ordo III	7,15
71	Kroman	Ordo III	10,50
72	Batang	Ordo III	3,85
73	Dompol	Ordo III	9,65

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Nama Sungai	Klasifikasi	Panjang
74	Bumiharjo	Ordo III	7,15
75	Puluhan	Ordo III	6,50
76	Karangduren	Ordo III	5,50
77	Ngrancah	Ordo III	11,00
78	Gempol	Ordo III	3,50

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037

Selain sungai, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk yaitu Waduk Rowo Jombor di Kecamatan Bayat. Waduk Rowo Jombor mempunyai luas 189 hektar. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 m. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 216 sumber mata air yang tersebar di 20 kecamatan, dari jumlah tersebut sebagian besar kondisinya masih baik, namun sebagian kecil kondisinya ada yang mati, ditutup, rusak, dan tidak terawat. Sumber air lainnya yaitu embung, di mana sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

Tabel 2.3 Embung di Kabupaten Klaten

No	Nama Embung	Lokasi
1	Embung Tarubasan	Tarubasan, Karanganyar
2	Embung Taskombang	Taskombang, Manisrenggo
3	Embung Pandes	Pandes, Wedi
4	Embung Krakitan I	Krakitan, Bayat
5	Embung Krakitan II	Krakitan, Bayat
6	Embung Kendalsari	Kendalsari, Kemalang
7	Embung Kluwih	Kecemen, Manisrenggo
8	Embung Panggang	Panggang, Kemalang
9	Embung Mranggen	Mranggen, Jatinom
10	Embung Madirdo	Tlogo, Prambanan
11	Embung Karangasem	Karangasem, Cawas
12	Embung Krikilan	Krikilan, Bayat
13	Embung Karangpakel	Karangpakel, Trucuk
14	Embung Tambong Wetan	Tambong Wetan, Kalikotes
15	Embung Sidorejo	Sidorejo, Kemalang
16	Embung Tegalmulyo	Tegalmulyo, Kemalang
17	Embung Tijayan	Tijayan, Manisrenggo

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037

LAPORAN AKHIR



Gambar 2.4 Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten, 2021-2041

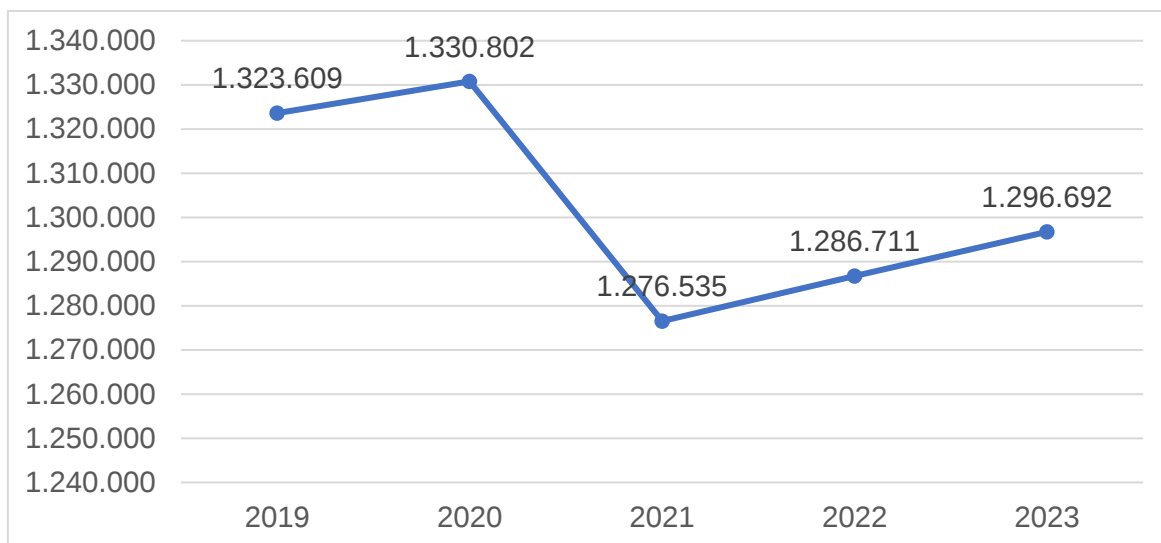
2.1.5 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2024, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Klaten adalah 1.296.692 jiwa. Dalam 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif. pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan kembali. Secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prambanan	52.824	54.667	51.499	52.068	52.712
2	Gantiwarno	40.696	44.262	38.620	38.875	39.091
3	Wedi	54.507	57.338	52.068	52.355	52.716
4	Bayat	65.649	69.554	63.541	64.083	64.374
5	Cawas	60.690	62.222	57.569	57.990	58.339
6	Trucuk	81.715	82.901	79.064	79.933	80.568
7	Kebonarum	20.935	21.467	19.835	19.868	19.911
8	Jogonalan	61.237	63.848	58.869	59.487	59.893
9	Manisrenggo	44.373	45.378	43.018	43.566	43.910
10	Karangnongko	38.096	39.087	36.873	37.125	37.420
11	Ceper	67.619	70.048	65.048	65.369	65.918
12	Pedan	48.990	50.421	46.907	47.210	47.586
13	Karangdowo	45.256	47.089	43.486	43.639	43.873
14	Juwiring	61.155	60.339	58.354	58.784	59.198
15	Wonosari	64.770	62.900	62.816	63.370	64.063
16	Delanggu	43.661	42.267	42.129	42.342	42.560
17	Polanharjo	42.969	41.146	41.009	41.194	41.371
18	Karanganom	47.602	46.270	46.304	46.725	47.179
19	Tulung	55.419	53.634	53.834	54.430	54.856
20	Jatinom	62.312	60.171	60.296	60.752	61.526
21	Kemalang	40.064	39.299	39.479	39.907	40.372
22	Ngawen	47.368	45.860	45.853	46.144	46.325
23	Kalikotes	38.116	37.083	37.069	37.307	37.609
24	Klaten Utara	49.265	48.023	47.928	48.379	48.903
25	Klaten Tengah	42.634	41.620	41.146	41.238	41.557
26	Klaten Selatan	45.687	43.908	43.921	44.571	44.862
Kabupaten Klaten		1.323.609	1.330.802	1.276.535	1.286.711	1.296.692

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2024



Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten 2024, diolah

Sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, sebanyak 890.502 jiwa atau 68,67% penduduk Kabupaten klaten berusia produktif (15-64 tahun). Sebanyak 268.470 jiwa atau 20,70% penduduk merupakan golongan penduduk yang belum memasuki usia produktif (<15 tahun) dan 137.720 jiwa atau 10,62% penduduk termasuk kelompok usia tidak produktif (65 tahun keatas). Bentuk piramida yang cenderung mengerucut di bagian bawah dan bagian atas dapat diartikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten memperlihatkan keseimbangan antara kelahiran dan kematian penduduk. Hal ini juga dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil serta jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan penduduk usia non produktif. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Klaten Tahun 2023

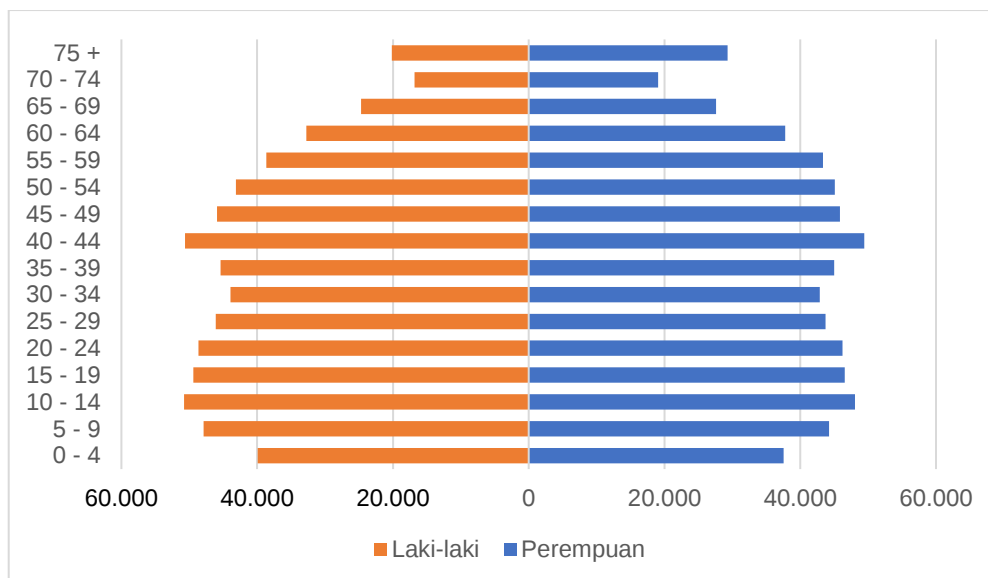
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	39.924	37.569	77.493
5 - 9	47.900	44.241	92.141
10 - 14	50.755	48.081	98.836

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15 - 19	49.399	46.536	95.935
20 - 24	48.644	46.247	94.891
25 - 29	46.117	43.708	89.825
30 - 34	43.911	42.888	86.799
35 - 39	45.389	44.994	90.383
40 - 44	50.643	49.422	100.065
45 - 49	45.924	45.858	91.782
50 - 54	43.148	45.092	88.240
55 - 59	38.669	43.345	82.014
60 - 64	32.769	37.799	70.568
65 - 69	24.700	27.616	52.316
70 - 74	16.842	19.073	35.915
75 +	20.180	29.309	49.489
Kabupaten Klaten	644.914	651.778	1.296.692

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten 2024, diolah



Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten 2024, diolah

Kepadatan penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah 1.848 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Klaten Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 4.378 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kemalang dengan kepadatan penduduk sebesar 671 jiwa/km². Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km2
1	Prambanan	26,09	52.712	2.020
2	Gantiwarno	26,44	39.091	1.478
3	Wedi	26,26	52.716	2.007
4	Bayat	42,10	64.374	1.529
5	Cawas	35,94	58.339	1.623
6	Trucuk	34,69	80.568	2.323
7	Kebonarum	10,42	19.911	1.911
8	Jogonalan	27,59	59.893	2.171
9	Manisrenggo	30,60	43.910	1.435
10	Karangnongko	29,49	37.420	1.269
11	Ceper	25,77	65.918	2.558
12	Pedan	20,00	47.586	2.379
13	Karangdowo	30,83	43.873	1.423
14	Juwiring	30,90	59.198	1.916
15	Wonosari	33,38	64.063	1.919
16	Delanggu	20,03	42.560	2.125
17	Polanharjo	25,22	41.371	1.640
18	Karanganom	25,62	47.179	1.841
19	Tulung	34,44	54.856	1.593
20	Jatinom	37,11	61.526	1.658
21	Kemalang	60,19	40.372	671
22	Ngawen	18,45	46.325	2.511
23	Kalikotes	14,11	37.609	2.665
24	Klaten Utara	11,17	48.903	4.378
25	Klaten Tengah	9,59	41.557	4.333
26	Klaten Selatan	15,09	44.862	2.973
Kabupaten Klaten		701,52	1.296.692	1.848

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten 2024, diolah

Apabila dihitung menggunakan proyeksi penduduk dengan metode geometri aritmatika maka diketahui bahwa pada tahun 2029 jumlah penduduk Kabupaten Klaten sejumlah 1.268.230 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Trucuk yaitu sejumlah 84.485 jiwa. Sementara itu, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kebonarum yaitu sejumlah 20.171 jiwa. Secara rinci hasil proyeksi penduduk Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 sebagai berikut.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Tabel 2.7 Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Prambanan	0,012	54.024	54.692	55.369	56.053	56.747
2	Gantiwarno	0,006	39.527	39.746	39.967	40.189	40.412
3	Wedi	0,007	53.445	53.814	54.185	54.559	54.935
4	Bayat	0,005	64.960	65.255	65.551	65.849	66.148
5	Cawas	0,006	59.043	59.399	59.756	60.116	60.478
6	Trucuk	0,008	81.853	82.503	83.159	83.819	84.485
7	Kebonarum	0,002	19.997	20.041	20.084	20.127	20.171
8	Jogonalan	0,007	60.713	61.128	61.545	61.965	62.388
9	Manisrenggo	0,008	44.606	44.958	45.313	45.671	46.032
10	Karangnongko	0,008	38.017	38.319	38.624	38.931	39.240
11	Ceper	0,008	67.030	67.593	68.160	68.733	69.310
12	Pedan	0,008	48.347	48.732	49.120	49.511	49.906
13	Karangdowo	0,005	44.345	44.583	44.822	45.062	45.304
14	Juwiring	0,007	60.035	60.458	60.883	61.312	61.744
15	Wonosari	0,011	65.472	66.188	66.912	67.643	68.383
16	Delanggu	0,005	42.999	43.221	43.443	43.667	43.892
17	Polanharjo	0,004	41.727	41.907	42.087	42.267	42.449
18	Karanganom	0,010	48.100	48.568	49.040	49.516	49.997
19	Tulung	0,008	55.718	56.154	56.594	57.037	57.483
20	Jatinom	0,013	63.104	63.908	64.722	65.546	66.382
21	Kemalang	0,012	41.318	41.800	42.287	42.780	43.278
22	Ngawen	0,004	46.689	46.872	47.056	47.241	47.426
23	Kalikotes	0,008	38.220	38.530	38.842	39.156	39.473
24	Klaten Utara	0,011	49.968	50.509	51.056	51.609	52.168
25	Klaten Tengah	0,008	42.202	42.529	42.858	43.189	43.523
26	Klaten Selatan	0,007	45.450	45.746	46.045	46.346	46.648
Kabupaten Klaten		0,008	1.316.911	1.327.151	1.337.479	1.347.896	1.358.402

Sumber: Analisis, 2024

2.1.6 Sosial

2.1.6.1 Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Klaten diketahui bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar Rp. 505.826/kapita/bulan. Nilai tersebut naik Rp. 17.724/kapita/bulan dibandingkan garis kemiskinan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 488.102/kapita/bulan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di

LAPORAN AKHIR

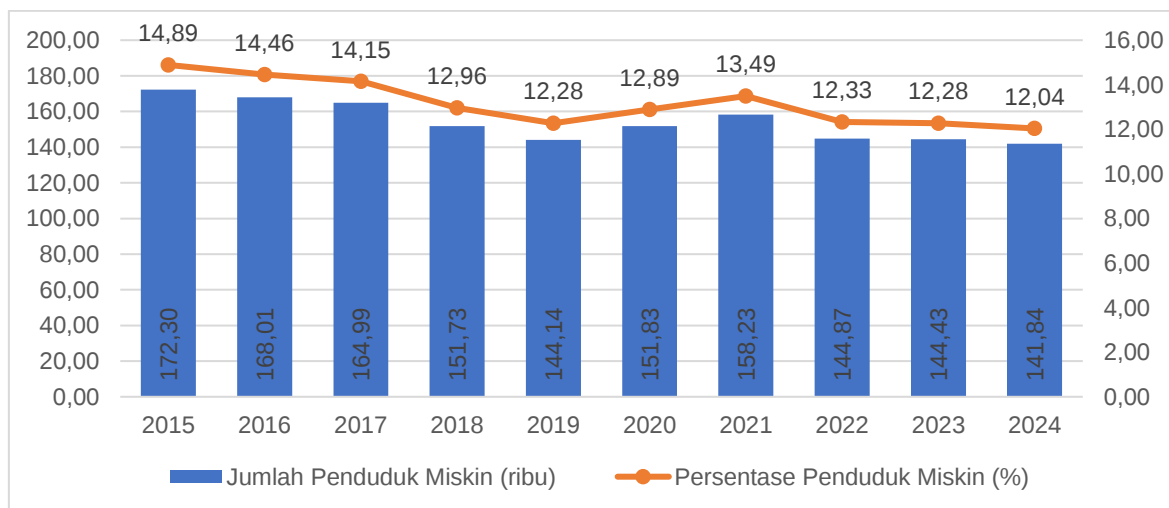
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tercatat sebanyak 141.840 jiwa atau 12,04%. Angka tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 144.438 jiwa atau 12,28%. Secara rinci garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.8 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	340.484	172,30	14,89
2016	364.240	168,01	14,46
2017	376.305	164,99	14,15
2018	397.447	151,73	12,96
2019	405.537	144,14	12,28
2020	419.510	151,83	12,89
2021	436.896	158,23	13,49
2022	458.872	144,87	12,33
2023	488.102	144,43	12,28
2024	505.826	141,84	12,04

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2024



Gambar 2.7 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 mengalami penurunan. PI pada tahun 2024 sebesar 1,46 atau turun 0,24 poin dibandingkan PI pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,70. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran terkait penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. P2 pada tahun 2024 sebesar 0,27 atau turun 0,11 poin dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin sempit. Secara rinci Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebagai berikut.

**Tabel 2.9 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2015	2,72	0,72
2016	2,70	0,71
2017	2,46	0,61
2018	1,72	0,38
2019	1,46	0,27
2020	1,66	0,31
2021	1,79	0,38
2022	1,86	0,44
2023	1,70	0,38
2024	1,46	0,27

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2024, diolah

2.2 Kondisi Air Minum dan Sanitasi

2.2.1 Air Minum

2.2.1.1 Capaian Akses Air Minum

Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Klaten sampai tahun 2023 diketahui bahwa pelayanan air minum dilayani oleh 2 (dua) SPAM yaitu SPAM Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. SPAM Perpipaan di layani oleh Perumda Tirta Merapi dan PAMSIMAS. Sementara itu, SPAM Bukan Jaringan Perpipaan meliputi sumur dangkal dan bangunan penangkap mata air. Secara rinci kondisi pelayanan air minum di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEKUTAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

2.10 Kondisi Pelayanan Air Minum di Kabupten Klaten Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)			SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)						SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)			
		Jumlah Penduduk	Perdesaan	Perkotaan	Perumda Tirta Merapi		Pamsimas (perkotaan)		Pamsimas (Pedesaan)		Sumur Dangkal		Bangunan Penangkap Mata Air	
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Prambanan	52.461	0	52.461	4.366	8,32	19.548	37,26	0	0,00	28.212	53,78		
2	Gantiwarno	38.955	0	38.955	1.080	2,77	18.525	47,55	0	0,00	14.614	37,51		
3	Wedi	52.526	3.683	48.843	8.891	16,93	1.218	2,32	0	0,00	35.919	68,38		
4	Bayat	64.262	6.134	58.128	1.211	1,88	29.179	0,45	5.181	0,08	23.644	36,79		
5	Cawas	58.105	2.424	55.681	26.282	45,23	5.832	10,04	973	1,67	19.942	34,32		
6	Trucuk	80.167	0	80.167	3.608	0,05	7.758	9,68	0	0,00	63.520	79,23		
7	Kebonarum	19.870	0	19.870	0	0,00	9.217	46,39	0	0,00	9.209	46,34		
8	Jogonalan	59.676	0	59.676	66	0,11	9.018	15,11	0	0,00	46.150	77,33		
9	Manisrenggo	43.707	5.755	37.952	373	0,85	8.913	20,39	4.955	11,34	27.875	63,78		
10	Karangnongko	37.285	4.972	32.313	2.418	6,49	16.685	44,75	2.352	6,31	14.684	39,38		
11	Ceper	65.595	0	65.595	13.623	20,77	3.114	4,75	0	0,00	45.147	68,83		
12	Pedan	47.395	0	47.395	1.296	2,73	2.948	6,22	0	0,00	41.686	87,95		
13	Karangdowo	43.866	4.436	39.430	1.352	3,08	9.620	21,93	982	2,24	29.226	66,63		
14	Juwiring	58.979	4.249	54.730	0	0,00	2.325	3,94	476	0,81	54.607	92,59		
15	Wonosari	63.724	0	63.724	0	0,00	1.290	2,02	0	0,00	59.910	94,01		
16	Delanggu	42.486	0	42.486	11.313	26,63	428	1,01	0	0,00	23.856	56,15		
17	Polanharjo	41.303	0	41.303	8.415	20,37	23.298	56,41	0	0,00	7.609	18,42		
18	Karanganom	46.895	0	46.895	12.590	26,85	3.311	7,06	0	0,00	28.538	60,86		
19	Tulung	54.554	8.422	46.132	1.603	2,94	8.670	15,89	2.621	4,80	41.529	76,12		
20	Jatinom	61.036	11.217	49.819	1.323	2,17	15.100	24,74	8.825	14,46	34.502	56,53		
21	Kemalang	40.135	23.388	16.747	7.430	0,19	7.095	17,68	12.396	30,89	1.334	3,32	495	1,23
22	Ngawen	46.125	0	46.125	476	1,03	564	1,22	0	0,00	40.097	86,93		
23	Kalikotes	37.405	0	37.405	6.099	16,31	4.177	11,17	0	0,00	26.568	71,03		
24	Klaten Utara	48.590	0	48.590	16.072	33,08	0	0	0	0	29.626	60,97		
25	Klaten Tengah	41.352	0	41.352	32.923	79,62	0	0,00	0	0,00	3.774	9,13		

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)			SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)						SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)			
		Jumlah Penduduk	Perdesaan	Perkotaan	Perumda Tirta Merapi		Pamsimas (perkotaan)		Pamsimas (Pedesaan)		Sumur Dangkal		Bangunan Penangkap Mata Air	
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
26	Klaten Selatan	44.707	0	44.707	18.197	40,70	107	0,24	0	0	25.845	57,81		
Jumlah		1.291.161	74.680	1.216.481	181.007	14,02	207.940	16,10	38.761	3,00	777.622,69	60,23	495	0,04

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten Tahun 2024, diolah

2.11 Kondisi Capaian Pelayanan Air Minum di Kabupten Klaten Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)			Jumlah Capaian Akses Air Minum		Capaian Akses Air Minum (Jiwa)		Belum Ada Akses Pelayanan Air Minum	
		Jumlah Penduduk	Perdesaan	Perkotaan			Pedesaan	Perkotaan		
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	jiwa	jiwa	Jiwa	%
1	Prambanan	52.461	0	52.461	52.126	99,36		52.126	335	0,64
2	Gantiwarno	38.955	0	38.955	34.219	87,84		34.219	4.736	12,16
3	Wedi	52.526	3.683	48.843	46.028	87,63	3.486	42.542	6.498	0,12
4	Bayat	64.262	6.134	58.128	59.215	92,15	6.134	53.081	5.047	7,85
5	Cawas	58.105	2.424	55.681	53.029	91,26	2.424	50.605	5.076	8,74
6	Trucuk	80.167	0	80.167	74.886	93,41	0	74.886	5.281	0,07
7	Kebonarum	19.870	0	19.870	18.426	92,73	0	18.426	1.444	7,27
8	Jogonalan	59.676	0	59.676	55.234	92,56	0	55.234	4.442	7,44
9	Manisrenggo	43.707	5.755	37.952	42.116	96,36	5.755	36.361	1.591	3,64
10	Karangnongko	37.285	4.972	32.313	36.139	96,93	4317	31.822	1.146	3,07
11	Ceper	65.595	0	65.595	61.884	94,34	0	61.884	3.711	5,66
12	Pedan	47.395	0	47.395	45.930	96,91	0	45.930	1.465	3,09
13	Karangdowo	43.866	4.436	39.430	41.180	93,88	3.272	37.908	2.686	6,12
14	Juwiring	58.979	4.249	54.730	57.408	97,34	4.249	53.159	1.571	2,66
15	Wonosari	63.724	0	63.724	61.200	96,04	0	61.200	2.524	0,04
16	Delanggu	42.486	0	42.486	35.597	83,79	0	35.597	6.889	16,21
17	Polanharjo	41.303	0	41.303	39.322	95,20	0	39.322	1.981	0,05
18	Karanganom	46.895	0	46.895	44.439	94,76	0	44.439	2.456	5,24

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)			Jumlah Capaian Akses Air Minum		Capaian Akses Air Minum (Jiwa)		Belum Ada Akses Pelayanan Air Minum	
		Jumlah Penduduk	Perdesaan	Perkotaan			Pedesaan	Perkotaan		
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	jiwa	jiwa	Jiwa	%
19	Tulung	54.554	8.422	46.132	54.423	99,76	8.407	46.016	131	0,00
20	Jatinom	61.036	11.217	49.819	59.750	97,89	11.217	48.533	1.286	2,11
21	Kemalang	40.135	23.388	16.747	28.255	70,40	14.095	14.525	11.515	28,69
22	Ngawen	46.125	0	46.125	41.137	89,19	0	41.137	4.988	10,81
23	Kalikotes	37.405	0	37.405	36.844	98,50	0	36.844	561	1,50
24	Klaten Utara	48.590	0	48.590	45.698	94,05	0	45.698	2.892	5,95
25	Klaten Tengah	41.352	0	41.352	36.697	88,74	0	36.697	4.655	11,26
26	Klaten Selatan	44.707	0	44.707	44.149	98,75	0	44.149	558	1,25
Jumlah		1.291.161	74.680	1.216.481	1.205.331	93,35	63.356	1.142.340	85.465	6,619

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten Tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel 2.10 diketahui bahwa jumlah penduduk terlayani SPAM jaringan perpipaan Perumda Tirta Merapi sebesar 181.007 jiwa atau 14,02% dan jaringan perpipaan Pamsimas sebesar 246.701 jiwa atau 19,11%. Sementara itu, jumlah penduduk yang terlayani SPAM bukan jaringan perpipaan berupa sumur dangkal sebesar 777.623 jiwa atau 60,23% dan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air sebesar 495 jiwa atau 0,04%. Kecamatan yang terlayani SPAM bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air hanya berada di Kecamatan Kemalang.

Berdasarkan tabel 2.11 diketahui bahwa jumlah penduduk yang terlayani air minum secara keseluruhan sebesar 1.205.331 jiwa atau 93,35% yang meliputi 1.142.340 jiwa penduduk perkotaan dan 63.356 jiwa penduduk pedesaan. Sedangkan jumlah penduduk yang belum ada akses air minum sebesar 85.465 jiwa atau 6,62%.

Sementara itu, apabila melihat data capaian pelayanan air minum dari tahun 2014-2023 diketahui bahwa persentase pelayanan air minum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci persentase pelayanan air minum di Kabupaten Klaten tahun 2014-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.12 Persentase Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2023

Tahun	Akses air minum (%)	Jaringan Perpipaan (%)	Jaringan Non Perpipaan (%)	Belum Akses (%)
2023	93,35	33,13	60,35	6,62
2022	93,19	32,53	60,66	6,81
2021	92,69	32,67	59,98	7,31
2020	91,77	33,58	58,19	8,23
2019	91,14	30,04	61,10	8,86
2018	89,15	29,23	59,92	10,85
2017	87,31	27,80	59,51	12,69
2016	87,2	23,54	63,66	12,8
2015	83,4	21,34	62,06	16,6
2014	80,8	20,65	60,15	19,2

Sumber: DPUPR Kab. Klaten, 2024

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Berdasarkan aspek teknis penyelenggaraan layanan air minum di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) penyelenggaraan SPAM yaitu Perumda Tirta Merapi selaku BUMD Kabupaten Klaten dan melalui Program Pamsimas. Adapun data layanan dari 2 (dua) penyelenggaraan sebagai berikut.

2.2.1.2 Kondisi Penyelenggaraan Layanan Air Minum Perpipaan

A. Perumda Tirta Merapi

1. SPAM Kota/Kantor Pusat

Sumber air baku yang digunakan SPAM Kota Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten adalah air tanah yaitu DW I Gayampurit, DW II Pamadikarya dan mata air yaitu MA. Lanang, MA. Geneng. SPAM Kota ini melayani wilayah Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Kalikotes. Secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.13 Unit Air Baku SPAM Kota/ Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi
Kabupaten Klaten**

No	Sumber Air Baku	Jenis	Lokasi	Sistem Pengaliran Air	Kapasitas (L/detik)	Rata-rata Debit (L/detik)
1	MA. Lanang	Mata Air	Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum	Gravitasi	48,84	48,84
2	MA. Geneng	Mata Air	Desa Ngrundul Kec. Kebonarum	Gravitasi	172,74	172,74
3	DW I Gayampurit	Air Tanah	Desa Gayampurit Kec. Klaten Selatan	Pompa	15,00	15,00
4	DW II Pamadikarya	Air Tanah	Desa Bareng Kec. Klaten Tengah	Pompa	11,99	11,99

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

**Tabel 2.14 Unit Produksi SPAM Kota/ Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi
Kabupaten Klaten**

No	Instalasi	Jam Operasi (Jam dalam setahun)	Kap. Terpasang		Kap. Dimanfaatkan	
			(l/dt)	m ³	(l/dt)	m ³
1	MA. Lanang	8.760	48,84	1.540.214,83	48,84	1.540.214,83
2	MA. Geneng	8.760	172,74	5.447.527,67	172,74	5.447.527,67
3	DW I Gayampurit	4.380	15,00	473.040,00	15,00	473.040,00
4	DW II Pamadikarya	6.570	11,99	378.140,00	11,99	378.140,00

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

Volume yang didistribusikan paling banyak berasal dari sumber air baku MA. Geneng yaitu sebesar 3.935.595 m³. Sedangkan volume yang didistribusikan paling sedikit berasal dari sumber air baku DW I Gayamprit yaitu sebesar 128.918 m³. Secara rinci unit distribusi pada SPAM Kota/Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten sebagai berikut.

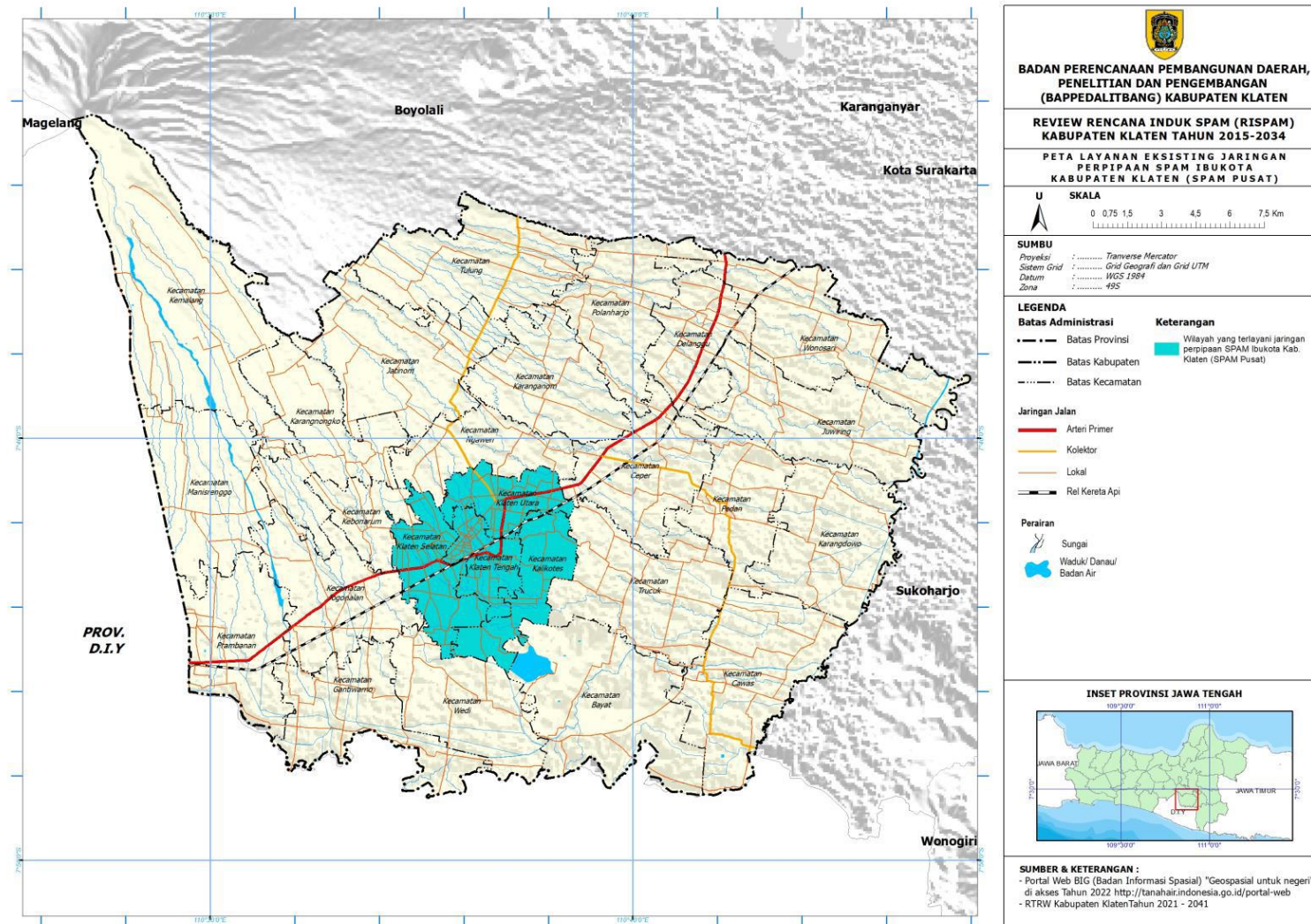
**Tabel 2.15 Unit Distribusi SPAM Kota/Kantor Pusat Perumda Tirta Merapi
Kabupaten Klaten**

No	Sumber Air Baku	Vol. Produksi Real (m ³)	Kap. Menganggur (m ³)	Pemakaian Operasional (m ³)	Vol. Didistribusikan (m ³)
1	MA. Lanang	1.523.336	16.879	8.439	1.514.897
2	MA. Geneng	5.270.309	177.219	1.334.714	3.935.595
3	DW I Gayamprit	202.309	270.731	73.391	128.918
4	DW II Pamadikarya	261.306	116.834	14.650	246.656

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



Gambar 2.8 Peta Layanan Eksisting Jaringan Perpipaan SPAM Kota Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten
Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037

2. SPAM Ibukota Kecamatan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten merupakan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) dengan wilayah pelayanan berupa pusat wilayah ibukota kecamatan, meliputi unit pelayanan IKK Prambanan, IKK Karangnongko, IKK Kemalang, IKK Karanganom, IKK Delanggu, IKK Ceper, IKK Wedi, IKK Pedan, IKK Cawas, IKK Jatinom, dan IKK Gantiwarno. Untuk wilayah pelayanan masing-masing SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.16 Unit Pelayanan SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten

No	SPAM IKK	Unit Pelayanan
1	IKK Prambanan	Tlogo, Taji, Kebondalem Kidul, Bugisan dan Kotesan
2	IKK Karangnongko	Karangnongko, Demakijo, Jetis, Duwet, Manjung, Kadilajo dan Jagalan
3	IKK Kemalang	Kemalang, Keputran, Dompok dan Sukorini
4	IKK Karanganom	Jurang Jero, Brangkal, Karangan, Beku, Kunden, Blanciran, Kr anom, Jambean, Padas (jatinom), Ngabean, Troso, Kapungan, Glagahwangi, Borongan, Keprabon (delanggu), Kahuman, Ngaran , Daleman, Puscangmiliran dan Wunut
5	IKK Delanggu	Delanggu, Gatak, Sabrang, Karang, Krecek, Kepanjen, Bowan, Banaran dan Sribit
6	IKK Ceper	Kurung (Pedan dan Ceper), Cetan (Pedan), Tegalrejo, Ceper, Klepu (Karanganom dan Ceper) Klepu, Ngawonggo, Kuncen, Jambu Kulon , Kujon
7	IKK Wedi	Dengkeng, Tanjungan, Pasung, Kadilangon, Sukorejo, Pandes, Gadungan, Kalitengah, Canan, Birit , Pesu, Pacing, Kadibolo, Trotok, Sembung, Jiwowetan (Sekarbolo), Melikan, Pakahan, Ngering dan Krakitan
8	IKK Pedan	Beji (Cawas), Temu wangi (Cawas), Sobayan, Kedungan, Tambakboyoy, Keden, Bendo dan Jetiswetan
9	IKK Cawas	Bendungan, Kedungampel, Bawak, Barepan, Cawas, Plosowangi, Gombang, Mlese, Tugu, Pakisan, Balak, nanggulan, Tirtomarto, Japanan, Baran, Jambakan, Tlingsing, Mandong, Sajen dan Pundungsari
10	IKK Jatinom	Jatinom, Bonyokan, Krajan dan Glagah
11	IKK Gantiwarno	Jogoprayan dan Towangsan

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Unit air baku SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.17 Unit Air Baku SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten

No	Sumber Air Baku	Jenis	Lokasi	Sistem Pengaliran Air	Kapasitas (l/detik)	Rata-rata debit (l/detik)
A IKK Prambanan						
1	DW I Kebondalem	Air Tanah	Desa Kebondalem Kec. Prambanan	Pompa	10,00	10,00
2	DW II Taskombang	Air Tanah	Desa Taskombang Kec. Manisrenggo	Pompa	10,00	10,00
3	DW III Kokosan	Air Tanah	Desa Kokosan Kec. Prambanan	Pompa	10,00	10,00
B IKK Karangnongko						
1	MA Sliling	Mata Air	Desa Keputran Kec. Kemalang	Gravitasi	8,00	8,00
C IKK Kemalang						
1	MA Sliling	Mata Air	Desa Keputran Kec. Kemalang	Pompa	5,60	5,60
2	DW Warung Air	Air Tanah	Desa Kemalang Kec. Kemalang	Pompa	10,30	10,30
D IKK Karanganom						
1	MA Ponggok	Mata Air	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	32,80	32,80
2	MA Jolotundo	Mata Air	Desa Jambeyan Kec. Karanganom	Gravitasi	8,40	8,40
3	MA Nila	Mata Air	Desa Daleman Kec. Tulung	Gravitasi	5,90	5,90
4	DW Pondok	Air Tanah	Desa Pondok, Kec Karanganom	Gravitasi	3,01	3,01
E IKK Delanggu						
1	MA Nila	Mata Air	Desa Daleman Kec. Tulung	Kombinasi	42,00	42,00
2	MA Wangen	Mata Air	Desa Wangen Kec Polanharjo	Gravitasi	18,00	18,00
F IKK Ceper						
1	MA Nila	Mata Air	Desa Daleman Kec. Tulung	Gravitasi	50,00	50,00
2	DW Ponggok	Air Tanah	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	48,61	48,61
3	MA Sigedang	Mata Air	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	31,70	31,70
G IKK Wedi						
1	MA Sendang Jagalan	Mata Air	Desa Jagalan Kec. Karangnongko	Gravitasi	15,70	15,70
H IKK Pedan						
1	MA Nila	Mata Air	Desa Daleman Kec. Tulung	Gravitasi	50,00	50,00
2	DW Ponggok	Air Tanah	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	48,61	48,61
3	MA Sigedang	Mata Air	Desa Ponggok, Kec	Gravitasi	31,70	31,70

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Sumber Air Baku	Jenis	Lokasi	Sistem Pengaliran Air	Kapasitas (l/detik)	Rata-rata debit (l/detik)
			Polanharjo			
I	IKK Cawas					
1	MA Nila	Mata Air	Desa Daleman Kec. Tulung	Gravitasi	97,90	97,90
2	DW Ponggok	Air Tanah	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	48,61	48,61
3	MA Sigidang	Mata Air	Desa Ponggok, Kec Polanharjo	Gravitasi	31,70	31,70
J	IKK Jatinom					
1	DW Krajan	Air Tanah	Desa Krajan Kec Jatinom	Pompa	11,99	11,99
K	IKK Gantiwarno					
1	MA Sendang Jagalan	Mata Air	Desa Jagalan Kec. Karangnongko	Gravitasi	15,70	15,70

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

Secara umum, jumlah kapasitas produksi dan distribusi Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten tidak sama. Hal ini dikarenakan, di beberapa IKK di Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten ada Instalasi Pengolahan Air sehingga diperlukan air untuk pengurusan instalasi.

Tabel 2.18 Unit Produksi SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten

No	Sumber Air Baku	Jam Operasi (Jam dlm setahun)	Kpa. Terpasang		Kap. Dimanfaatkan	
			l/dtk	m ³	l/dtk	m ³
A	IKK Prambanan					
1	DW I Kebondalem	2.535	10,00	315.360,00	10,00	315.360,00
2	DW II Taskombang	5.110	10,00	315.360,00	10,00	315.360,00
3	DW III Kokosan	3.117	10,00	315.360,00	10,00	315.360,00
B	IKK Karangnongko					
1	MA Sliling	8.760	8,00	28.887,17	8,00	28.887,17
C	IKK Kemalang					
1	MA Sliling	8.760	5,60	28.887,17	5,60	28.887,17
2	DW Warung Air	6.570	10,30	324.820,80	10,30	324.820,80
D	IKK Karanganom					
1	MA Ponggok	8.760	32,80	1.034.385,67	32,80	1.034.385,67
2	MA Jolotundo	8.760	8,40	264.904,83	8,40	264.904,83
3	MA Nila	8.760	5,90	3.087.376,83	5,90	3.087.376,83
4	DW Pondok	5.248	3,01	94.900,00	3,01	94.900,00
E	IKK Delanggu					
1	MA Nila	8.760	42,00	3.087.376,83	42,00	3.087.376,83
2	MA Wangen	8.760	18,00	567.648,00	18,00	567.648,00

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Sumber Air Baku	Jam Operasi (Jam dlm setahun)	Kpa. Terpasang		Kap. Dimanfaatkan	
			l/dtk	m³	l/dtk	m³
F	IKK Ceper					
1	MA Nila	8.760	50,00	3.087.376,83	50,00	3.087.376,83
2	DW Ponggok	8.760	48,61	1.533.000,00	48,61	1.533.000,00
3	MA Sigidang	8.760	31,70	999.686,33	31,70	999.686,33
G	IKK Wedi					
1	MA Sendang Jagalan	8.760	15,70	495.110,33	15,70	495.110,33
H	IKK Pedan					
1	MA Nila	8.760	50,00	3.087.376,83	50,00	3.087.376,83
2	DW Ponggok	8.760	48,61	1.533.000,00	48,61	1.533.000,00
3	MA Sigidang	8.760	31,70	999.686,33	31,70	999.686,33
I	IKK Cawas					
1	MA Nila	8.760	97,90	3.087.376,83	97,90	3.087.376,83
2	DW Ponggok	8.760	48,61	1.533.000,00	48,61	1.533.000,00
3	MA Sigidang	8.760	31,70	999.686,33	31,70	999.686,33
J	IKK Jatinom					
1	DW Krajan	3.156	11,99	378.140,00	11,99	378.140,00
K	IKK Gantiwarno					
1	MA Sendang Jagalan	8.760	15,70	495.110,33	15,70	495.110,33

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

Tabel 2.19 Unit Distribusi SPAM IKK Perumda Tirta Merapi Kabupaten Klaten

No	Sumber Air Baku	Vol. Produksi Real (m ³)	Kap. Menganggur (m ³)	Pemakaian Operasional (m ³)	Vol. Didistribusikan (m ³)
A	IKK Prambanan				
1	DW I Kebondalem	67.653	247.707	1.780	65.873
2	DW II Taskombang	173.088	142.272	9.805	163.283
3	DW III Kokosan	88.547	226.813	6.215	82.332
B	IKK Karangnongko				
1	MA Sliling	411.229	17.658	240.174	171.055
C	IKK Kemalang				
1	MA Sliling	411.229	17.658	240.174	171.055
2	DW Warung Air	323.951	870	12.083	311.868
D	IKK Karanganom				
1	MA Ponggok	1.008.927	25.459	83.943	924.984
2	MA Jolotundo	257.060	7.845	112.921	144.139
3	MA Nila	2.961.510	125.867	2.433.320	528.190
4	DW Pondok	56.877	38.023	-	56.877
E	IKK Delanggu				
1	MA Nila	2.961.510	125.867	2.433.320	528.190
2	MA Wangen	565.390	2.258	-	565.390
F	IKK Ceper				
1	MA Nila	2.961.510	125.867	2.433.320	528.190
2	DW Ponggok	1.511.174	21.826	-	1.511.174

LAPORAN AKHIR

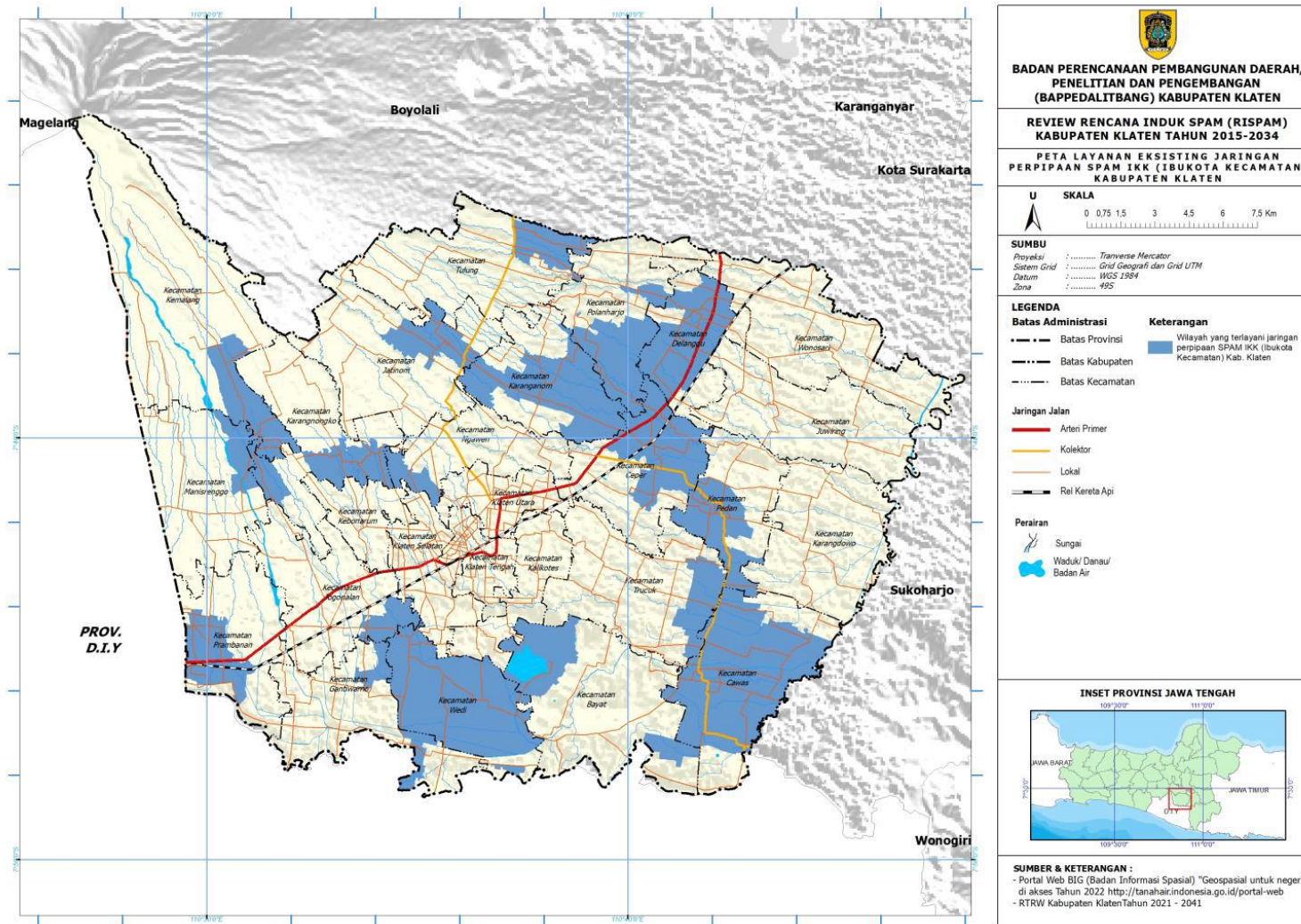
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Sumber Air Baku	Vol. Produksi Real (m ³)	Kap. Menganggur (m ³)	Pemakaian Operasional (m ³)	Vol. Didistribusikan (m ³)
3	MA Sigedang	984.178	15.508	-	984.178
G	IKK Wedi				
1	MA Sendang Jagalan	493.544	1.566	-	493.544
H	IKK Pedan				
1	MA Nila	2.961.510	125.867	2.433.320	528.190
2	DW Ponggok	1.511.174	21.826	-	1.511.174
3	MA Sigedang	984.178	15.508	-	984.178
I	IKK Cawas				
1	MA Nila	2.961.510	125.867	2.433.320	528.190
2	DW Ponggok	1.511.174	21.826	-	1.511.174
3	MA Sigedang	984.178	15.508	-	984.178
J	IKK Jatinom				
1	DW Krajan	136.245	241.895	12.625	123.620
K	IKK Gantiwarno				
1	MA Sendang Jagalan	493.544	1.566	-	493.544

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



Gambar 2.9 Peta Layanan Eksisting jaringan Perpipaan SPAM IKK Kabupaten Klaten
Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037

B. PAMSIMAS

Melalui Program Pamsimas pengelola SPAM adalah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS). KP-SPAMS yang memiliki wadah/ kelembagaan tingkat kabupaten yaitu Asosiasi Pengelola SPAMS (APSPAMS). Sampai akhir tahun 2024, jumlah lokasi desa Pamsimas yaitu 170 desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.20 Desa Sasaran Pamsimas di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Desa	Tipe Desa	Tahun	Sumber Air
	Prambanan	Sengon	Reguler	2014	Sb
		Cucukan	Reguler	2013	Sb
		Kotesan	Reguler	2014	Sb
		Pereng	Reguler	2013	Sb
		Sanggrahan	Reguler & Hid	2009/2013	Sb, Sb
		Brajan	Reguler	2014	Sb
		Kebondalem Kidul	Reguler	2018	Sb
		Geneng	Reguler	2018	Sb
		Kemudo	APBD	2022	
	Gantiwarno	Ngandong	Reguler & Hid	2011 & 2014	Sb
		Sawit	Reguler	2014	Sb
		Muruh	Reguler	2017	Sb
		Katekan	Reguler	2018	Sb
		Jogoprayan	Reguler	2018	Sb
		Kerten	Reguler	2018	Sb
		Kragilan	Reguler	2018	Sb
		Baturan	Reguler	2018	Sb
		Mutihan	Reguler	2018	Sb
		Gesikan	Reguler	2019	Sb
		Mlese	Reguler	2019	Sb
		Jabung	Reguler	2019	Sb
		Gentan	Reguler	2019	Sb
		Karangturi	BKK APBD	2023	
		Ngerangan	Regulerrr	2009	Sgl
	Bayat	Jambakan	Reguler & Hid	2011 & 2013	Sgl, Sb
		Dukuh	Reguler	2008	Sgl
		Jarum	Reguler	2009	Sgl
		Bogem	Reguler	2009	Sgl
		Paseban	Reguler & Hid	2012 & 2014	Sb
		Krikilan	Reguler & Hid	2008 & 2013	Sgl, Sb
		Gununggajah	Reguler	2009	Sgl
		Talang	Reguler	2010	Sb
		Tawangrejo	Reguler & Hid	2009 & 2014	Sb, Sb
		Kebon	Reguler & Hid	2010 & 2013	Sgl, Sb
		Jotangan	Reguler & Hid	2011 & 2013	Sb, Sb
		Krakitan	Reguler & Hid	2011 & 2013	Sgl, Sb

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Kecamatan	Desa	Tipe Desa	Tahun	Sumber Air
		Wiro	Replikasi & Hid	2011 & 2014	Sb, Sb
		Tegalrejo	Reguler	2017	Sb
		Nenggahan	Reguler	2017	Sb
		Beluk	Reguler	2017	Sb
	Wedi	Jiwo Wetan	Regulerrr	2012	Sb
		Kaligayam	Reguler	2018	Sb
	Cawas	Karangasem	Reguler	2009	Sb
		Burikan	Reguler	2009	Sb
		Bawak	Reguler	2015	Sb
		Japanan	Reguler	2013	Sb
		Tlingsing	Reguler	2015	Sb
		Gombang	Reguler	2009	Sb
		Bogor	Reguler	2012	Sb
		Pogung	Reguler	2010	Sb
		Tirtomarto	Reguler	2017	Sb
	Trucuk	Wanglu	Reguler	2012	Sb
		Trucuk	Reguler	2009	Sb
		Kalikebo	Reguler & Hid	2009 & 2012	Sb
		Gaden	Reguler & Hid	2008 & 2014	Sgl, Sb
		Planggu	Reguler & Hid	2010 & 2012	Sb, Sb
		Karangpakel	Reguler	2011	Sb
	Jogonalan	Tambakan	Reguler	2015	Sb
		Somopuro	Reguler	2017	Sb
		Joton	Reguler	2019	Sb
		Granting	Reguler	2019	Sb
		Prawatan	Grant TF OA 6336	2022	
		Tangkisan Pos	Grant TF OA 6336	2022	
	Manisrenggo	Sukorini	Reguler	2015	Sb
		Ngemplak Seneng	Reguler	2013	Sb
		Sapen	Reguler	2015	Sb
		Kecemen	Reguler	2018	Sb
		Solodiran	Reguler	2018	Sb
		Kebonallas	Reguler	2020	Sb
		Tijayan	Reguler	2020	Sb
		Kranggan	Reguler	2021	
		Tanjungsari	Reguler	2021	
		Taskombang	Reguler	2021	
		Barukan	Grant TF OA 6336	2022	
		Bendan	APBD	2022	
	Karangnongko	Kadilajo	Reguler	2015	Ma
		Kanoman	Reguler	2013	Sb
		Gemampir	Reguler	2008	Sb
		Jiwan	Reguler & Hid	2010 & 2013	Sb
		Logede	Reguler	2010	Sb
		Ngemplak	Reguler & Hid	2010 & 2013	Sb
		Somokaton	Reguler	2018	Sb

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Kecamatan	Desa	Tipe Desa	Tahun	Sumber Air
		Banyuaeng	Reguler	2019	Sb
		Gumul	Reguler	2019	Ma
		Jetis	Reguler	2020	Sb
	Pedan	Temuwangi	Replikasi	2013	Sb
		Kalangan	Replikasi	2014	Sb
		Troketon	Replikasi	2014	Sb
		Kaligawe	Reguler	2018	Sb
		Kedungan	Reguler	2021	Ma
	Karangdowo	Tulas	Reguler	2012	Sb
		Bulusan	Reguler	2011	Sb
		Ringinputih	Reguler & Hid	2008 & 2012	Sb, Sb
		Soka	Reguler	2009	Sb
		Tumpukan	Reguler & Hid	2009 & 2014	Sb, Sb
		Karangjoho	Reguler & Hid	2009 & 2011	Sb, Sb
		Demangan	Reguler	2008	Sb
		Tambak	Reguler	2012	Sb
		Munggung	Reguler	2012	Sb
		Sentono	Reguler	2012	Sb
		Karangwungu	Reguler & Hid	2013 & 2015	Sb
		Babadan	Reguler & Hid	2013 & 2015	Sb
		Kupang	Reguler	2013	Sb
	Juwiring	Gondangsari	Reguler	2013	Sb
		Mrisen	Reguler	2019	Sb
		Carikan	APBN Reguler	2022	Sb
		Jetis	APBN Reguler	2022	Sb
		Bulurejo	APBN Reguler	2022	Sb
		Mrisen	APBN Reguler	2022	Sb
		Trasan	BKK APBD	2023	Sb
	Wonosari	Sidowarno	Reguler	2012	Sb
		Bolali	Reguler	2020	Sb
	Polanharjo	Ngaran	Reguler	2013	Ma
		Nganjat	Reguler	2012	Ma
		Jimus	Reguler	2013	Ma
		Polan	Reguler	2012	Sb
		Karanglo	Reguler	2013	Ma
		Keprabon	Reguler	2012	Sb
		Kebonharjo	Reguler & Hid	2012 & 2015	Sb
		Janti	Reguler	2013	Ma
		Sidowayah	Reguler	2012	Ma
		Sidoharjo	Reguler	2013	Ma
		Turus	Reguler	2018	Ma
		Kranggan	Reguler	2020	Ma
	Karanganom	Gleddeg	Reguler	2015	Sb
		Jeblog	Reguler	2015	Sb
		Gempol	Reguler	2018	Ma
	Tulung	Sedayu	Reguler	2011	Sb
		Pomah	Reguler	2010	Sb
		Bono	Reguler	2009	Sb
		Dalangan	Reguler & Hid	2011 & 2013	Ma
		Gedongjetis	Reguler	2014	Ma

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Kecamatan	Desa	Tipe Desa	Tahun	Sumber Air
		Kemiri	Reguler	2017	Sb
		Mundu	BKK APBD	2024	Sb
	Jatinom	Beteng	Reguler & Hid	2010 & 2014	Sb
		Randulanang	Reguler & Hid	2009&2011	Sb
		Mranggen	Reguler & Hid	2013 & 2015	Sb
		Tibayan	Reguler & Hid	2012 & 2014	Sb
		Bengking	Reguler & Hid	2010& 2014	Sb
		Temuireng	Reguler	2010	Sb
		Bandungan	Reguler	2010	Sb
		Kayumas	Reguler & Hid	2010 & 2014	Sb
		Socokangsi	Reguler	2008	Sgl
		Glagah	Reguler	2008	Sgl
		Cawan	Reguler	2017	Ma
		Pandeyan	Reguler	2017	Sb
		Puluhan	Reguler	2018	Ma
	Kemalang	Bawukan	Reguler & Hid	2011 & 2015	Sb
		Talun	Reguler	2012	Sb
		Panggung	Reguler	2011	Sb
		Tegalmulyo	Reguler	2011	Sb
		Tangkil	Reguler & Hid	2011 & 2013	Sb
		Bumiharjo	Reguler	2011	Sb
		Kendalsari	Reguler	2008	Sb
		Tlogowatu	Reguler	2018	Sb
		Sidorejo	Reguler	2018	Ma
		Balerante	Reguler	2018	Ma
	Kalikotes	Jimbung	Reguler & Hid	2012 & 2014	Ma
	Kebonarum	Malangjiwan	Reguler	2017	Ma
		Pluneng	Reguler	2017	Ma
		Ngrundul	Reguler	2018	Ma
		Karangduren	Reguler	2019	Sb
		Menden	Reguler	2021	Sb
		Gondang	Reguler	2021	Ma
	Klaten Selatan	Malangjiwan	Reguler	2017	Ma
	Ceper	Jombor	Reguler	2019	Sb
		Pasungan	Reguler	2019	Sb
		Srebegan	APBD	2022	Sb
	Ngawen	Kahuman	Grant TF OA 6336	2022	Sb
	Delanggu	Tlobong	APBN Reguler	2022	Sb

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten Tahun 2024, diolah

Adapun kinerja SPAM Lembaga KP-SPAMS secara teknis ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Kinerja Teknis KP-SPAMS di Kabupaten Klaten

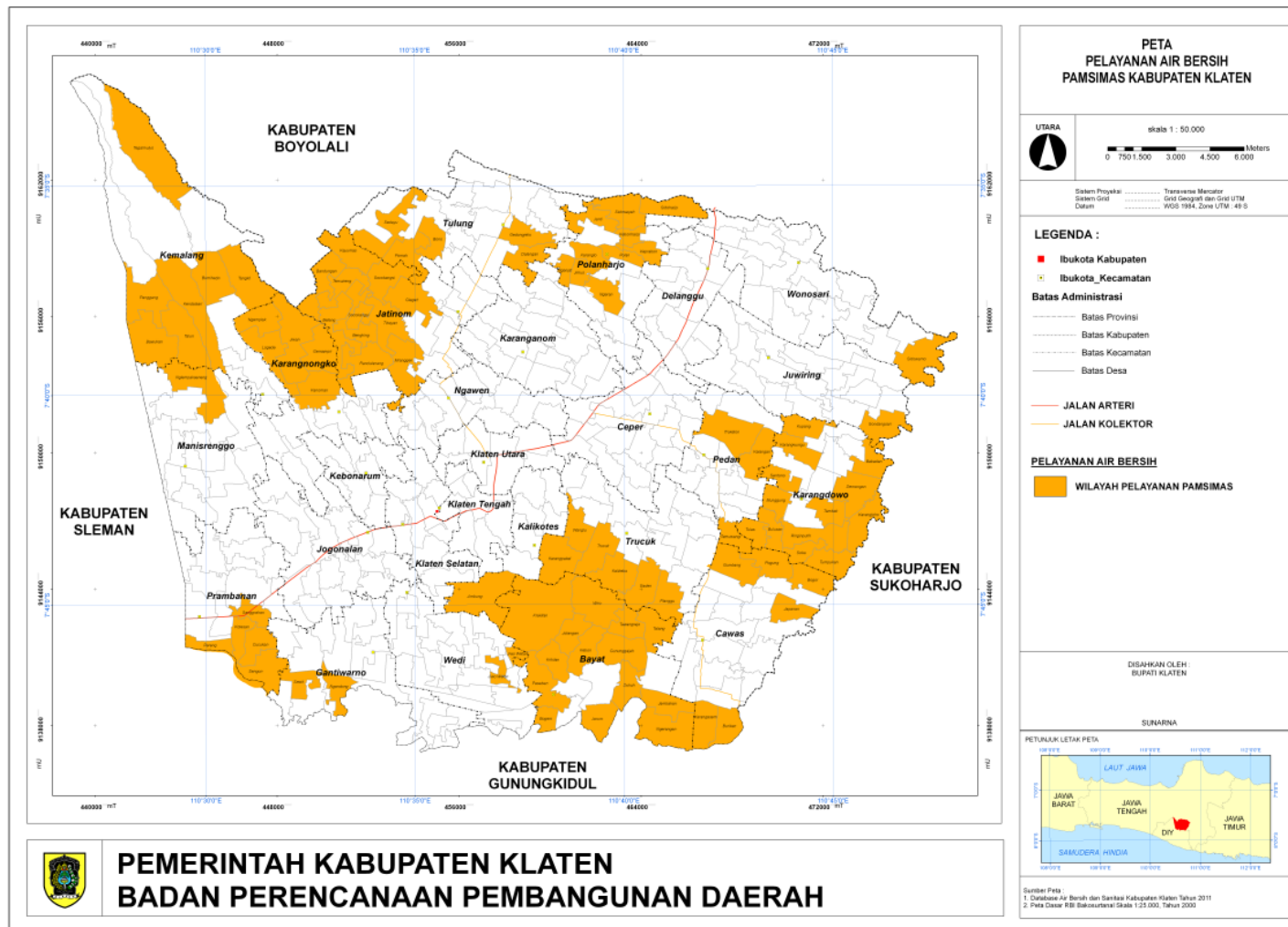
No	Uraian		Jumlah
1	Biaya Operasional dan Pemeliharaan per Bulan	BOP < 1 Jt	51

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Uraian		Jumlah
		BOP 1-2,5 Jt	74
		BOP 2,5-5 Jt	25
		BOP > 5 Jt	5
2	Jam Operasional SPAM per hari	< 6 jam	7
		6 – 12 jam	38
		12 – 18 jam	21
		>18 jam	89
3	Sambungan Rumah	Dengan meter air	47.063
		Tanpa meter air	373
4	Kondisi SPAM	Tidak berfungsi	6
		Berfungsi sebagian	2
		Berfungsi baik	147
		Tidak ada data	0

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah



Gambar 2.10 Peta Layanan Air Bersih Pamsimas Kabupaten Klaten
 Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten Tahun 2024

2.2.2 Sanitasi

2.2.2.1 Jaringan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) sistem yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal.

Beberapa desa sudah telayani dengan sistem IPAL komunal, MCK, septik tank individu maupun jamban bersama, namun demikian sarana dan prasarana pengelolaan masih terbatas pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Kabupaten Klaten sudah terdapat 89 IPAL komunal dengan kapasitas pelayanan untuk 4.268 Kepala Keluarga. Selain itu juga terdapat 5 MCK dan 1 IPLT. Untuk pengelolaan lumpur tinja atau IPLT yang berlokasi di Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah masih belum optimal dikarenakan kondisi instalasi yang sudah tidak bekerja secara normal dan armada serta kru pengangkutan lumpur tinja yang minim. Selain itu masyarakat cenderung mengandalkan pembuangan melalui resapan tanah maupun ke IPLT kota Lain melalui jasa penyedot tinja khususnya wilayah yang berbatasan langsung yaitu Kota Surakarta dan Yogyakarta. Sistem sanitasi air limbah domestik di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Tabel 2.22 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Klaten

No	Pengguna	Sistem Pengelolaan Setempat	Sistem Pengangkutan/ Pengumpulan	Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja/ Pengelolaan Terpusat	Lingkungan
1	WC Helikopter	---	---	---	Sungai
2	WC Duduk/ Jongkok	---	---	---	Sungai
3	Jamban Cemplung	Cubluk	---	---	Tanah
4	Jamban Leher Angsa	Cubluk	---	---	Tanah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Pengguna	Sistem Pengelolaan Setempat	Sistem Pengangkutan/ Pengumpulan	Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja/ Pengelolaan Terpusat	Lingkungan
5	WC Duduk/ Jongkok	Tangki Septik	---	---	Tanah
6	WC Duduk/ Jongkok	MCK	Truk Tinja	---	Sungai
7	WC Duduk/ Jongkok	Tangki Septik	Truk Tinja	IPLT Kota	Sungai
8	WC Duduk/ Jongkok	---	Perpipaan	MCK Komunal	Sungai
9	WC Duduk/ Jongkok	---	Perpipaan	IPAL Komunal	Sungai
10	WC Duduk/ Jongkok	---	Selokan	---	Sungai

Sumber: RISPAM Kabupaten Klaten 2023-2037, diolah

Berdasarkan diagram tersebut, Kabupaten Klaten terdapat 10 diagram sistem sanitasi yang dapat dijabarkan mulai dari input, ke penampungan (WC helicopter, WC Duduk/Jongkok, Jamban Cemplung, Jamban Leher Angsa), ke tangki septik, cubluk, MCK), yang kemudian di angkut melalui truk tinja, perpipaan. Ada juga yang langsung ke selokan, tanah maupun sungai. Adapun untuk pengolahan lumpur tinja ada yang ke IPLT Kota, MCK komunal maupun IPAL Komunal.

Tabel 2.23 Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Klaten

No	Sistem	Jumlah
1	IPAL Komunal	89
2	MCK	5
3	IPLT	1
Jumlah		93

Sumber: DPUPR Klaten, 2024

Kemudian berdasarkan capaian akses air limbah domestik yang termuat pada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Klaten Tahun 2023-2027, wilayah perkotaan untuk akses aman air limbah sebesar 1,21%. Sedangkan untuk akses layak individu sebesar 56%. Wilayah perdesaan untuk akses aman air limbah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

sebesar 0,19%. Sedangkan akses layak individu sebesar 28,60%. Secara rinci capaian akses air limbah domestik di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.24 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Persentase (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Akses aman	1,21%
2	Akses layak (tidak termasuk akses aman)	
	a. Akses layak individu (tidak termasuk aman)	56%
	b. Akses layak bersama	9,30%
3	Akses belum layak	0,10%
4	BABS di tempat tertutup	0,00%
5	BABS di tempat terbuka	0,00%
Wilayah Perdesaan		
1	Akses aman	0,19%
2	Akses layak (tidak termasuk akses aman)	
	a. Akses layak individu (tidak termasuk aman)	28,60%
	b. Akses layak bersama	4,20%
	c. Akses layak khusus perdesaan (leher angsa - cubluk)	0,00%
3	Akses belum layak	0,40%
4	BABS di tempat tertutup	0,00%
5	BABS di tempat terbuka	0,00%
Jumlah		100,00%

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037, diolah

Tabel 2.25 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	2
2	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
3	Kapasitas truk tinja/ motor/ kedoteng	m3	2
4	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	4.000
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	1-2
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	1-2
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	unit	-
2	Status aset	m3	-
3	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	-
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037, diolah

Tabel 2.26 Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD- Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Jomboran	
2	Status aset	sudah	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	28,3
4	Tahun Pembangunan	1996	
5	Tahun Rehabilitasi	0	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	401	
7	Wilayah layanan terdekat	km	23,60
8	Wilayah layanan terjauh	km	28,10
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Ada dengan menggunakan bak penampung	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	1	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Baik	

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037, diolah

Berdasarkan dokumen SKK Kabupaten Klaten 2023-2037, hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat (*on site sanitation*) baik secara komunal maupun individu. Untuk beberapa desa di Kabupaten Klaten telah menerapkan pengelolaan air limbah domestik dengan IPAL komunal untuk *grey water* dan *black water*. Sedangkan untuk limbah lumpur tinja ditampung di dalam tangki septic tank atau cubluk yang penguraiannya terjadi secara alamiah dan buatan dengan menggunakan cairan yang dibuang ke bidang tanah atau dengan melakukan penyedotan yang kemudian dibuang di IPLT Jomboran. Berikut beberapa data jumlah SR Tangki Septik Individu, IPAL Komunal, dan MCK yang terdapat di Kabupaten Klaten.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Tabel 2.27 Jumlah SR Tangki Septik Individu, IPAL Komunal, MCK di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2023

Sumber Dana	DATA JUMLAH SR				
	Tahun	Tangki Septik Individu	IPAL komunal	MCK	Total
DAK SLBM	2010	0	0	120	120
DAK SLBM	2011	0	140	40	180
DAK SLBM	2012	0	195	0	195
USRI	2012	0	211	56	267
USRI	2013	0	370	0	370
DAK	2013	0	270	0	270
USRI	2014	0	250	0	250
DAK	2014	0	230	0	230
DAK SLBM	2015	0	280	0	280
SANIMAS	2015	0	135	0	135
DAK SLBM	2016	0	470	0	470
KOTAKU	2017	0	44	0	44
DAK	2018	0	247	0	247
DAK dan KOTAKU	2019	0	608	0	608
SANDES	2020	412	0	0	412
DAK dan SANDES	2021	236	246	0	482
DAK dan SANIMAS	2022	0	345	0	345
	2023	928	172	0	1.100
Jumlah		1.576	4.213	216	6.005

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2024

Tabel 2.28 Daftar IPAL Komunal dan MCK Kabupaten Klaten Tahun 2010-2023

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGGUNA (SR)	Nama KSM
DAK SLBM 2010					
1	Jomboran	Klaten tengah	MCK	40	Karya Mulya
2	Tegalyoso	Klaten Selatan	MCK	40	Mugi Lestari
3	Sekarsuli	Klaten Utara	MCK	40	Bina Sejahtera
				120	
DAK SLBM 2011					
1	Jebugan	Klaten Utara	mck +	40	Nusa Indah
2	Keden	Pedan	Ipal komunal	50	Guyup Rukun
3	Krajan	Jatinom	Ipal komunal	50	Bersinar
4	Semangkak	Klaten Tengah	Ipal komunal+mix	40	Sumber Makmur
DAK SLBM 2012					

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGGUNA (SR)	Nama KSM
1	Bonyokan	Jatinom	Ipal komunal	50	Ngudi Waras
2	Krecek	Delanggu	Ipal komunal+mix	35	Bagas Waras
3	Sengon	Prambanan	Ipal komunal	60	Guyup Rukun
4	Manyungan	Ngawen	Ipal komunal	50	Bina Sehat
USRI 2012					
1	Kabupaten	Klaten Tengah	Ipal Komunal	56	Mitra Sejahtera
2	Mojayan	Klaten Tengah	Ipal komunal +mix	50	Parikesit
3	Bareng	Klaten Tengah	Ipal komunal +mix	53	Bina Mandiri
4	Bareng lor	Klaten Utara	MCK ++	56	
5	Gergunung	Klaten Utara	Ipal komunal +mix	52	Maju Mapan
USRI 2013					
1	Gayamprit	Klaten selatan	Ipal Komunal	60	Flumeria
2	Karanglo	Klaten selatan	Ipal komunal +mix	60	Berkah
3	Trunuh	Klaten selatan	Ipal komunal	50	Balong
4	Jonggrangan	Klaten Utara	Ipal komunal	40	Bina Warga
5	Gumulan	Klaten Tengah	Ipal komunal + mix	40	Trisakti
6	Karanganom	Klaten Utara	Ipal komunal	50	Mitra Mandiri
7	Belangwetan	Klaten Utara	Ipal komunal	70	Guyup
				370	
DAK 2013					
1	Ngerangan	Bayat	Ipal komunal+mix	70	Bagas Waras
2	Pakisan	Cawas	Ipal komunal	70	Ngudi Waras
3	Kalitengah	Wedi	Ipal komunal	65	Golek Rukun
4	Karanglo	Polanharjo	Ipal komunal	65	Berkah
				270	
USRI 2014					
1	Buntalan	Klaten Tengah	Ipal komunal	50	Sehat Ceria
2	Manjung	Ngawen	Ipal komunal	50	Sekar Tanjung
3	Drono	Ngawen	Ipal komunal	50	Rukun
4	Sumberejo	Klaten Selatan	Ipal komunal	50	Tirtasari
5	Nglinggi	Klaten Selatan	Ipal komunal+mix	50	Ngudi Sehat
				250	
DAK 2014					
1	Kapungan	Polanharjo	Ipal komunal	60	Gawe Resik
2	Delanggu	Delanggu	Ipal komunal	60	Sehat

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGGUNA (SR)	Nama KSM
3	Kotesan	Prambanan	Ipal komunal	60	Gayuh Rukun
4	Jebugan	Klaten utara	Ipal komunal	50	Ngudi Raharjo
				230	
DAK SLBM 2015					
1	Malangjiwan	Kebonarum	Ipal Komunal	70	Mulyo Widodo
2	Bugisan	Prambanan	Ipal Komunal	70	Beriman
3	Ceporan	Gantiwarno	Ipal Komunal	70	Mekar Agung
4	Tambakan	Jogonalan	Ipal Komunal	70	Tirto Ngumpul
SANIMAS 2015					
1	Ngering	Jogonalan	Ipal Komunal	65	
2	Ngrundul	Kebonarum	Ipal Komunal	70	
DAK SLBM 2016					
1	Nglinggi	Klaten Selatan	Ipal Komunal	80	Kompen Sehat
2	Klepu	Karanganom	Ipal Komunal	60	Marsudi Waras
3	Jurangjero	Karanganom	Ipal Komunal	60	Tegal Sehat
4	Sidowayah	Polanhajo	Ipal Komunal	60	Iklas
5	Lemahireng	Pedan	Ipal Komunal	80	Gebang Makmur
6	Kalikebo	Trucuk	Ipal Komunal	70	Maheso Krido
7	Paseban	Bayat	Ipal Komunal	60	Paseban Manunggal
				470	
KOTAKU 2017					
1	Kabupaten	Klaten Tengah	Ipal Komunal	44	Blateran Indah
DAK 2018					
1	Malangjiwan	Kebonarum	Ipal Komunal	59	Bejo Mulyo
2	Pluneng	Kebonarum	Ipal Komunal	62	Turta Husada
3	Nglinggi	Klaten Selatan	Ipal Komunal	66	Ngudi Resik
4	Cucukan	Prambanan	Ipal Komunal	60	Gedhong Sehat
				247	
DAK 2019					
1	Buntalan	Klaten Tengah	Ipal Komunal	52	Bendo Tentrem
2	Paseban	Bayat	Ipal Komunal	52	Limbah Leno
3	Bolali	Wonosari	Ipal Komunal	61	Krasak Manunggal
4	Karanglo	Polanharjo	Ipal Komunal	56	Maju Lancar

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGUNA (SR)	Nama KSM
5	Wanglu	Trucuk	Ipal Komunal	64	Sendang Panguripan
6	Pundungan	Juwiring	Ipal Komunal	57	Demangan Asri
7	Kaligawe	Pedan	Ipal Komunal	61	Sidomulyo
				403	
KOTAKU 2019					
1	Jetis RT001-RW002	Klaten Selatan	Ipal komunal	7	Sido Makmur
	Jetis RT001-RW008	Klaten Selatan	Ipal komunal	13	Sido Makmur
	Jetis RT001-RW010	Klaten Selatan	Ipal komunal	9	Sido Makmur
2	Tegalyoso RT001-RW001	Klaten Selatan	Ipal komunal	10	Anggur
	Tegalyoso RT010-RW004	Klaten Selatan	Ipal komunal	7	Anggur
3	Merbung RT001-RW002	Klaten Selatan	Ipal komunal	9	Mawar
	Merbung RT002-RW007	Klaten Selatan	Ipal komunal	9	Mawar
	Merbung RT002-RW007	Klaten Selatan	Ipal komunal	14	Mawar
4	Belang Wetan RT001-RW006	Klaten Utara	Ipal komunal	8	Bersatu
	Belang Wetan RT002-RW006	Klaten Utara	Ipal komunal	14	Bersatu
	Belang Wetan RT001-RW011	Klaten Utara	Ipal komunal	22	Bersatu
5	Sabrang RT02-RW02	Delanggu	Ipal komunal	9	LANCAR
	Sabrang RT02-RW02	Delanggu	Ipal komunal	8	LANCAR
	Sabrang RT01-RW06	Delanggu	Ipal komunal	8	LANCAR
	Sabrang RT01-RW06	Delanggu	Ipal komunal	7	LANCAR
	Sabrang RT04-RW06	Delanggu	Ipal komunal	6	LANCAR
	Sabrang RT04-RW06	Delanggu	Ipal komunal	6	LANCAR
6	Gayamprit RW07	Klaten Selatan	Ipal komunal	7	GUYUP RUKUN
	Gayamprit RW08	Klaten Selatan	Ipal komunal	7	GUYUP RUKUN
7	Bareng RW08	Klaten Tengah	Ipal komunal	25	ROMADHAN
				205	
SANDES 2020					

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGUNA (SR)	Nama KSM
1	Segaran	Delanggu	Tangki Septik dan Bilik	44	Ngudi Resik
2	Krajan	Jatinom	Septik Tank Individual	42	Dadi Mulyo
3	Kwarasan	Juwiring	Septik Tank Individual	40	Bagas Waras
4	Gemblegan	Kalikotes	Septik Tank Individual	36	Gemblegan Maju
5	Bulusan	Karangdowo	Septik Tank Individual	36	Gemilang
6	Tijayan	Manisrenggo	Septik Tank Individual	41	Jaya Karya
7	Sidowayah	Polanharjo	Septik Tank Individual	51	Sidowayah Harmonis
8	Sedayu	Tulung	Septik Tank Individual	52	Karya Makmur
9	Tegalgondo	Wonosari	Septik Tank Individual	35	Madyo Utomo
10	Wadung Getas	Wonosari	Septik Tank Individual	35	Sumber Makmur
				412	
DAK 2021					
1	Pluneng	Kebonarum	Ipal Komunal	64	Tresna Sesami
2	Karanglo	Polanharjo	Ipal Komunal	54	Plumbon Sehat
3	Pundungan	Juwiring	Ipal Komunal	67	Kembang Tresno
4	Mrisen	Juwiring	Ipal Komunal	61	Sinar Sehat
				246	
SANDES 2021					
1	Kerten	Gantiwarno	Tangki Septik Individu	48 unit	
2	Mlese	Gantiwarno	Tangki Septik Individu	47 unit	
3	Mutihan	Gantiwarno	Tangki Septik Individu	47 unit	
4	Towangsan	Gantiwarno	Tangki Septik Individu	47 unit	
5	Sukorejo	Wedi	Tangki Septik Individu	47 unit	
				236	
DAK 2022					
1	Bolali	Wonosari	Ipal Komunal	50	Sutran Sehat
2	Bentangan	Wonosari	Ipal Komunal	57	Bantala Amanah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

NO	DESA	KEC	JENIS KONSTRUKSI	PENGGUNA (SR)	Nama KSM
3	Sumyang	Jogonalan	Ipal Komunal	61	Sumyang Sehat
4	Tambongwetan	Kalikotes	Ipal Komunal	60	Sumber Mulyo
				228	
SANIMAS 2022					
1	Carikan	Juwiring	Ipal Komunal	54	Ngudi Luhur
2	Mrisen	Juwiring	Ipal Komunal	63	Cakra Mas
				117	
DAK 2023					
1	Gemblegan	Kalikotes	Ipal Komunal		Bersatu
2	Kahuman	Polanharjo	Ipal Komunal		Karya Mandiri
3	Pundungan	Juwiring	Ipal Komunal		Pundungan Sehat

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2024

Sementara itu, persentase capaian akses aman air limbah di Kabupaten Klaten tahun 2022 adalah sebesar 1,4% dan persentase target Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar 2,0%, sehingga mempunyai gap terhadap target sebesar 0,6% artinya untuk dapat memperkecil gap tersebut perlu diupayakan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan akses aman limbah, baik berupa regulasi/kebijakan, maupun program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian akses aman yang lebih baik lagi. Demikian pula dengan akses layak, meskipun gap antara capaian tahun 2022 sebesar 1,4% dengan target capaian 2024 sebesar 2,0% yang menghasilkan angka gap sebesar 0,6% masih dapat ditingkatkan melalui pemenuhan akses layak agar dapat mencapai angka 100%. Secara rinci persentase capaian akses aman air limbah di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.29 Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Kabupaten	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten Klaten	Capaian (%) Tahun:2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Prov. Jawa Tengah	Kab. Klaten				
1	Akses aman	15%	20,0%	2,0%	2,0%	1,4%	0,6%	0,6%
2	Akses layak	90%	95,0%	100,0%	100,0%	99,5%	0,5%	0,5%
	Akses layak individu (tidak termasuk aman)	0%*	0%**	85,0%	85,0%	84,6%	0,4%	0,4%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	14,0%	14,0%	13,5%	0,5%	0,5%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	-1,0%	-1,0%	0,0%	-1,0%	-1,0%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	-0,5%	-0,5%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037

2.2.2.2 Jaringan Persampahan

Jaringan persampahan di Kabupaten Klaten di beberapa wilayah sudah terlayani pengangkutan sampah. Namun masih banyak wilayah yang belum terlayani pengangkutan sehingga beberapa diantaranya membuang sampah ke sungai, tegalan dan dibakar. Di Kabupaten Klaten sudah terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu TPA Troketon di Kecamatan Pedan dengan luas 7,5 ha. Pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten di beberapa lokasi sudah ada baik berupa bank sampah maupun TPS 3R. Sebaran pengelolaan sampah dengan bank sampah dan TPS 3R di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.30 Ketersediaan Sarana Persampahan di Kabupaten Klaten

No	Sistem	Jumlah
1	TPA	1
2	TPS	288
3	Bank Sampah Induk	1
	Bank Sampah Unit sengkang di bangun LH	23
	Bank Sampah Unit sengkang di bangun mandiri	39
4	TPS3R	38
5	Rumah Kompos	2
6	Armada	39

Sumber: DLH Kabupaten Klaten Tahun 2024, diolah

Sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Kabupaten Klaten berjumlah 288 unit yang melayani seluruh kecamatan. Pelayanan TPS di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.31 Jumlah TPS Tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah (unit)
1	Bayat	7
2	Cawas	3
3	Ceper	28
4	Delanggu	19
5	Gantiwarno	10
6	Jatinom	5
7	Jogonalan	12
8	Juwiring	7
9	Kalikotes	18
10	Karanganom	9
11	Karangdowo	3
12	Karangnongko	2
13	Kebonarum	2

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah (unit)
14	Kemalang	3
15	Klaten Selatan	31
16	Klaten Tengah	27
17	Klaten Utara	31
18	Manisrenggo	1
19	Ngawen	7
20	Pedan	9
21	Polahrejo	5
22	Prambanan	15
23	Trucuk	15
24	Tulung	10
25	Wedi	6
26	Wonosari	3
Jumlah		288

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023



Gambar 2.11 TPS Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Pengelolaan persampahan di Kabupaten juga dilakukan menggunakan sistem *biogester*, budidaya maggot, dan program adiwiyata. Biogester adalah sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik, sehingga terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit

listrik, juga menjalankan mesin. Jumlah biodigester di Kabupaten Klaten sebanyak 1 unit.

Pengolahan sampah menggunakan budidaya maggot yaitu memanfaatkan lalat BSF (*Hermetia Illucens*) yaitu sejenis lalat berwarna hitam yang larvanya (maggot) mampu mendegradasi sampah organik. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam (BSF) sangat aktif memakan sampah organik. Salah satu pengolahan sampah di Kabupaten Klaten yaitu budidaya maggot. Setiap 1 gram telur memerlukan sampah organik sebesar 1 kg/hari dan menghasilkan sekitar 3 kg maggot. Proses dari telur menjadi maggot memerlukan waktu selama 15–20 hari, sehingga membutuhkan sampah organik sebanyak 15–20 kg. Keberadaan budidaya maggot ini dapat meningkatkan produktivitas untuk ternak ayam, itik, lele dan sebagainya. Jumlah pembudidaya maggot di Kabupaten Klaten yaitu 40 orang.



Tabel 2.32 Kegiatan Budidaya Maggot di Desa Jambukulon Ceper

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Sementara itu, program adiwiyata merupakan program sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Jumlah sekolah adiwiyata di Kabupten Klaten sebanyak 59 sekolah.

Berdasarkan dokumen Jakstrada Tahun 2023, timbunan sampah per kapita (sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga) di Kabupaten adalah 0,503 kg/orang/hari. Komposisi sampah di Kabupaten Klaten tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.33 Komposisi Sampah Kabupaten Klaten

No	Jenis Sampah	Kg/hari	Persentase (%)
1	Organik Kompos	193,36	67,41
2	Organik Non Kompos	10,97	3,82
3	Plastik Keras	13,46	4,69
4	Kertas	30,00	10,46
5	Kain	1,20	0,42
6	Plastik Fleksibel	29,72	10,36
7	Kaleng	1,07	0,37
8	Karet	0,23	0,08
9	Besi	0,30	0,10
10	Kaca	1,86	0,65
11	B3	2,42	0,84
12	Lain-lain	2,26	0,79
Jumlah		286,82	100,00

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Pengangkutan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan melalui pengangkutan langsung dan pengangkutan tak langsung. Pengangkutan langsung yaitu armada pengangkut sampah langsung mengangkut dari sumber-sumber sampah hingga penuh kemudian membawanya ke TPA tanpa melalui TPS. Armada pengangkut sampah dari *pool* (*Workshop*) ke sumber sampah pertama untuk mengambil sampah, selanjutnya mengambil sampah pada sumber-sumber berikutnya sampai kendaraan penuh sesuai kapasitasnya kemudian diangkut ke TPA. Sumber sampah untuk pola ini adalah sampah jalan, rumah, kantor, dan toko di sepanjang jalan protokol atau jalan kolektor. Waktu operasional pengangkutan dilakukan satu kali ritasi yaitu pukul 7.00 sampai dengan 12.30 WIB untuk jalan protokol Kota Klaten perkantoran dan tempat komersial.

Sementara itu, pengangkutan tak langsung yaitu dari *pool* kendaraan (*Workshop*) truk menuju TPS-TPS untuk mengangkut sampah ke TPA. Setelah aktivitas bongkar muat sampah di TPA selesai, truk kembali ke *pool* kendaraan. Sarana pengangkutan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah *dump*

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

truck, armroll truck, dan pick up. Pengangkutan ini dilakukan 1-2 kali ritasi tiap hari dengan waktu pengambilan jam 07.00 hingga 13.00 WIB. Pengangkutan ini berlaku untuk perumahan/ permukiman dan pasar.

Jumlah sarana pengangkutan yang beroperasi setiap hari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34 Sarana Pengangkutan di Kabupaten Klaten

Keterangan	<i>Arm Roll Truck</i>	<i>Dump Truck</i>	<i>Pick Up Truk</i>
Jumlah (unit)	4	21	14
Volume (m3)	6	7	3
Ritasi/hari	2 kali/hari	1 kali/hari	1 kali/hari
Frekuensi/minggu	7	7	7
Lama Operasi/Ritasi	1-2 jam	3-4 jam	2-3 jam

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023



Gambar 2.12 Armada Pengangkut Sampah di Kabupaten Klaten

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Pada pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA adalah menggunakan metode penimbunan. Metode ini dilakukan dengan penggalian dan pengurugan tanah terkendali atau *controlled landfill*. Penutupan dengan lapisan tanah penutup dilakukan setiap tiga hari sekali. Penutupan dengan lapisan tanah penutup dan pemadatan serta perataan menggunakan bantuan alat berat. Pemrosesan akhir sampah terdiri dari kegiatan pemadatan/ penimbunan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas.

Sampah yang berasal dari armada angkut pick up yang masuk ke TPA diarahkan menuju IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu). Di dalam IPST selanjutnya sampah dipilah/ sortir berdasarkan jenisnya. Sampah organik ditujukan untuk dibuat kompos di rumah pengomposan, sedangkan sampah anorganik dipilah menjadi sampah ekonomis dan non ekonomis. Sampah ekonomis diambil oleh petugas untuk kemudian dijual, sedangkan sampah non ekonomis yang diperbolehkan masuk ke tungku pembakaran. Profil serta fasilitas pendukung yang ada di TPA Troketon sebagai berikut.

Tabel 2.35 Profil TPA Troketon

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Area Rencana	± 9 Ha
2	Luas Total Lahan TPA	± 8,90 Ha
3	Jarak dari pusat kota	± 17 km
4	Jarak dari permukiman	± 1 km
5	Jarak dari badan air	± km
6	Metode pengelolaan	<i>Controlled Landfill</i>
7	Frekuensi pengurukan	Setiap tiga hari sekali
8	Fasilitas:	
	a. Pagar keliling	Ada, belum menyeluruh
	b. Jalak masuk	Ada, beton
	c. Jalan operasi	Ada, belum perkerasan
	d. Kantor	Ada
	e. Pos jaga	Ada
	f. Papan nama	Ada
	g. Kamar mandi dan WC	Ada
	h. Saluran drainase	Ada, belum menyeluruh
	i. Bangunan pengolah lindi	Ada
	j. Pipa pengumpul gas	Ada, belum menyeluruh
	k. Garasi alat berat	Ada
	l. Tempat pencucian unit	Ada
	m. Area pengomposan	Ada
	n. Alat berat	3 excavator, 1 bulldozer

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

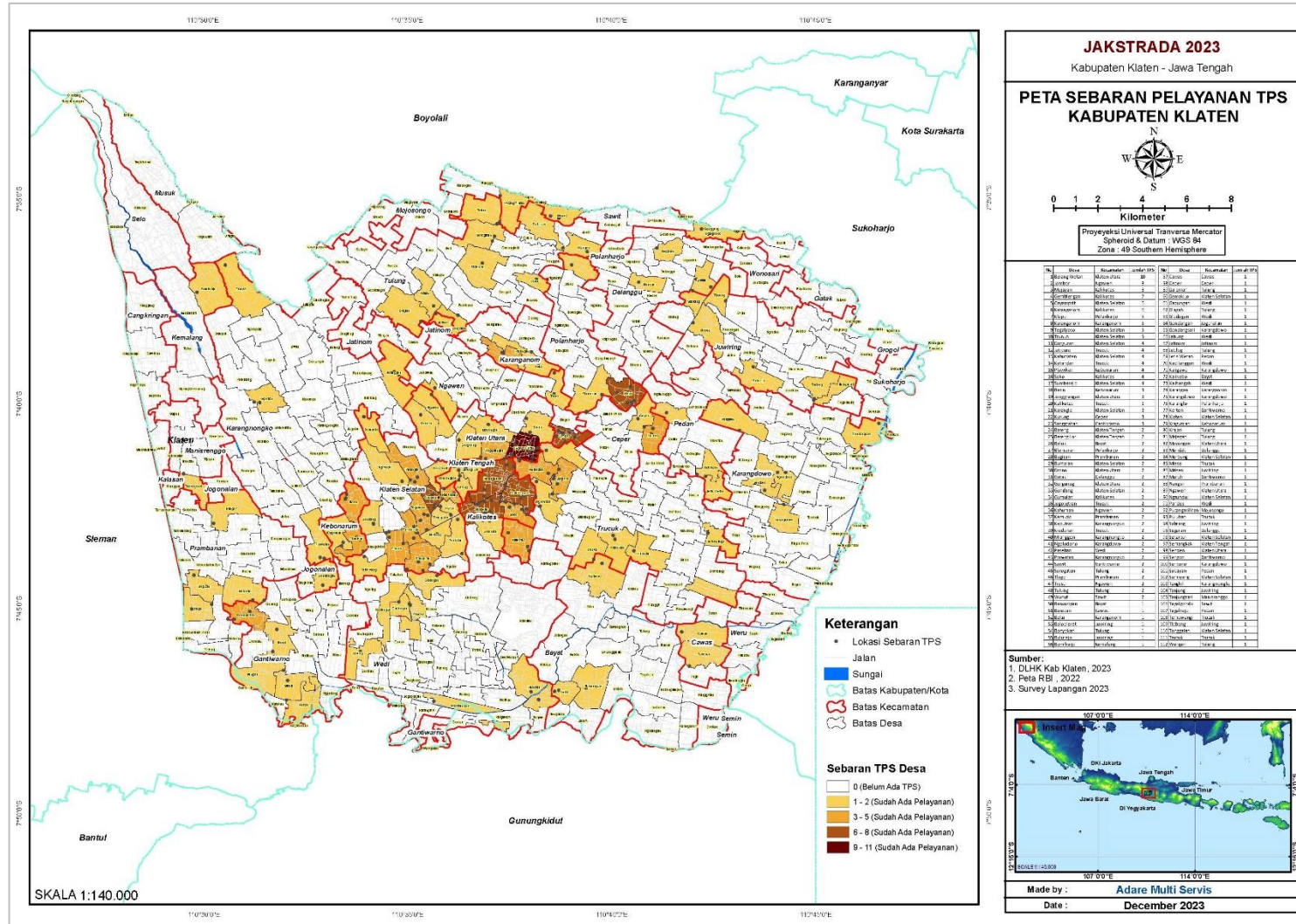


Gambar 2.13 TPA Troketon di Desa Troketon Kcamatan Pedan

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029



Gambar 2.14 Peta Sebaran Pelayanan TPS di Kabupaten Klaten

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Berdasarkan dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023, Jumlah pengurangan sampah di Kabupaten Klaten Semester 1 Tahun 2023 yaitu 29.111,64 ton/semester atau sebesar 25,03% dan Semester 2 Tahun 2023 yaitu 60.270 ton/tahun atau sebesar 25,42%. Sedangkan jumlah penanganan sampah di Kabupaten Klaten Semester 1 Tahun 2023 yaitu 37.994,63 ton/semester atau sebesar 32,67% dan Semester 2 Tahun 2023 yaitu 79.439,14 ton/tahun atau sebesar 33,51%. Jumlah sampah yang terkelola di Kabupaten Klaten Semester 1 Tahun 2023 yaitu sebesar 57,71%, sedangkan persentase sampah tidak terkelola sebesar 42,29%. Jumlah sampah yang terkelola di Kabupaten Klaten Semester 2 Tahun 2023 yaitu sebesar 58,94%, sedangkan persentase sampah tidak terkelola sebesar 41,06%. Secara rinci neraca pengelolaan persampaha di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel neraca pengelolaan sampah berikut.

Tabel 2.36 Neraca Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Uraian	Semester 1 Tahun 2023	Semester 2 Tahun 2023
1	Potensi Timbulan Sampah	116.288,67 ton	237.050,70 ton
2	Jumlah Pengurangan Sampah	29.111,64 ton	60.270,00 ton
3	Persentase Pengurangan Sampah	25,03%	25,42%
4	Jumlah Penanganan Sampah	37.994,63 ton	79.439,14 ton
5	Persentase Penanganan Sampah	32,67%	33,51%
6	Sampah yang Dikelola	67.106,27 ton	139.709,14 ton
7	Persentase Sampah Dikelola	57,71%	58,94%
8	Sampah Tidak Dikelola	49.182,40 ton	97.542,23 ton
9	Persentase Sampah Tidak Dikelola	42,29 %	41,06%

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Hasil capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan target Jakstrada Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Hasil Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Semester I)

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1	Timbulan Sampah	116.288,67		116.288,67	
2	Pengurangan	31.397,94	27	29.111,64	25,03
3	Penanganan	83.727,84	72	37.994,63	32,67

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Berdasarkan target pengurangan dan penanganan sampah dalam Jakstrada Kabupaten Klaten, capaian pengurangan sampah di Kabupaten Klaten semester 1 tahun 2023 sebesar 25,03% dengan target capaian 27%. Sedangkan capaian penanganan sampah di Kabupaten Klaten semester 1 tahun 2023 sebesar 32,67% dengan target capaian 72%. Berdasarkan hasil capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan Kabupaten Klaten Semester 1 Tahun 2023 belum memenuhi target, sedangkan penanganan Kabupaten Klaten semester 1 Tahun 2023 belum memenuhi target Jakstrada.

Tabel 2.38 Hasil Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Semester 2)

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1	Timbunan Sampah	237.050,70		237.050,70	
2	Pengurangan	64.003,69	27	60.270	25,42
3	Penanganan	170.676,51	72	379.439,14	33,51

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Klaten Tahun 2023

Berdasarkan target pengurangan dan penanganan sampah dalam Jakstrada Kabupaten Klaten, capaian pengurangan sampah di Kabupaten Klaten semester 2 tahun 2023 sebesar 25,42% dengan target capaian 27%. Sedangkan capaian penanganan sampah di Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 33,51% dengan target capaian 72%. Berdasarkan hasil capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 belum memenuhi target, sedangkan penanganan Kabupaten Klaten Tahun 2023 belum memenuhi target Jakstrada.

2.2.2.3 Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di wilayah Perkotaan Klaten bermuara di Kali Bengawan Solo. Jaringan drainase yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase terpanjang yang ada di Kabupaten Klaten merupakan jaringan drainase dengan jenis jaringan drainase tersier sepanjang 614.472,57 meter. Total keseluruhan panjang drainase yang terdapat di Kabupaten Klaten yaitu sepanjang 787.474,77 meter.

Tabel 2.39 Jaringan Drainase di Kabupaten Klaten

No	Sistem	Panjang (m)
1	Primer	33.278,82
2	Sekunder	138.006,27
3	Tersier	614.472,57
Jumlah		787.474,77

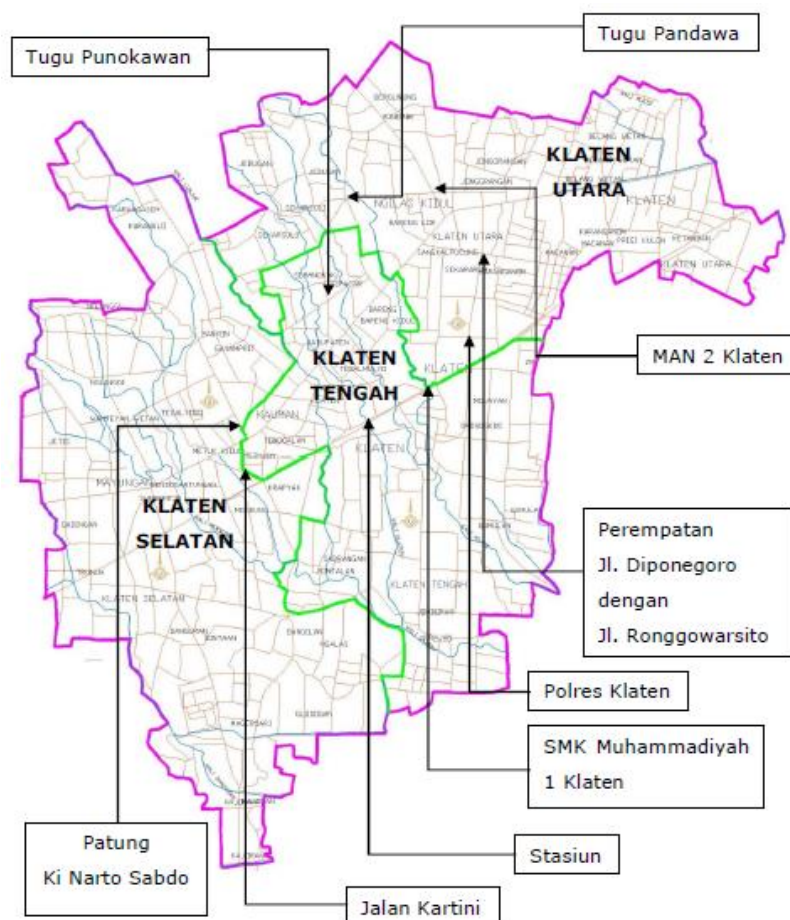
Sumber: RP3KP Kabupaten Klaten Tahun 2023-2042

Alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri/jasa dan lain sebagainya akan mengakibatkan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan bertransformasi langsung menjadi aliran permukaan sehingga volume aliran permukaan akan meningkat. Saluran Irigasi didesain memiliki kemiringan saluran yang cenderung lebih landai dari pada saluran drainase, sehingga aliran air yang mengalir cenderung lambat sebagai tuntutan dalam operasi pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian. Sedangkan aliran air drainase yang berasal dari permukaan jalan atau dari kawasan permukiman seringkali membawa partikel tersuspensi yang apabila aliran airnya lambat partikel tersuspensi tersebut akan mengendap menjadi sedimen. Oleh karena itu jika aliran air drainase masuk ke dalam saluran irigasi akan mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada saluran irigasi sehingga mengurangi kapasitas saluran tersebut.

Adanya perkembangan wilayah membawa dampak kepada alih fungsi lahan dan mengakibatkan volume aliran permukaan (*surface run off*) meningkat. Di sisi lain proses alih fungsi lahan tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase tersendiri akan tetapi memanfaatkan saluran irigasi yang ada untuk keperluan drainase dengan pertimbangan kemudahan. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya kegiatan pemeliharaan pada saluran irigasi yang ada dan juga di beberapa tempat saluran irigasi tersebut berupa saluran tertutup dan bahkan terdapat beberapa saluran yang dibagian atasnya telah tertutup oleh bangunan sehingga menyulitkan kegiatan pemeliharaan.

Akibat meningkatnya aliran permukaan serta berkurangnya kapasitas saluran akibat adanya sedimentasi mengakibatkan aliran air pada saluran akan meluap dan menimbulkan genangan.

Berdasarkan Dokumen Masterplan Drainase Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2019, titik genangan di wilayah perkotaan Kabupaten Klaten sebagian besar berada di wilayah Klaten Utara dan Klaten Tengah. Genangan tersebut disebabkan oleh meluapkan air hujan dikarenakan kondisi drainase yang buruk dan sedimentasi sungai. Titik genangan berada di sekitar kawasan Tugu Punokawan, Tuju Pandawa, Man 2 Klaten, perempatan Jalan Diponegoro dengan Jalan Ronggowarsito, Polres Klaten, SMK Muhammadiyah 1 Klaten, Stasiun, Jalan Kartini, dan Patung Ki Narto Sabdo.



Gambar 2.15 Lokasi Genangan Perkotaan Kabupaten Klaten

Sumber: Masterplan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2019

2.3 Permasalahan

2.3.1 Air Minum

Tabel 2.40 Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Aspek Teknis	
1. Aspek sarana dan prasarana	• Mapping sudah ada, namun capaian belum dapat tercapai 100 % dikarenakan kesulitan sumber air di wilayah merapi dan penanganan air payau di wilayah timur, kapasitas air yang mulai menipis di wilayah perbatasan klaten dan gunung kidul (wilayah kec. Bayat dan Gantiwarno), sehingga sulit dikembangkan sistem penyediaan air minum. • Layanan Air Minum Kabupaten Klaten 1. PDAM 2. Pamsimas 3. SPAMDes Lainnya 4. Non Perpipaan Sehingga layanan air minum Kabupaten Klaten sebesar 93,35 %, dan yang belum akses 6,62 % • Kurangnya pengawasan pemanfaatan kawasan lindung yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku (Wilayah Galian C)
B. Aspek Lainnya	
1. Aspek Pendanaan	• Kesadaran mengalokasikan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar air minum sangat kurang, masih mementingkan hal-hal fisik lainnya • Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi • Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
2. Aspek Sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat • Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat • Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan • Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat • Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.
3. Aspek kelembagaan/ Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Masih kurangnya kapasitas SDM yang terkait pengelolaan khususnya SPAMS Perdesaan • Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan khususnya SPAMS Perdesaan

4. Aspek lingkungan	• Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan • Pencemaran terhadap sumber air
---------------------	---

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.3.2 Sanitasi

2.3.2.1 Air Limbah Domestik

Tabel 2.41 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

A. Aspek Teknis	
1. Aspek pengembangan sarana dan prasarana	• Belum ada mapping prioritas penanganan air limbah domestik, sehingga pengembangan sarana dan prasana sanitasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka percepatan penanganan air limbah domestik • Kualitas Tangki septik yang belum memenuhi standar teknis kualitas bangunan • Belum berjalannya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
B. Aspek Lainnya	
2. Aspek Pendanaan	• Kesadaran mengalokasikan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sangat kurang, masih mementingkan hal-hal fisik lainnya
3. Aspek kelembagaan	• Kurangnya kegiatan penguatan kelembagaan di bidang pengelolaan air limbah domestik • Belum optimalnya peran KPP IPAL, Pemerintah Desa dan Asosiasi SPAMS Perdesaan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Belum efektifnya penegakan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sanitasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat • Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan • Belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta terkait pengelolaan tumpuk tinja
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan sampai monev.

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.3.2.2 Jaringan Persampahan

Tabel 2.42 Permasalahan Mendesak Jaringan Persampahan

A. Aspek Teknis	
1. Aspek sarana dan prasarana	• Beberapa wilayah sudah terlayani pengangkutan sampah. Namun masih banyak wilayah yang belum terlayani pengangkutan sehingga beberapa diantaranya membuang sampah ke sungai, tegalan dan dibakar. • Mapping sudah ada, namun capaian belum dapat tercapai sesuai target yaitu pada tahun 2023 pengurangan sampah sebesar 27% dan penanganan sampah sebesar 72%. Capaian pengurangan sampah sebesar 25,42% dan penanganan sampah sebesar 33,51% • Terbatasnya kapasitas TPA • Kurangnya ketersediaan TPS 3R • Terbatasnya tempat atau tong pemilahan sampah di masyarakat
B. Aspek Lainnya	
2. Aspek Pendanaan	• Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam penanganan persampahan • Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi • Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat • Kurangnya pengalokasian dana desa untuk sektor persampahan
3. Aspek Sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan • Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan persampahan • Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai money.
4. Aspek kelembagaan/ Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Belum ada payung hukum terkait penerapan insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga • Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan • Belum optimalnya penanganan sampah di tingkat hulu • Terbatasnya kemampuan kelembagaan persampahan di perdesaan

	Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana persampahan
5. Aspek lingkungan	- Kerusakan dan pencemaran lingkungan di daerah sungai akibat pembuangan sampah - Pencemaran udara akibat sampah yang menumpuk - Pencemaran terhadap sumber air dan tanah

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.3.2.3 Jaringan Drainase

Tabel 2.43 Permasalahan Mendesak Jaringan Drainase

1. Aspek sarana dan prasarana	- Proses alih fungsi lahan yang tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase menyebabkan terjadinya genangan - Jaringan drainase mengalami sedimentasi dikarenakan kurangnya kegiatan pemeliharaan - Beberapa saluran bagian atasnya telah tertutup oleh bangunan sehingga menyulitkan kegiatan pemeliharaan - Belum semua wilayah tersedia jaringan drainase - Konstruksi jaringan drainase yang kecil sehingga saluran tidak dapat menampung semua limpasan air hujan. - Perencanaan pembangunan jaringan drainase belum terintegrasi keseluruhan
2. Aspek Pendanaan	- Terbatasnya anggaran pemeliharaan jaringan drainase - Keterbatasan pendanaan penanganan jaringan drainase
3. Aspek Sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke saluran drainase yang mengakibatkan saluran drainase tersumbat - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase
4. Aspek lingkungan	- Genangan air dapat menyebabkan terkikisnya permukaan jalan dan mempengaruhi kestabilan tanah - Kelebihan air pada suatu kawasan menyebabkan lahan tidak berfungsi secara optimal sesuai kegunaannya - Drainase yang buruk menyebabkan konservasi air tanah tidak berjalan dengan baik

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.4 Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi (limbah, persampahan, dan drainase) yang layak antara lain sebagai berikut:

1. Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada,. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

2. Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi *on-site* yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

4. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

5. Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman masih kurang, baik dari pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

2.4.2 Air Minum

Tabel 2.44 Tantangan Pengembangan Air Minum

1. Aspek sarana dan prasarana	• Mengembangkan alternatif ketersediaan air yang diakibatkan menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan kualitas air minum • Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum • Perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju • Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan • Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air • Sebagian sumur dalam airnya payau diatas ambang batas yang di syaratkan sehingga diperlukan investasi pengolahan yang besar • Kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun ke tahun • Belum adanya Studi tentang Kualitas dan Potensi Air Bersih di Kabupaten Klaten
2. Aspek Pendanaan	• Isu air minum diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran • Optimalisasi sumber-sumber pendanaan non pemerintah • Optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum • Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat • Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi • Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran. • Isu air minum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran • Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.
3. Aspek kelembagaan	• Optimalisasi koordinasi antar pelaku kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan • Penguatan kelembagaan kepada pengelola dan pemerintah desa

	• Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan • Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Klaten • Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Tersedianya peraturan atau payung hukum yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta	• Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan capaian air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengatasi rendahnya partisipasi aktif masyarakat. • Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak; • Perubahan budaya masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev
7. Aspek Lingkungan	• Berkurangnya sumber daya air akibat penambangan illegal di daerah tangkapan air • Berkurangnya jumlah dan debit mata air • Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri • Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan • Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air.

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.4.3 Air Limbah Domestik

Tabel 2.45 Tantangan Pengembangan Air Limbah Domestik

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek pengembangan sarana dan prasarana	• Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar • Perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju • Belum semua rumah tangga mempunyai jamban sehat

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

2. Aspek Pendanaan	• Kebijakan AMPL yang terintegrasi satu sama lain karena ego sektoral dan banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut • memiliki metode pendampingan berbeda-beda. • Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat • Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan sanitasi • Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran • sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
3. Aspek kelembagaan	• Optimalisasi koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi • Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan • Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Klaten • Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam RPJMD
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Tersedianya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air limbah secara komprehensif
7. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta	• Rendahnya partisipasi aktif masyarakat. • Perubahan budaya masyarakat • Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak
8. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Belum terjangkaunya secara keseluruhan aspek komunikasi dan sosialisasi peran masyarakat sesuai dengan perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah. • Meningkatnya media sosialisasi, peran dan partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan & monev.
9. Aspek lingkungan	• Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri • Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.4.4 Jaringan Persampahan

Tabel 2.46 Tantangan Pengembangan Jaringan Persampahan

A. Sistem Pengembangan Jaringan Persampahan	
1. Aspek pengembangan sarana dan prasarana	• Meningkatnya timbulan sampah sementara tempat TPS 3R dan TPA kapasitasnya terbatas • Mahalnya alat pengelolaan persampahan yang modern dan ramah lingkungan • Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan sarana pengelolaan persampahan
2. Aspek Pendanaan	• Isu persampahan diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran • Optimaliasi sumber-sumber pendanaan non pemerintah • Optimalisasi pemanfaat dana desa dalam pengelolaan persampahan
3. Aspek kelembagaan	• Optimalisasi koordinasi antar program dan antar pelaku bidang pengelolaan persampahan • Penguatan kelembagaan kepada pengelola dan pemerintah desa
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Tersedianya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan persampahan secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta	• Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah untuk mengatasi rendahnya partisipasi aktif masyarakat.
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	• Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev • Belum terjangkaunya aspek komunikasi dan sosialisasi sesuai perkembangan penduduk serta kesadaran pengelolaan persampahan.

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

2.4.5 Jaringan Drainase

Tabel 2.47 Tantangan Pengembangan Jaringan Drainase

B. Sistem Pengembangan Jaringan Drainase	
1. Aspek sarana dan prasarana	• Meingkatkan pembangunan rumah dan gedung yang tidak disertai dengan penyediaan jaringan drainase • Minimnya perbaikan sehingga kondisi jaringan drainase mengalami kerusakan dan terjadi sedimentasi • Perencanaan pembangunan jaringan drainase belum terintegrasi secara keseluruhan

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

	• Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan jaringan drainase • Beberapa desa tidak terdapat jaringan drainase • Curah hujan yang tinggi sehingga jaringan drainase tidak mampu menampung limpasan air hujan
2. Aspek Pendanaan	• Isu jaringan drainase diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran • Optimalisasi sumber-sumber pendanaan non pemerintah • Optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pengembangan jaringan drainase • Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat • Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan jaringan drainase • Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran. • Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pengembangan jaringan drainase.
3. Aspek kelembagaan	• Optimalisasi koordinasi antar pelaku kegiatan bidang pengembangan jaringan drainase • Penguatan kelembagaan kepada pengelola dan pemerintah desa • Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang pengembangan jaringan drainase • Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang pengembangan jaringan drainase yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Klaten • Penanganan masalah pengembangan jaringan drainase belum menjadi program prioritas dalam RPJMD
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	• Tersedianya peraturan atau payung hukum yang mengatur kebijakan pengembangan jaringan drainase secara komprehensif
10. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta	• Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan jaringan drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengatasi rendahnya partisipasi aktif masyarakat. • Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan jaringan drainase.
11. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat	• Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Jender dan Kemiskinan) dll	
12. Aspek Lingkungan	• Curah hujan yang tinggi yang menyebabkan genangan air yang dapat mempengaruhi kestabilan tanah • konservasi air tanah tidak berjalan dengan baik • Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung ketersediaan dan kebersihan jaringan drainase.

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

BAB 3

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Isu Strategis

Pemerintah pusat telah menggulirkan program pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya dinamakan SDG's (*sustainable Development Goal*), salah satu tujuannya yaitu Tujuan ke 6 (Goal's 6) adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak pada tahun 2030. Oleh sebab itu tujuan dan sasaran pelayanan AMPL berdasarkan SDG's.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Klaten dalam penyediaan air minum dan sanitasi (air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan), maka Isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2029 adalah :

1. Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan
2. Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan
3. Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan
4. Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS termasuk membuang sampah sembarangan.
5. Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) khususnya di pedesaan
6. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)
7. Penanganan stunting
8. Masih rendahnya kesadaran dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang ramah disabilitas
9. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan khususnya daerah pedesaan
10. Proses alih fungsi lahan yang tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase menyebabkan terjadinya genangan

11. Perencanaan pembangunan jaringan drainase belum terintegrasi keseluruhan
12. Kurangnya pemeliharaan drainase sehingga jaringan drainase tidak berfungsi secara optimal

3.2 Arah Kebijakan

3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan. Misi terkait Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tertuang dalam :

1. Misi pertama yaitu **Mewujudkan Transformasi Sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

Dalam hal penyusunan RAD AMPL ini, nantinya akan diselaraskan dengan RPJPN Tahap 1 yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Secara keseluruhan tahapan mewujudkan transformasi sosial sebagai berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Mewujudkan Transformasi Sosial

Sumber: RPJPN 2025-2045

Tabel 3.1 Indikator Capaian Transformasi Sosial (Bidang AMPL) dalam RPJPN 2025-2045

No	Arah (tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
	Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80
		Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76
	Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8

Sumber: RPJPN 2025-2045

- Misi kelima yaitu **Memantapkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Tahapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai berikut.



Gambar 3.2 Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sumber: RPJPN 2025-2045

Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045, ketahanan sosial budaya dan ekologi dapat tercapai khususnya bidang air minum dan penyehatan lingkungan melalui kebijakan yang diarahkan pada :

- a. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, melalui Pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan:
 - 1) Perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan;
 - 2) Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;
 - 3) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau;
 - 4) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan;
 - 5) Pengelolaan lahan secara berkelanjutan;
 - 6) Peningkatan rekayasa lingkungan dan pengendalian hewan penular penyakit;
 - 7) Penguatan pencegahan kegiatan illegal dari penggunaan sumber daya alam (*logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping*);
 - 8) Implementasi pembangunan infratraktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk implementasi sistem peringatan dini kualitas air dan udara; dan
 - 9) Penerapan *polluter pays principle* sebagai instrumen untuk menghitung nilai dari kerusakan lingkungan dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan kepada pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- b. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*). Konversi sumber daya air dilaksanakan dalam rangka menjaga ketersediaan air secara kontinu melalui:

- 1) Peningkatan kualitas sungai (DAS) dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta penyelamatan danau;
 - 2) Penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dan konservasi non vegetatif (pembangunan sumur resapan, kolam retensi, dan bangunan penangkap air lainnya); dan
 - 3) Peningkatan kapasitas tampung air.
- c. Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Arah kebijakan terkait air minum dan penyehatan lingkungan meliputi:
- 1) Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan; dan
 - 2) Peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya penjaga ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga ketahanan ekonomi air.

Tabel 3.2 Indikator Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Bidang AMPL)
RPJPN 2025-2045

No	Arah (tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Kapasitas Tampung Air (m ³ /kapita)	63,34	200
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100

Sumber: RPJPN 2025-2045

3.2.2 Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik tahun 2025-2029 meliputi 5 (lima) tema dan arah kebijakan. Sementara itu, tema dan arah kebijakan RPJMN yang berkaitan dengan bidang air minum dan penyehatan lingkungan meliputi:

1. Tranformasi Sosial. Arah kebijakan yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sasaran pembangunan transformasi sosial yang berkaitan dengan bidang AMPL yaitu:

Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial di Bidang AMPL

No	Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
Kesehatan Untuk Semua			
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,36 (2022)	75,4
2	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	77
	b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,6 (2022)	11
3	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	354 (2021)	190
4	Cakupan kepesertaan JKN	95 (2023)	98

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Highlight intervensi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

- c. Investasi kesehatan primer melalui: (a) pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat (SPA) dan SDM di puskesmas dan pustu, (b) peningkatan kompetensi kader;
- d. Penurunan kematian ibu melalui: (a) penguatan kapasitas pelayanan emergensi PONED-PONEK; (b) peningkatan cakupan dan kualitas ANC, KF, KN sesuai standar; (c) penguatan deteksi dini, manajemen risiko dan tata laksana kasus;
- e. Penurunan stunting melalui: (a) penanggulangan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil; (b) penyediaan PMT bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia (*weight flatering*); (c) suplementasi gizi mikro pada balita;
- f. Pengendalian penyakit menular melalui: (a) penemuan dan pengobatan TBC; (b) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB; (c) peningkatan kapasitas penemuan kasus TB;
- g. Pengendalian penyakit tidak menular (PTM) melalui: (a) peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM; (b) pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM melalui pengendalian konsumsi GGL (gula, garam, lemak) pangan cepat saji, dan pengendalian konsumsi rokok;

- h. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melayani skema JKN; dan
 - i. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan melalui regulasi/ peraturan perundangan yang memberikan fleksibilitas pemerintah pusat untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama daerah sulit akses.
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Arah kebijakan yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Sasaran sosial budaya dan ekologi yang berkaitan di bidang AMPL yaitu:

Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi di Bidang AMPL

No	Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
Lingkungan Hidup Berkualitas			
1	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	75,02
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	30,0
	c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	38 (20% terdaur ulang)
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
2	Ketahanan air		
	a. Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)	58,34 (2022)	70,0
	b. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	51,36

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Highlight intervensi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

- d. Perbaikan kualitas ekosistem dan LH;
- e. Penurunan laju deforestasi;
- f. Penegakan hukum lingkungan;
- g. Percepatan pemenuhan sanitasi aman dan berkelanjutan;
- h. Reformasi pengolahan sampah terintegrasi hulu-hilir menuju *Circular Economy*;
- i. Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan air;

- j. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air (bendungan) dan pemulihan tampungan alami air (danau);
- k. Penyediaan pasokan air berkelanjutan;
- l. Pengelolaan risiko daya rusak air;
- m. Rehabilitasi hutan dan lahan;
- n. Penyediaan data dan informasi DAS yang berkualitas;
- o. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- p. Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana.

3.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Klaten

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing
2. Laju Pendapatan Perkapita Yang Tinggi dan Penurunan Kemiskinan Yang Signifikan
3. Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif
5. Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inkusif
6. Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat

Arah kebijakan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Strategi Pembangunan Daerah yaitu misi ketiga yaitu aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata, dan berkelanjutan dan misi keenam yaitu nilai kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang semakin meningkat.

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan “Penguatan Pondasi Pembangunan”. Arah kebijakan bidang air minum dan penyehatan lingkungan ada di Misi 3 (tiga) dan 6 (enam) yaitu:

1. **aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan**, difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman).
2. **Nilai kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang semakin meningkat**, difokuskan pada peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan sampah, limbah dan B3.



Gambar 3.3 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 ditetapkan 6 (enam) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang handal, produktif, berbudaya, berdaya saing dan berkeadilan,” maka arah pembangunan beserta arah kebijakan khusus bidang air minum dan penyehatan lingkungan meliputi sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua (*Health for All*)

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan sumberdaya dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkuali yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan

kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dan daya saing masyarakat bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan yaitu:

- a. Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, RTH, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
- b. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
- c. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; dan
- d. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.

Tabel 3.5 Sasaran Pokok 1: Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode 2025-2029)

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Periode 2025-2029
		2023	2025	
Kesehatan Untuk Semua (Health for All)	Usia Harapan Hidup (tahun)	77,07	77,31	78,90
	Jumlah kasus kematian ibu (kasus)	11	11	10
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,92	13,10	11,70
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage (%))	96,6	90,00	92,50
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,30	90,00	91,25
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,67	98,41	98,68

Sumber: RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok 3: “Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan,” maka arah pembangunan beserta arah kebijakan khusus bidang air minum dan penyehatan lingkungan meliputi sebagai berikut:

2. Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkeadilan
Air bersih dan sanitasi yang baik adalah elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kebutuhan terhadap air sangat krusial, terutama air minum layak, namun, pemenuhan akan kebutuhan air bersih dan

sanitasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembangunan wilayah sebagai pusat ekonomi dan populasi yang berkembang pesat, menghadapi tantangan serius terkait akses air bersih serta fasilitas sanitasi yang menjadi krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;
- b. penguatan pengelolaan sumber daya air, pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak;
- c. meningkatkan kapasitas BUMD air minum dalam mengoperasikan dan memenuhi akses bagi masyarakat dengan mengoptimalkan inovasi teknologi dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkelanjutan.

**Tabel 3.6 Sasaran Pokok 3: Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target RPJPD 2025-2045 (Periode 2025-2029)**

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Periode 2025-2029
		2023	2025	
Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak (%)	95,85	99,96	99,97
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,43	1,63	5
	Akses rumah tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	100	100	100
	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota (angka)	49,03	50,58	54,18

Sumber: RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok 6: “Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana,” maka arah pembangunan beserta arah kebijakan khusus bidang air minum dan penyehatan lingkungan meliputi sebagai berikut:

3. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Arah kebijakannya sebagai berikut:

- a. penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim
- d. peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan berkelanjutan dengan (a) Penerapan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sampah; (b) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah; (c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (d) Meningkatkan inovasi pengelolaan sampah modern.

4. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Arah kebijakannya sebagai berikut:

- a. penguatan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 3.7 Sasaran Pokok 6: Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode 2025-2029)

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Periode 2025-2029
		2023	2025	
Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	63,50	71,83	72
	Timbulan sampah terolah dan Difasilitasi pengolahan sampah (angka)	23,75	28,75	38,75
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (TonCO ₂ eq)	171.858	182,164	192.287

Sumber: RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

3.2.4 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Klaten

Arah kebijakan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Strategi Pembangunan Daerah yaitu Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah

yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

3.2.5 Nomenklatur Bidang AMPL berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023

Tabel 3.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG JURISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG JURISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
1	02	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	02	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
1	02	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	2.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	2.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	03	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
1	03	03	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	9	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IIRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	22	Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	2.01	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM
1	03	03	2.01	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
1	03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	2.01	26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	2.01	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Desa
1	03	03	2.01	28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan SPAM
1	03	03	2.01	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	03	2.01	31	Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	2.01	32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	2.01	33	Optimalisasi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	04	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST / SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	4	Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan
1	03	04	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
1	03	04	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	9	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	11	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
1	03	04	2.01	12	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
1	03	04	2.01	13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	14	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
1	03	04	2.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
1	03	04	2.01	16	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	05	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1	03	05	2.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1	03	05	2.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1	03	05	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
1	03	05	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
1	03	05	2.01	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	05	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1	03	05	2.01	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1	03	05	2.01	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1	03	05	2.01	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1	03	05	2.01	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	03	05	2.01	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
1	03	05	2.01	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1	03	05	2.01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	05	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1	03	05	2.01	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	11	11	2.01	8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	11	2.01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
2	11	11	2.01	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2	11	11	2.01	11	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
2	11	11	2.01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan
2	11	11	2.01	13	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
2	11	11	2.01	14	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
2	11	11	2.01	15	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
2	11	11	2.01	16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
2	11	11	2.01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
2	11	11	2.01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
2	11	11	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
2	11	11	2.02	1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2	11	11	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Sumber: Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023, diolah

3.3 Strategi Pencapaian

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Klaten 2025 - 2029, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
3. Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan mengevaluasi ketersediaan dan kebutuhan dan menerapkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
4. Meningkatkan anggaran untuk edukasi dan penyuluhan tentang penerapan PHBS untuk kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, media massa dan memasukkan materi PHBS dalam kurikulum Pendidikan.
5. Melakukan advokasi kebijakan, perencanaan anggaran jangka panjang, efisiensi pengelolaan dana, kemitraan, partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, monitoring, inovasi pendanaan, dan penyesuaian kebijakan khususnya dalam sektor air minum dan sanitasi.
6. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
7. Meningkatkan advokasi kesadaran tentang pencegahan stunting dan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dalam mengurangi dampak buruk stunting.
8. Pengendalian dalam perencanaan disain teknis untuk kegiatan bidang AMPL dengan cara memastikan disain yang dibuat ramah disabilitas.
9. Meningkatkan alokasi anggaran bidang AMPL untuk memenuhi kebutuhan investasi sarana prasarana persampahan di Kabupaten Klaten, baik melalui

APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya.

10. Melakukan pengendalian dengan penyusunan dokumen masterplan perencanaan drainase skala Kawasan, sehingga menjadi acuan pihak lainya dalam kegiatan pembangunan.
11. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan drainase dengan melibatkan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Menerapkan perencanaan dan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan rutin, pelatihan tenaga kerja, serta implementasi sistem pemantauan dan evaluasi berkala.

BAB 4**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan isu isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2025-2029**1. Program Pengembangan SPAM**

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari:

- a. Program unit air baku meliputi:
 - Kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya;
 - Kegiatan penyelamatan dan pelestarian sumber daya air; dan
 - Kegiatan penelitian dan pengembangan sumber air baku baru.
- b. Program unit produksi meliputi:
 - Kegiatan peningkatan kapasitas produksi;
 - Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan reservoir;
 - Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas *branch capturing*; dan
 - Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
- c. Program unit distribusi meliputi:
 - Kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi;
 - Kegiatan penambahan Sambungan Rumah/SR;
 - Kegiatan pemasangan dan penggantian meter induk; dan
 - Kegiatan pemutakhiran data dan sistem jaringan.
- d. Program unit pelayanan meliputi:
 - Kegiatan penggantian meter pelanggan;
 - Kegiatan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal pembayaran maupun pengaduan dll;

- Kegiatan penataan ruang loket dan sarana penunjang; dan
- Kegiatan reklasifikasi golongan pelanggan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari:

- a. Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi:
 - Kegiatan meningkatkan kualitas produksi air;
 - Kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan;
 - Kegiatan mengurangi kebocoran air;
 - Kegiatan rehabilitasi jaringan pipa distribusi; dan
 - Kegiatan menambah Sambungan Rumah/SR.
- b. Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi:
 - Kegiatan pengembangan dan optimalisasi SPAMS Perdesaan;
 - Kegiatan perluasan SPAMS Perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, Replikasi dan program-program lainnya;
 - Kegiatan meningkatkan kapasitas pengelola SPAMS Perdesaan; dan
 - Kegiatan membentuk Asosiasi SPAMS Perdesaan.

3. Program Penurunan Kebocoran Air

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari:

- Kegiatan identifikasi sumber kehilangan air;
- Kegiatan tera ulang meter air dan mengganti yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah;
- Kegiatan pembenahan jaringan distribusi dan mengganti pipa jaringan yang rusak, bocor dan yang sudah tidak layak pakai;
- Kegiatan mengadakan pengawasan/inspeksi jaringan secara periodik untuk mengetahui adanya pipa yang bocor maupun adanya sambungan liar; dan
- Kegiatan penyempurnaan sistem pelaporan.

4. Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAMS Perdesaan meliputi:

- Kegiatan pengembangan jaringan/sambungan rumah;
- Kegiatan optimalisasi SPAMS Perdesaan yang telah terbangun;
- Kegiatan penguatan kelembagaan pengelola SPAMS Perdesaan;

- Kegiatan penguatan kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan;
- Kegiatan membangun infrastruktur Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan; dan
- Kegiatan membangun infrastruktur air minum perdesaan melalui program Pamsimas, replikasi, dAK serta program-program lain baik yang didanai APBDesa, SPBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR, maupun lembaga donor lainnya.

5. Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- Kegiatan konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air;
- Kegiatan penanaman tanaman di sekitar mata air, dengan tanaman keras;
- Kegiatan pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam; dan
- Kegiatan penanganan kerusakan lingkungan.

Mengacu dengan Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pencapaian target bidang air minum maka program RAD APML Kabupaten Klaten 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	DPUPR
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	DPUPR
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	DPUPR
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
I. PUSAT		PDAM
1. Pemasangan Jaringan		PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Ds. Nglinggi s/d Ds Banyuanyar	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Stadion Trikoyo	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Nartosabdo	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Dk. Jetak S./d Balai Desa Ngrundul	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari MA Geneng s/d Dk Jetak	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
	Pemasangan Pipa Distribusi	PDAM
2. Zonasi		PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 mm dari Soto Sabar , karanglo s/d Perempatan GOR Gelar Sena Klaten	PDAM
	Pemasangan Konstruksi Jembatan Pipa Ø 300 mm	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan SMP N 1 Mayungan s/d PR. Griya Klaten Utara	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan Gereja Mayungan s/d Perempatan Gergunung	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 Bramen s/d Menara	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 dari jl. Mondokaki s/d Terminal Sukarno	PDAM
II. CABANG BARAT		PDAM
1. IKK Prambanan		PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
2. IKK Karangnongko		PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
	Renovasi Broncaptering di Mata Air Sliling 10 l/dt	PDAM
	Jaringan Perpipaan Distribusi	PDAM
		PDAM
3. IKK Kemalang		PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
	Pembangunan Rumah Jaga berikut perlengkapannya	PDAM
	Pembuatan Pagar Sumur Dalam	PDAM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
4. IKK Wedi		PDAM
1	Taping pipa Ø 200mm dari Sendang dengan Pipa dari MA. Geneng	PDAM
2	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 150mm dari Desa Trunuh s/d Masjid jami	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 100mm dari Masjid Jami s/d Kadisimo	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 75mm di Pasung	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
5. IKK Gantiwarno		PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
III. CABANG UTARA		PDAM
1. IKK Karanganom		PDAM
1	Pembangunan/Renovasi Broncaptering Mata Air Ponggok	PDAM
2	Pemasangan Jaringan dari ponggok s/d Jurangjero	PDAM
3	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
2. IKK Delanggu		PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
3. IKK Jatinom		PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
CABANG TIMUR		PDAM
1. IKK Ceper		PDAM
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Kurung	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
2. IKK Pedan		PDAM
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
3. IKK Cawas		PDAM
1	Pembuatan Pagar Reservoir Karanglo	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Burikan	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Nanggulan	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
4. IKK Bayat		PDAM
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Jambakan	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Ngerangan	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Dukuh	PDAM
5. IKK Karangdowo		PDAM
1	Jaringan Perpipa Distribusi	PDAM
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah	PDAM
6. IKK Trucuk		PDAM
1	Jaringan Perpipa Distribusi	PDAM
CSR		

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
	Penanaman Pohon	PDAM

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi Tahun 2025-2029

1. Program Peningkatan PHBS

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi:

- Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat;
- Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat;
- Advokasi dan pembinaan desa STBM;
- Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat;
- Pembinaan kader posyandu;
- Evaluasi pelaksanaan desa siaga;
- Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat; dan
- Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun.

2. Program Kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

- Optimalisasi IPLT;
- Layanan lumpur tinja terjadwal;
- Pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat;
- Pembangunan jamban keluarga;
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah cair dan pembuatan biogas;
- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, antara lain: TPA, TP3R, Tempat Sampah Terpilah, Bank Sampah, dan lain sebagainya.
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Mengacu dengan Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pencapaian target bidang sanitasi maka program RAD APML Kabupaten Klaten 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) Tahun 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	DPUPR
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	DPUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	DPUPR
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	DPUPR
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	DPUPR
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	DPUPR
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja OPLT	DPUPR
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DPUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DISPERWASKIM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DISPERWASKIM
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	DISPERWASKIM
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	DISPERWASKIM
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DISPERWASKIM
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	DISPERWASKIM
1.04.03.2.02.15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang kepemilikan Rumah	DISPERWASKIM
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
		DLH
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	DLH
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DLH
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
2. 11. 11. 2.01. 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SKPD
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

BAB 5

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 Rencana Pembiayaan

Berdasarkan Rencana Strategis OPD yang membidangi air minum dan sanitasi, maka disusun rencana pembiayaan RAD AMPL Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Tabel 5.1 Kebutuhan Investasi Bidang AMPL

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.400.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	600.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	130.000.000	500.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	130.000.000	500.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	130.000.000	500.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.625.000.000	3.300.000.000	3.350.000.000	3.150.000.000	3.350.000.000	DPUPR	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.625.000.000	3.300.000.000	3.350.000.000	3.150.000.000	3.350.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	120.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1.435.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	700.000.000	900.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja OPLT	220.000.000	100.000.000	300.000.000	100.000.000	300.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.360.000.000	1.360.000.000	1.360.000.000	700.000.000	600.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.180.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.180.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	230.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	DPUPR	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	DPUPR	APBN, APBD
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	205.000.000	212.500.000	295.000.000	227.500.000	235.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	205.000.000	212.500.000	295.000.000	227.500.000	235.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			75.000.000			DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	30.000.000	32.500.000	35.000.000	37.500.000	40.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	75.000.000	77.500.000	80.000.000	82.500.000	85.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisis Kebijakan Bidang PKP	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang kepemilikan Rumah	50.000.000	52.500.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000	DISPER WASKIM	APBN, APBD
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.921.210.000	11.829.804.000	13.606.000.000	14.748.500.000	14.492.375.000	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11.921.210.000	11.829.804.000	13.606.000.000	14.748.500.000	14.492.375.000	DLH	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	600.000.000	600.000.000	1.450.000.000	1.522.500.000	1.598.625.000	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	350.000.000	300.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.471.210.000	3.479.804.000	2.961.000.000	3.576.000.000	2.766.000.000	DLH	APBN, APBD
2. 11. 11. 2.01. 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7.500.000.000	7.450.000.000	9.100.000.000	9.555.000.000	10.032.750.000	DLH	APBN, APBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.100.000.000	4.200.000.000	4.368.000.000	4.542.720.000	4.724.428.800	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000.000	4.200.000.000	4.368.000.000	4.542.720.000	4.724.428.800	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.288.000.000	2.379.520.000	2.474.700.800	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.900.000.000	2.000.000.000	2.080.000.000	2.163.200.000	2.249.728.000	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.216.000.000	1.190.000.000	1.820.000.000	1.820.000.000	1.820.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	190.000.000	190.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	190.000.000	190.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.026.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	750.000.000	700.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	276.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
I. PUSAT							PDAM	PDAM
1. Pemasangan Jaringan							PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Ds. Nglinggi s/d Ds Banyuanyar		4.200.000.000				PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Stadion Trikoyo			2.000.000.000			PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Nartosabdo			2.000.000.000			PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Dk. Jetak S./d Balai Desa Ngrundul				3.600.000.000		PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari MA Geneng s/d Dk Jetak					4.300.000.000	PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	900.000.000	900.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	PDAM	PDAM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
	Pemasangan Pipa Distribusi		1.800.000.000				PDAM	PDAM
2. Zonasi							PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 mm dari Soto Sabar , karanglo s/d Perempatan GOR Gelar Sena Klaten	13.561.831.000					PDAM	APBD, PDAM
	Pemasangan Konstruksi Jembatan Pipa Ø 300 mm	3.668.024.000					PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan SMP N 1 Mayungan s/d PR. Griya Klaten Utara	496.772.498					PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan Gereja Mayungan s/d Permpatan Gergunung	331.844.029					PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 Bramen s/d Menara	2.202.001.700					PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 dari jl. Mondokaki s/d Terminal Sukarno	317.934.399					PDAM	PDAM
II. CABANG BARAT							PDAM	PDAM
1. IKK Prambanan							PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	90.000.000	90.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	PDAM	PDAM
2. IKK Karangnongko		-					PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	90.000.000	90.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	PDAM	PDAM
	Renovasi Broncaptering di Mata Air Sliling 10 l/dt	300.000.000					PDAM	PDAM
	Jaringan Perpipaan Distribusi		1.500.000.000				PDAM	PDAM
		-					PDAM	PDAM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
3. IKK Kemalang		-					PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	150.000.000	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	PDAM	PDAM
	Pembangunan Rumah Jaga berikut perlengkapannya	260.000.000					PDAM	PDAM
	Pembuatan Pagar Sumur Dalam	260.000.000					PDAM	PDAM
4. IKK Wedi		-					PDAM	PDAM
1	Taping pipa Ø 200mm dari Sendang dengan Pipa dari MA. Geneng	130.000.000					PDAM	PDAM
2	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 150mm dari Desa Trunuh s/d Masjid jami	1.654.252.420					PDAM	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 100mm dari Masjid Jami s/d Kadisimo	472.515.507					PDAM	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 75mm di Pasung	328.900.000					PDAM	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	150.000.000	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	PDAM	PDAM
5. IKK Gantiwarno		-					PDAM	PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	90.000.000	90.000.000	270.000.000	315.000.000	315.000.000	PDAM	PDAM
III. CABANG UTARA		-					PDAM	PDAM
1. IKK Karanganom							PDAM	PDAM
1	Pembangunan/Renovasi Broncaptering Mata Air Ponggok		600.000.000				PDAM	PDAM
2	Pemasangan Jaringan dari ponggok s/d Jurangjero	-	3.679.059.338				PDAM	PDAM
3	Rencana Investasi Sambungan Rumah	900.000.000	600.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	PDAM	PDAM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
2. IKK Delanggu		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	150.000.000	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	PDAM	PDAM
3. IKK Jatinom		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	60.000.000	90.000.000	270.000.000	225.000.000	225.000.000	PDAM	PDAM
CABANG TIMUR		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1. IKK Ceper		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Kurung	1.000.000.000					PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	600.000.000	600.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	PDAM	PDAM
2. IKK Pedan		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah	90.000.000	90.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	PDAM	PDAM
3. IKK Cawas							PDAM	PDAM
1	Pembuatan Pagar Reservoir Karanglo	250.000.000	-	-	-	-	PDAM	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Burikan	1.000.000.000	-	-	-	-	PDAM	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Nanggulan	500.000.000	-	-	-	-	PDAM	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	2.100.000.000	2.100.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000	PDAM	PDAM
4. IKK Bayat							PDAM	PDAM
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Jambakan	-	1.500.000.000	-	-	-	PDAM	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Ngerangan	-	-	2.000.000.000	-	-	PDAM	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Dukuh	-	-	-	3.000.000.000	2.000.000.000	PDAM	PDAM

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan					SKPD	Sumber Pembiayaan
		2025	2026	2027	2028	2029		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
5. IKK Karangdowo		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1	Jaringan Perpipaan Distribusi	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	PDAM	PDAM
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah	900.000.000	900.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	PDAM	PDAM
6. IKK Trucuk		-	-	-	-	-	PDAM	PDAM
1	Jaringan Perpipaan Distribusi		3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	PDAM	PDAM
CSR								
	Penanaman Pohon	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PDAM	PDAM
Jumlah		57.963.485.553	50.543.563.338	52.971.200.000	61.120.920.000	54.954.003.800		APBN, APBD, PDAM

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

5.2 Rencana Kebutuhan Investasi

Adapun rencana kebutuhan investasi berdasarkan hasil rekapitulasi rencana strategis OPD tahun 2025-2029 bidang AMPL sebagai berikut.

Tabel 5.2 Kebutuhan Investasi RAD AMPL Kabupaten Klaten 2025-2029

No	Bidang	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Air Minum	34.504.075.553	26.679.059.338	25.600.000.000	32.200.000.000	25.900.000.000
2	Sanitasi	23.459.410.000	23.864.504.000	27.371.200.000	28.920.920.000	29.054.003.800
Jumlah		57.963.485.553	50.543.563.338	52.971.200.000	61.120.920.000	54.954.003.800

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024 (diolah)

BAB 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Klaten. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Klaten pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Klaten juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Klaten melalui Kepala Bapperida.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Klaten di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Klaten maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2020-2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.

3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada saat ini adalah rencana kegiatan RAD AMPL pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan rencana kegiatan RAD AMPL tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sementara itu, rencana kegiatan RAD AMPL tahun 2024 belum bisa dievaluasi dikarenakan program dan kegiatan sedang berjalan.

6.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
 - b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
 - b. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bapperida selaku Ketua TKK;

- c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
 - d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bapperida;
 - e. Kepala Bapperida Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
 - f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
 - g. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bapperida;
 - h. Kepala Bapperida melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
 - c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Klaten

6.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 6.1 Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2022

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcam e	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendana an				Anggaran	Sumber Pendanaan		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1.03 - 1.4.0101 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah	Prosentase layanan air minum		13.815.000.000	APBD, APBN	Disperwas kim, DLHK, DPUPR	Dilaksanakan					adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"
		Prosentase layanan air limbah	100,00%				Dilaksanakan					
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak					Dilaksanakan	94,02%	3.948.212.000	DAU & DAK	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah"
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman					Dilaksanakan	100%	2.650.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah"
1.03.03.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	94,02%	3.948.212.000	DAU & DAK	DPUPR	nomenklatur baru nama kegiatan dari "Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"
1.03.05.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	100%	2.650.000.000	DAU	DPUPR	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH"
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang prasarana dan sarana air minum	500 SR	1.000.000.000	APBD	Disperwas kim	Dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
1.03 - 1.4.0101 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah lokasi optimalisasi dan pengembangan sistem distribusi air minum	3 lokasi	3.100.000.000	APBD	Disperwas kim	Dilaksanakan	0	0	-	-	
	Replikasi Program Pamsimas	jumlah desa replikasi program Pamsimas	2 desa	600.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
1.03 - 1.4.0101 - 27.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Jumlah desa program Pamsimas didanai DAK	4 lokasi	3.000.000.000	APBN	Disperwas kim	Dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomenklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
1.03 - 1.4.0101 - 27.14	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	Jumlah lokasi dampingan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4 lokasi	200.000.000	APBD	Disperwas kim		0	0	-	-	
1.03.03.2 .01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Kegiatan yang didukung dana operasional Pendukung DAK Bidang Air Minum					Dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari : a) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; b) Pengembangan sistem distribusi air minum; c) Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK); d) Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum; e) Replikasi Program Pamsimas
1.03.03.2 .01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana air minum					Dilaksanakan	5 Desa	1.000.000.000	DAU	DPUPR	
1.03.03.2 .01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum					Dilaksanakan	8 Lokasi	2.670.822.000	DAK	DPUPR	
1.03 - 1.4.0101 - 27.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Jumlah lokasi IPAL Komunal terbangun	5 lokasi	3.000.000.000	APBD & APBN	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	secara indikator sama tetapi ada perubahan nama kegiatan menjadi "Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman"
1.03.05.2 .01. 012	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah lokasi pembangunan IPAL Komunal					Dilaksanakan	4 lokasi	2.400.000.000	APBD	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)" "
	BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	15 desa	250.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: "Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat"
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Operasional Mendukung Kegiatan yang didukung Dana Kegiatan PAMSIMAS					Dilaksanakan	1 Kegiatan	177.390.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas"
1.03 - 1.4.0101 - 27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pendataan Sanitasi	1 dokumen	150.000.000	APBD	Disperwas kim	Dilaksanakan	0	0	-	-	Adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: "Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota"
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan IPAL komunal					Dilaksanakan	1 Dokumen	250.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi"
1.03 - 1.4.0101 - 27.15	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Jumlah desa yang didampingi Dana Operasional Pendukung Kegiatan SANIMAS	-	-	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program sudah selesai sebelum tahun 2023
	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi		4 desa	100.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	tidak ada kegiatan pembangunan sanitasi yang berasal dari DAK
1.03 - 1.3.0101 - 27.16	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)	Jumlah lokasi IPLT yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Tidak Dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
	Pembangunan IPLT	Jumlah lokasi IPLT yang dibangun	1 unit	500.000.000	APBN, APBD	DPUPR , DLHK	Tidak Dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
	HID Program Pamsimas	jumlah desa yang mendapatkan HID Program Pamsimas	5 desa	1.225.000.000	APBN	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
	Hibah Khusus Pamsimas	Jumlah Desa Pamsimas yang tidak berfungsi/baru berfungsi sebagian	2 desa	490.000.000	APBN, APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
1.03 - 1.4.0101 - 27.11	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	159 desa		APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase layanan drainase	72,50%	4.225.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan					Program berubah menjadi "Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota"
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik					Dilaksanakan	61,99%	1.251.369.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung					Dilaksanakan	61,99%	1.251.369.000	DAU	DPUPR	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN DAN

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE"
1.03 - 1.4.0101 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Dokumen DED Drainase	1 dokumen	225.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan					Kegiatan berubah menjadi "Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan"
1.03.06.2 .01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan					Dilaksanakan	1 Dokumen	251.369.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase perkotaan terbangun	2500 meter	4.000.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan					Kegiatan berubah menjadi "Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan"
1.03.06.2 .01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang drainase terbangun					Dilaksanakan	500 meter	1.000.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
2.05 - 1.3.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan		8.517.200.000.000	APBN, APBD Gub, APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL"
		Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat					Dilaksanakan					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik					Dilaksanakan	100%	1.800.000.000	DAK & DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan"
1.03.04.2 .01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	100%	1.800.000.000	DAK & DAU	DPUPR	nama kegiatan nomenklatur terbaru dari program PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL"
2.05 - 1.3.0101 - 15.24	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jenis sarana prasarana yang dibangun	3 jenis	2.500.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS"
2.05 - 2.5.0101 - 15.19	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah pembangunan bank sampah	2 unit	2.000.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	0	1.200.000.000	APBN	DLH	Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS"
1.03.04.2 .01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah lokasi pembangunan TPS-3R					Dilaksanakan	3 Lokasi	1.800.000.000	DAK	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari : a) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); b) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
2.05 - 1.3.0101 - 15.4	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	Jumlah TPA yang di operasionalkan	1 TPA	8.500.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
2.05 - 1.3.0101 - 15.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah	Jumlah Lokasi TPS yang dipelihara	3 lokasi	150.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK
2.05 - 1.3.0101 - 15.25	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah jenis sarana prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	7 jenis	2.500.000.000	APBD	DPUPR & DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK
1.03 - 1.3.0101 - 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	85,56%	7.000.000.000	APBD	DPUPR	Tidak Dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	1 unit	5.000.000.000	APBD	DPUPR	Tidak Dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.2	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara	1 unit	500.000.000	APBD	DPUPR	Tidak Dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.13	Rehabilitasi kawasan sumber air	Jumlah sumber air yang direhab	5 unit	1.500.000.000	APBD	DPUPR	Tidak Dilaksanakan					Refocusing
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1.03 - 1.4.0101 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah	Prosentase layanan air minum		13.815.000.000	APBN, APBD	Disperwas kim, DLHK, DPUPR	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
		Prosentase layanan air limbah	100%					0				
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang prasarana dan sarana air minum	500 SR	1.000.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah lokasi optimalisasi dan pengembangan sistem distribusi air minum	3 lokasi	3.100.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Jumlah lokasi IPAL Komunal terbangun	5 lokasi	3.000.000.000	APBD & APBN	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.11	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	159 desa		APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	15 desa	250.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan		0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pendataan Sanitasi	1 dokumen	150.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Jumlah desa program Pamsimas didanai DAK	4 lokasi	3.000.000.000	APBN	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.14	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	Jumlah lokasi dampingan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4 lokasi	200.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.15	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Jumlah desa yang didampingi Dana Operasional Pendukung Kegiatan SANIMAS	-	-	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Target Output Outcome	Rencana sesuai RAD			Pelaksanaan					
				Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi		4 desa	100.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	Replikasi Program Pamsimas	jumlah desa replikasi program Pamsimas	2 desa	600.000.000	APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	HID Program Pamsimas	jumlah desa yang mendapatkan HID Program Pamsimas	5 desa	1.225.000.000	APBN	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	Hibah Khusus Pamsimas	Jumlah Desa Pamsimas yang tidak berfungsi/baru berfungsi sebagian	2 desa	490.000.000	APBN, APBD	Disperwas kim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase layanan drainase	72,50%	4.225.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Dokumen DED Drainase	1 dokumen	225.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase perkotaan terbangun	2500 meter	4.000.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	13 desa	750.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan				Disperwaskim	Program berubah menjadi "PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN"
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					Dilaksanakan	5%	70.566.500		Disperwaskim	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan"
1.04.03.2 .02	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (sepuluh) Ha	Presentase penanganan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilakukan					Dilaksanakan	5%	70.566.500		Disperwaskim	nama kegiatan nomenklatur terbaru dari program "PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN"
1.03 - 1.4.0101 - 30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Jumlah Dana Operasional kegiatan KOTAKU	13 desa	750.000.000	APBD	Disperwas kim	dilaksanakan				Disperwaskim	Kegiatan berubah menjadi : 1)Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. (15 desa lokasi baru) 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
1.04.03.2 .02.01	Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi permukiman kumuh tersusun					Dilaksanakan	1 dokumen	46.003.600		Disperwaskim	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan"
1.04.03.2 .02.05	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Jumlah koordinasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yang dilakukan					Dilaksanakan	12 koordinasi	24.562.900		Disperwaskim	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
2.05 - 1.3.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan		8.517.200.000.000	APBN, APBD	DPUPR, DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN"
		Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat										
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani						83,39%	13.175.929.501	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		- Persentase jumlah sampah yang berkurang						34%				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan"
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani						83%	13.175.929.501	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN"
2.05 - 2.5.0101 - 15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang terbeli	200 unit	2.000.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi kegiatan "Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota"
2.05 - 2.5.0101 - 15.19	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah pembangunan bank sampah	2 unit	2.000.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan					dilaksanakan	5 Unit	4.475.879.585	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan" serta terdapat perubahan indikator
2.05 - 1.3.0101 - 15.4	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	Jumlah TPA yang di operasionalkan	1 TPA	8.500.000.000.000	APBD	DLHK, DPUPR	Dilaksanakan					adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi kegiatan "Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota"
2.11.11.2.01.0003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA					dilaksanakan	30 jalur	8.700.049.916	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan". serta terdapat perubahan indikator
2.05 - 2.5.0101 - 15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	35 kelompok	2.700.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	10 kelompok	1.025.133.966	APBD	DLH	nama kegiatan sama
2.05 - 2.5.0101 - 15.17	Pembinaan Bank Sampah	terbentuknya kelompok bank sampah baru	20 kelompok	300.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	0	0	-	-	kegiatan gabung dengan "Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan"
2.05 - 2.5.0101 - 16	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL		3.455.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan sebagian					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP"
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten										
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang										

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota										
		Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan										
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Cakupan pemantauan kualitas air					Dilaksanakan	100%	167.020.237	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
		- Cakupan pemantauan kualitas udara					Dilaksanakan	100%				
		- Presentase kampung iklim yang terbentuk					Dilaksanakan	100%				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan					Dilaksanakan	100%	167.020.237	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP"
2.05 - 2.5.0101 - 16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah sampling titik pantau, kualitas udara dan air	30 titik	200.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut"
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara					Dilaksanakan	17 titik	167.020.237	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pemantauan Kualitas Lingkungan"
2.05 - 2.5.0101 - 16.26	Operasional laboratorium lingkungan	jumlah titik sampling	50 titik sampling	300.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota"
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium					Dilaksanakan	1 unit	600.000.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Operasional laboratorium lingkungan "
2.05 - 2.5.0101 - 16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	45 pelaku usaha	60.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik"
2.05 - 2.5.0101 - 16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	jumlah Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang terlaksana	5 kegiatan	1.000.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3"

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3					Dilaksanakan	100%	508.671.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani					Dilaksanakan	100%	508.671.000	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)"
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan					Dilaksanakan	65 pelaku usaha	252.671.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup "
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3					Dilaksanakan	65 pelaku usaha	256.000.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengelolaan B3 dan Limbah B3"
2.05 - 2.5.0101 - 16.1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	nilai capaian adipura	75 angka	450.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	- Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten					Dilaksanakan	3 orang	323.830.351	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
		- Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten					Dilaksanakan	100%				
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup					Dilaksanakan	3 jenis	323.830.351	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT"
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup					Dilaksanakan	3 jenis	323.830.351	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura"

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup											
2.05 - 2.5.0101 - 16.7	Pengkajian dampak lingkungan	jumlah kajian lingkungan terkait dengan perencanaan daerah/usaha/kegiatan	2 dokumen	550.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota"
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup					Dilaksanakan	100%	691.818.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
2.11.02.2 .01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	33%	691.818.000	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP"
2.11.02.2 .01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun					Dilaksanakan	5	691.818.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengkajian dampak lingkungan"
2.05 - 2.5.0101 - 16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat	3 kegiatan	225.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup"
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	- Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					Dilaksanakan	100%	563.153.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
		- Persentase saka kalpataru yang dibina					Dilaksanakan	100%		APBD	DLH	
2.11.08.2 .01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan					Dilaksanakan	100%	563.153.000	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT"
2.11.08.2 .01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah saka pramuka yang dibina					Dilaksanakan	1500 orang	563.153.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "PPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup"
2.05 - 2.5.0101 - 16.20	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan	jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	55 pelaku usaha	40.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"
2.05 - 2.5.0101 - 16.29	Operasional Perijinan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	500 pelaku usaha	130.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH"

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota					Dilaksanakan	80%	522.022.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup"
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi					Dilaksanakan	5%	522.022.000	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)"
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi					Dilaksanakan	125 pulau usaha	259.022.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan"
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan					Dilaksanakan	125 pulau usaha	263.000.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Operasional Perijinan"
2.05 - 2.5.0101 - 16.34	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	jumlah pengolahan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di Kab Klaten (IPAL) industri	2 unit	500.000.000	APBD	DLHK	Tidak Dilaksanakan					pembangunan IPAL terakhir pd th 2019
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	3 Ha	610.000.000	APBN, APBD	DLHK	dilaksanakan sebagian					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)"
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air/sumber air	5 Ha	250.000.000	APBD, CSR	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	5 km	120.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 21	Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan	2500 batang	900.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik						100%	6.275.318.720	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari program "Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam"
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupate/Kota						100%	6.275.318.720	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)"
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin						48 RTH	6.275.318.720	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan: 1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, 2) Penghijauan Jalan Dalam Kota, 3) Pengadaan bibit tanaman penghijauan
	Kajian penyiapan sumber air baku dan kelestarian air baku	Jumlah kajian yang disusun	1 dokumen	150.000.000	APBD	Bappeda / Disperwas kim, DLHK	Tidak Dilaksanakan					Refocusing
DINAS KESEHATAN												
1.02 - 1.2.0101 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	245.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan	67,08	240.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
		Kebijakan Yang Dibuat	13					13				
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	90					94,63				
		Persentase Desa yang Memanfaatkan CSR untuk Kesehatan	30					30				
		Proporsi Posyandu Mandiri	55					59,11				
		Presentase Desa yang didampingi SMD MMD	100					100				
1.02 - 1.2.0101 - 19.6	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	jumlah petugas penyuluh kesehatan	167 orang	100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan	134 orang	100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02 - 1.2.0101 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu, Poskestren, Posbindu	60 ukbm	85.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan	50 ukbm	69.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02 - 1.2.0101 - 19.8	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah petugas, desa PHBS dan puskesmas	106 petugas	60.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan	160 petugas	82.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02 - 1.2.0101 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	cakupan desa <i>open defication free (ODF)</i>	100%	800.000.000	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan	100%				Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi " Program Pemenuhan Upaya Kesahatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"
		persentase pengeloaan limbah medis dan nonmedis	100%					100%				
		Persentase desa STBM	54,36%					54,36%				
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesahatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						Dilaksanakan		914.786.300	APBD	Dinas Kesehatan	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Lingkungan Sehat"
1 . 02 . 02 . 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Dilaksanakan		914.786.300	APBD	Dinas Kesehatan	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "Program Pemenuhan Upaya Kesahatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"
1.02 - 1.2.0101 - 21.2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah puskesmas dengan RW sehat percontohan	15 RW	350.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan					Nomenklatur berubah menjadi "Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"
1.02 - 1.2.0101 - 21.5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungan	401 desa	450.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	dilaksanakan					
	Desa STBM (DAK nonfisik)	jumlah desa STBM (DAK)	68 desa	510.000.000	APBN	Dinas Kesehatan	dilaksanakan					
1 . 02 . 02 . 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis					Dilaksanakan	34 puskesmas	914.786.300	APBD	Dinas Kesehatan	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan: 1) Peningkatan Kesehatan

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		Jumlah Desa STBM					Dilaksanakan	401		APBD	Dinas Kesehatan	Lingkungan. 2) Desa STBM (DAK nonfisik)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
1.06-4.1.0901-25	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase desa yang tertangani bencana air bersihnya	100%	200.000.000	APBD	BPBD	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Penanggulangan Bencana"
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa yang tertangani bencana air bersihnya					Dilaksanakan	100 %	417.186.882	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Penanganan Darurat Bencana"
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayannya warga negara yang mendapatkan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat					Dilaksanakan	100%	417.186.882	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru tambahan dari program "Program Penanggulangan Bencana"
1.06-4.1.0901-25.4	Dropping Air Bersih	Jumlah Dropping Air Bersih Wilayah Kabupaten Klaten	25 desa	200.000.000	APBD	BPBD	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota". Dan indikatornya target capaian berubah menjadi tangki
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Jumlah dropping air yang diberikan dalam respon cepat bencana kekeringan					dilaksanakan	165 tangki	417.186.882	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Dropping Air Bersih"
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase jumlah BPSPAMS yang terbina	100%	60.000.000	APBD	Dispermasdes	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Penanggulangan Bencana"
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif						100	71.515.998	APBD	Dispermasdes	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan"
		Persentase Posyandu aktif						100				
		Prosentase Posyantek aktif						26,67				
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK						100	71.515.998	APBD	Dispermasdes	Nomenklatur terbaru tambahan dari program "ROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT"
		Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan						100				
		Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi						100				
		Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan						100				
2.07 - 2.7.0101 - 16.9	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	jumlah BPSPAMS yang dibina dalam 1 tahun	152 BPSPAMS	60.000.000	APBD	Dispermasdes	dilaksanakan					Realisasi anggaran masih gabungan dengan program lain "PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT"

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
2.13.05.2 .01. 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP SPAMS yang terbina						100	71.515.998	APBD	Dispermasdes	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)". Terdapat perbedaan nama kegiatan tetapi salah satu inditornya sama serta anggaran merupakan gabungan dengan sub kegiatan lainnya
DINAS PENDIDIKAN												
1.01 - 1.1.0101 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sarana pasarana SD dengan kondisi baik	31%	4.624.000.000	APBN, APBD	Dinas Pendidikan	dilaksanakan sebagian					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Pengelolaan Pendidikan"
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan						Dilaksanakan		3.008.099.108	DAK	Dinas Pendidikan	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"
1.01.02.2 .01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Dilaksanakan		490.999.108	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "Program Pengelolaan Pendidikan"
1.01 - 1.1.0101 - 16.96	Pembangunan Sanitasi/ MCK SD	Jumlah sanitasi/MCK SD yang dibangun	30 unit	3.135.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah". 1 unit terdiri dari 4 pintu toilet
1.01.02.2 .01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah dibangun					Dilaksanakan	3 Unit	490.999.108	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru pengganti dari kegiatan "PPembangunan Sanitasi/MCK SD"
1.01 - 1.1.0101 - 16.101	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	Jumlah Sekolah sehat dan Kader Kesehatan	110 sekolah	75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	10 sekolah				Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah"
1.01.02.2 .02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Dilaksanakan		2.517.100.000	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "Program Pengelolaan Pendidikan"
1.01.02.2 .02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana SMP dibangun					Dilaksanakan	8 Unit	500.000.000	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru pengganti dari kegiatan "Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP"
1.01.02.2 .02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas SMP direhab					Dilaksanakan	54 unit	2.017.100.000	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru pengganti dari kegiatan "Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary"
1.01 - 1.1.0101 - 16.100	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	Jumlah SD yang mengikuti lomba sekolah sehat	5 sekolah	30.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	5 sekolah	30.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	
1.01 - 1.1.0101 - 16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi yang dibangun	30 ruang	620.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Tidak dilaksanakan	-	0	-	-	Kegiatan ini tidak dapat alokasi anggaran dari DAK Fisik maupun APBD
1.01 - 1.1.0101 - 16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi yang direhab	128 unit	764.000.000	APBN	Dinas Pendidikan	Tidak dilaksanakan	-	0	-	-	Kegiatan ini tidak dapat alokasi anggaran dari DAK Fisik maupun APBD

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcome	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcam e	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendana an				Anggaran	Sumber Pendanaan		
PDAM												
	PROGRAM PDAM			29.770.000.000								
	Pemasangan Jaringan Perpipaan dari MA. Ingas Cokro		Juwiring, Juwiring	16.000.000.000	APBN, APBD	PDAM	Tidak dilaksanakan					SIPA belum ada
	Menyediakan air baku		27.003.974 m3	13.501.987.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	18.070.128	7.250.147.524	PDAM	PDAM	
	Produksi air		22.503.312 m3	1.417.708.656	APBD	PDAM	Dilaksanakan	16.547.926	1.040.475.429	PDAM	PDAM	
	Pengembangan SPAM		1 wilayah	6.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	1	7.000.000.000	PDAM	PDAM	
	Pemeliharaan sumber		22 lokasi	200.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	22	470.258.400	PDAM	PDAM	
	Pemeliharaan IPA		5 unit	500.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	5 unit	25.460.722	PDAM	PDAM	
	Penghijauan Daerah sumber dan tangkapan air		1 area	50.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	1 area	843.320.000	PDAM	PDAM	
	Pembuatan sumur resapan		10 unit	50.000.000	APBD	PDAM	Tidak dilaksanakan	0				Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Geolistrik		4 titik	120.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	4 titik	120.000.000	PDAM	PDAM	
	Penambahan SR		2000 SR	3.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	1850 SR	2.775.000.000	PDAM	PDAM	
	Reklasifikasi golongan pelanggan		2000 SR	100.000.000	APBD	PDAM	Tidak dilaksanakan					Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Penggantian Meter/ Tera Meter pelanggan		4000 SR	2.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	9838 SR			PDAM	hanya dilaksanaka Tera Meter menggunakan biaya pemeliharaan
	Penertiban SR pelanggan		300 SR	450.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	638 SR				Dilakukan penertiban menggunakan anggaran pemeliharaan
	Pemeliharaan jaringan Distribusi		2000 titik	1.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	2000 titik	1.936.352.282	PDAM	PDAM	
	Pembuatan Distrik Meter Area (DMA)	jumlah DMA yang terpasang	2 DMA	1.000.000.000	APBD	PDAM	Tidak dilaksanakan	0		PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Promosi dan Sosialisasi Kampanye Penggunaan Air PDAM	jumlah peserta (bantuan konsumsi)	500 orang	18.000.000	APBD	PDAM	Tidak dilaksanakan	0		PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Keterangan:

: Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pengganti berdasarkan nomenklatur terbaru

6.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 6.2 Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2023

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1.03 - 1.4.0101 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah	Prosentase layanan air minum		15.115.000.000	APBD, APBN	Disperwaskim, DLHK, DPUPR	Dilaksanakan					adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Pengelolaan Dan
		Prosentase layanan air limbah	100,00%				Dilaksanakan					

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak					Dilaksanakan	95,59%	4.470.822.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah"
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman					Dilaksanakan	100%	2.001.990.000	DAU & DAK	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah"
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	95,59%	4.470.822.000	DAU	DPUPR	nomenklatur baru nama kegiatan dari "Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	100%	2.001.990.000	DAU & DAK	DPUPR	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH"
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang prasarana dan sarana air minum	500 SR	1.000.000.000	APBD	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
1.03 - 1.4.0101 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah lokasi optimalisasi dan pengembangan sistem distribusi air minum	3 lokasi	3.100.000.000	APBD	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	
	Replikasi Program Pamsimas	jumlah desa replikasi program Pamsimas	2 desa	600.000.000	APBD	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	
1.03 - 1.4.0101 - 27.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Jumlah desa program Pamsimas didanai DAK	4 lokasi	3.500.000.000	APBN	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
1.03 - 1.4.0101 - 27.14	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	Jumlah lokasi dampingan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4 lokasi	250.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Kegiatan yang didukung dana operasional Pendukung DAK Bidang Air Minum					Dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari : a) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; b) Pengembangan sistem distribusi air minum; c) Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK); d) Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum; e) Replikasi Program Pamsimas
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana air minum					Dilaksanakan	6 Desa	1.500.000.000	DAU	DPUPR	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum					Dilaksanakan	3 Desa	2.670.822.000	DAU	DPUPR	
1.03 - 1.4.0101 - 27.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Jumlah lokasi IPAL Komunal terbangun	5 lokasi	3.750.000.000	APBD & APBN	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	secara indikator sama tetapi ada perubahan nama kegiatan menjadi "Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman"
1.03.05.2.01. 012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik					Dilaksanakan	1 Rumah Tangga	1.801.990.000	DAK	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)"
	BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	15 desa	250.000.000	APBD	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	Adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi:

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												"Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat"
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Operasional Mendukung Kegiatan yang didukung Dana Kegiatan PAMSIMAS					Dilaksanakan	1 Kegiatan	200.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas"
1.03 - 1.4.0101 - 27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pendataan Sanitasi	1 dokumen	150.000.000	APBD	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	Adanya perubahan nomeklatur, indikator, dan nama kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berubah menjadi: "Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota"
1.03.05.2.01. 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan IPAL komunal					Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi"
1.03 - 1.4.0101 - 27.15	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Jumlah desa yang didampingi Dana Operasional Pendukung Kegiatan SANIMAS	-	-	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program sudah selesai sebelum tahun 2023
	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi		4 desa	100.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	tidak ada kegiatan pembangunan sanitasi yang berasal dari DAK
1.03 - 1.3.0101 - 27.16	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)	Jumlah lokasi IPLT yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	tidak dilaksanakan					Refocusing
	Pembangunan IPLT	Jumlah lokasi IPLT yang dibangun	1 unit	500.000.000	APBN, APBD	DPUPR , DLHK	Tidak dilaksanakan					Refocusing
	HID Program Pamsimas	jumlah desa yang mendapatkan HID Program Pamsimas	5 desa	1.225.000.000	APBN	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
	Hibah Khusus Pamsimas	Jumlah Desa Pamsimas yang tidak berfungsi/baru berfungsi sebagian	2 desa	490.000.000	APBN, APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
1.03 - 1.4.0101 - 27.11	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	164 desa		APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Program PAMSIMAS sudah selesai tahun 2021 sehingga tidak dilaksanakan
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase layanan drainase	73,00%	4.225.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Program berubah menjadi "Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota"

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik					Dilaksanakan	62,29%	2.593.894.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	62,29%	2.593.894.000	DAU	DPUPR	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE"
1.03 - 1.4.0101 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Dokumen DED Drainase	1 dokumen	225.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Kegiatan berubah menjadi "Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan"
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan					Dilaksanakan	1 Dokumen	220.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase perkotaan terbangun	2500 meter	4.000.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Kegiatan berubah menjadi "Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan"
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang drainase terbangun					Dilaksanakan	1400 meter	2.373.894.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong"
2.05 - 1.3.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan		25.575.000.000	APBN, APBD Gub, APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL"
		Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat					Dilaksanakan					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik					Dilaksanakan	100%	2.400.000.000	DAU	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan"
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	100%	2.400.000.000	DAU	DPUPR	nama kegiatan nomenklatur terbaru dari program PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL"
2.05 - 1.3.0101 - 15.24	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jenis sarana prasarana yang dibangun	3 jenis	1.500.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS"
2.05 - 2.5.0101 - 15.19	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah pembangunan bank sampah	2 unit	2.000.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												"Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah lokasi pembangunan TPS-3R					Dilaksanakan	4 Lokasi	2.400.000.000	DAK	DPUPR	Nomenklatur terbaru pengganti dari : a) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); b) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
2.05 - 1.3.0101 - 15.4	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	Jumlah TPA yang di operasionalkan	1 TPA	8.500.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK
2.05 - 1.3.0101 - 15.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah	Jumlah Lokasi TPS yang dipelihara	3 lokasi	175.000.000	APBD	DPUPR, DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK
2.05 - 1.3.0101 - 15.25	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah jenis sarana prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	7 jenis	2.500.000.000	APBD	DPUPR & DLHK	Dilaksanakan					dilaksanakan oleh DLHK
1.03 - 1.3.0101 - 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	87,46%	7.500.000.000	APBD	DPUPR	Tidak dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	1 unit	5.000.000.000	APBD	DPUPR	Tidak dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.2	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara	1 unit	500.000.000	APBD	DPUPR	Tidak dilaksanakan					Refocusing
1.03 - 1.3.0101 - 26.13	Rehabilitasi kawasan sumber air	Jumlah sumber air yang direhab	5 unit	2.000.000.000	APBD	DPUPR	Tidak dilaksanakan					Refocusing
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1.03 - 1.4.0101 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah	Prosentase layanan air minum		15.115.000.000	APBN, APBD	Disperwaskim, DLHK, DPUPR	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
		Prosentase layanan air limbah	100%					0				
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang prasarana dan sarana air minum	500 SR	1.000.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah lokasi optimalisasi dan pengembangan sistem distribusi air minum	3 lokasi	3.100.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Jumlah lokasi IPAL Komunal terbangun	5 lokasi	3.750.000.000	APBD & APBN	Disperwaskim	Dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.11	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	164 desa		APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
	BOP Pendampingan Program Sharing/Replikasi Program Pamsimas	Jumlah desa Pamsimas yang terdampingi dan mendapat anggaran (APBN/APBD)	15 desa	250.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pendataan Sanitasi	1 dokumen	150.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Jumlah desa program Pamsimas didanai DAK	4 lokasi	3.500.000.000	APBN	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.14	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	Jumlah lokasi dampingan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4 lokasi	250.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 27.15	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Jumlah desa yang didampingi Dana Operasional Pendukung Kegiatan SANIMAS	-	-	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi		4 desa	100.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	Replikasi Program Pamsimas	jumlah desa replikasi program Pamsimas	2 desa	600.000.000	APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	HID Program Pamsimas	jumlah desa yang mendapatkan HID Program Pamsimas	5 desa	1.225.000.000	APBN	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
	Hibah Khusus Pamsimas	Jumlah Desa Pamsimas yang tidak berfungsi/baru berfungsi sebagian	2 desa	490.000.000	APBN, APBD	Disperwaskim	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase layanan drainase	73,00%	4.225.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Dokumen DED Drainase	1 dokumen	225.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase perkotaan terbangun	2500 meter	4.000.000.000	APBD	Disperwaskim	dilaksanakan					Kegiatan Pindah ke DPUPR Cipta Karya
1.03 - 1.4.0101 - 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0	750.000.000	APBD	Disperwaskim	Tidak dilaksanakan	0,36	1.232.740.552	APBD	Disperwaskim	Tidak dianggarkan di tahun 2023
1.03 - 1.4.0101 - 30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Jumlah Dana Operasional kegiatan KOTAKU	13 desa	750.000.000	APBD	Disperwaskim	Tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Tidak dianggarkan di tahun 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
2.05 - 1.3.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan		25.575.000.000	APBN, APBD	DPUPR, DLHK	dilaksanakan sebagian	0	0	-	-	Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN"
		Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat						0,00%				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani					dilaksanakan	29,64%	9.318.076.242	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengembangan Kinerja

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		- Persentase jumlah sampah yang berkurang					dilaksanakan	72,62%				Pengelolaan Persampahan"
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani					dilaksanakan	72,62%	9.318.076.242	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN"
2.05 - 2.5.0101 - 15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang terbeli	250 unit	2.500.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota"
2.05 - 2.5.0101 - 15.19	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah pembangunan bank sampah	2 unit	2.000.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan	0	0	-	-	Dilaksanakan DPUPR
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					dilaksanakan	9	8.098.204.334	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan "Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan". serta terdapat perubahan indikator
2.05 - 2.5.0101 - 15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah kelompok Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40 kelompok	3.000.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan	0	0	-	-	adanya perubahan indikator sehingga diubah menjadi "Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat"
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					dilaksanakan	10	1.219.871.908	APBD	DLH	Indikator terbaru pengganti dari "jumlah kelompok Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan"
2.05 - 2.5.0101 - 15.17	Pembinaan Bank Sampah	terbentuknya kelompok bank sampah baru	30 kelompok	350.000.000	APBD	DLHK	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
2.05 - 2.5.0101 - 16	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL		4.230.000.000	APBD	DLHK			280.644.079			Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP"
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin										

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten										
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota										
		Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan										
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Cakupan pemantauan kualitas air					Dilaksanakan	100%	152.191.604	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
		- Cakupan pemantauan kualitas udara					Dilaksanakan	100%				
		- Presentase kampung iklim yang terbentuk					Dilaksanakan	40%				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan					Dilaksanakan	100%	152.191.604	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP"
2.05 - 2.5.0101 - 16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah sampling titik pantau, kualitas udara dan air	35 titik	300.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut"
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Dilaksanakan	2 Dokumen	152.191.604	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pemantauan Kualitas Lingkungan" dan adanya penambahan indikator
2.05 - 2.5.0101 - 16.26	Operasional laboratorium lingkungan	jumlah titik sampling	60 titik sampling	400.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota"
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas					Dilaksanakan	1 dokumen	61.753.475	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Operasional laboratorium lingkungan "

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
		Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan										
2.05 - 2.5.0101 - 16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	50 pelaku usaha	65.000.000	APBD	DLHK	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik"
2.05 - 2.5.0101 - 16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	jumlah Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang terlaksana	7 kegiatan	1.500.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3"
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3					Dilaksanakan	100%	22.233.000	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup"
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani					Dilaksanakan	70%	22.233.000	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)"
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Dilaksanakan	10 dokumen	13.335.500	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup "
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					Dilaksanakan	10 laporan	8.897.500	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengelolaan B3 dan Limbah B3"
2.05 - 2.5.0101 - 16.7	Pengkajian dampak lingkungan	jumlah kajian lingkungan terkait dengan perencanaan daerah/usaha/kegiatan	2 dokumen	550.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Penyusunan dan

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota"
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup					Dilaksanakan	100%	104.350.500	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	67%	104.350.500	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP"
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun					Tidak Dilaksanakan	0	0	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Pengkajian dampak lingkungan"
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					Dilaksanakan	1 dokumen	104.350.500	APBD	DLH	
2.05 - 2.5.0101 - 16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat	3 kegiatan	240.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	3 kegiatan	130.000.000	APBD	DLH	Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup"
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	- Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					Dilaksanakan	100%	20.807.500	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
		- Persentase saka kalpataru yang dibina					Dilaksanakan	100%		APBD	DLH	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan					Dilaksanakan	100%	20.807.500	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT"
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah saka pramuka yang dibina					Tidak Dilaksanakan	0	0	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup"
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					Dilaksanakan	8 lembaga	20.807.500	APBD	DLH	
2.05 - 2.5.0101 - 16.20	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan	jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	55 pelaku usaha	45.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"
2.05 - 2.5.0101 - 16.29	Operasional Perijinan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	500 pelau usaha	130.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH"
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota					Dilaksanakan	63,33%	54.828.133	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi					Dilaksanakan	5%	54.828.133	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)"
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					Dilaksanakan	30 Dokumen	19.408.700	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan"
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Dilaksanakan	25 Laporan	35.419.433	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Operasional Perijinan"
2.05 - 2.5.0101 - 16.34	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	jumlah pengolahan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di Kab Klaten (IPAL) industri	2 unit	500.000.000	APBD	DLHK	tidak dilaksanakan					pembangunan IPAL terakhir pd th 2019
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	3 Ha	510.000.000	APBN, APBD	DLHK	dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "PROGRAM PENGELOLAAN

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
												KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)"
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air/sumber air	5 Ha	300.000.000	APBD, CSR	DLHK	dilaksanakan	11 Ha		APBD	DLH	Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	5 km	120.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	10 km		APBD	DLH	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 21	Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan	2500 batang	90.000.000	APBD	DLHK	dilaksanakan	2475	312.000.000	APBD	DLH	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik					dilaksanakan	100%	6.330.281.444	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari program "Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam"
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupate/Kota					dilaksanakan	100%	6.330.281.444	APBD	DLH	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)"
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					dilaksanakan	11,346 Ha	6.330.281.444	APBD	DLH	Nomenklatur terbaru pengganti dari kegiatan: 1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, 2) Penghijauan Jalan Dalam Kota, 3) Pengadaan bibit tanaman penghijauan. Serta terdapat penambahan indikator
2.05 - 2.5.0101 - 16.1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	nilai capaian adipura	75 angka	500.000.000	APBD	DLHK	tidak dilaksanakan					Refocusing
DINAS KESEHATAN												
1.02 - 1.2.0101 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	245.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan	71,57	350.000.000	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Kebijakan Yang Dibuat	15					13				
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	95					92,97				
		Persentase Desa yang Memanfaatkan CSR untuk Kesehatan	30					30				
		Proporsi Posyandu Mandiri	57					75,79				
		Presentase Desa yang didampingi SMD MMD	100					100				
1.02 - 1.2.0101 - 19.6	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	jumlah petugas penyuluh kesehatan	167 orang	100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan	167 orang	100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02 - 1.2.0101 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu, Poskestren, Posbindu	60 ukbm	85.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan	60 ukbm	100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02 - 1.2.0101 - 19.8	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah petugas, desa PHBS dan puskesmas	106 petugas	60.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan	80 petugas	80.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
1.02 - 1.2.0101 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	cakupan desa <i>open defication free</i> (ODF)	100%	800.000.000	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Tidak dilaksanakan					program sudah tercapai sehingga tahun 2023 tidak anggarkan
		persentase pengeloaan limbah medis dan nonmedis	100%									
		Persentase desa STBM	71,32%									
1.02 - 1.2.0101 - 21.2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah puskesmas dengan RW sehat percontohan	15 RW	350.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Tidak dilaksanakan					kegiatan sudah tercapai sehingga tahun 2023 tidak anggarkan
1.02 - 1.2.0101 - 21.5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungan	401 desa	450.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	Tidak dilaksanakan					
	Desa STBM (DAK nonfisik)	jumlah desa STBM (DAK)	68 desa	510.000.000	APBN	Dinas Kesehatan	Tidak dilaksanakan					
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
1.06-4.1.0901-25	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase desa yang tertangani bencana air bersihnya	100%	200.000.000	APBD	BPBD	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Penaggulangan Bencana"
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa yang tertangani bencana air bersihnya					Dilaksanakan	100%	90.000.000	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Penanganan Darurat Bencana"
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayaninya warga negara yang mendapatkan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat					Dilaksanakan	100%	90.000.000	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru tambahan dari program "Program Penaggulangan Bencana"
1.06-4.1.0901-25.4	Droping Air Bersih	Jumlah Droping Air Bersih Wilayah Kabupaten Klaten	25 desa	200.000.000	APBD	BPBD	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota". Dan indikatornya target capaian berubah menjadi tangki
1-05.03.2-03.002	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Jumlah droping air yang diberikan dalam respon cepat bencana kekeringan					Dilaksanakan	25 desa	90.000.000	APBD	BPBD	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Droping Air Bersih"
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase jumlah BPSPAMS yang terbina	100%	60.000.000	APBD	Dispermasdes	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
2.07 - 2.7.0101 - 16.9	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	jumlah BPSPAMS yang dibina dalam 1 tahun	155 BPSPAMS	60.000.000	APBD	Dispermasdes	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	100%	15.000.000	APBD	Dispermasdes	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan		10 desa	15.000.000	APBD	Dispermasdes	tidak dilaksanakan	0	0	-	-	Refocusing

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
DINAS PENDIDIKAN												
1.01 - 1.1.0101 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sarana pasarana SD dengan kondisi baik	33%	5.749.000.000	APBN, APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan					Adanya perubahan nomenklatur sehingga program diubah menjadi "Program Pengelolaan Pendidikan"
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan						Dilaksanakan		8.240.664.172	DAK	Dinas Pendidikan	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi					Dilaksanakan	98,73%	1.015.054.172	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "Program Pengelolaan Pendidikan"
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik				33,12%						
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Dilaksanakan		7.225.610.000	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru tambahan kegiatan dari "Program Pengelolaan Pendidikan"
1.01 - 1.1.0101 - 16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi yang direhab	128 unit	764.000.000	APBN	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	1 Unit	90.015.000	DAK	Dinas Pendidikan	Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah"
1-01.02.2.02.024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					Dilaksanakan	1 Unit	90.015.000	DAK	Dinas Pendidikan	Nomenklatur terbaru pengganti dari "Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary"
1.01 - 1.1.0101 - 16.96	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	Jumlah sanitasi/MCK SD yang dibangun	40 unit	4.180.000.000	DAK	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	-	0	-	-	Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah"
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Fisik SD)	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun					Dilaksanakan	7 Unit	1.015.054.172	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru pengganti dari kegiatan "Pembangunan Sanitasi/MCK SD"
1.01 - 1.1.0101 - 16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi yang dibangun	35 ruang	700.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	-	0	-		Adanya perubahan nomenklatur sehingga kegiatan diubah menjadi "Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah"
1-01.02.2.02.012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					Dilaksanakan	13 Unit	7.135.595.000	DAK	Dinas Pendidikan	nomenklatur baru pengganti dari kegiatan "Pembangunan sarana air bersih dan sanitary"
1.01 - 1.1.0101 - 16.100	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	Jumlah SD yang mengikuti lomba sekolah sehat	5 sekolah	30.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	5 sekolah	36.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	
1.01 - 1.1.0101 - 16.101	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	Jumlah Sekolah sehat dan Kader Kesehatan	110 sekolah	75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan	10 sekolah	58.500.000	APBD	Dinas Pendidikan	
PDAM												
	PROGRAM PDAM			21.770.000.000								
	Pemasangan Jaringan Perpipaan dari MA. Ingas Cokro		Demangan, Karangdowo	14.000.000.000	APBN, APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	-	-	SIPA belum ada

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Output Outcame	Rencana sesuai RAD				Pelaksanaan					
			Target Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Status	Output Outcame	Alokasi Anggaran dan Sumber		Perangkat Daerah/ Lembaga Pelaksana	Keterangan
				Anggaran	Sumber Pendanaan				Anggaran	Sumber Pendanaan		
	Menyediakan air baku		29.030.527 m3	100.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	18.070.128 m3	7.331.558.976	PDAM	PDAM	
	Produksi air		24.192.106 m3	100.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	16.607.400 m3	1.356.229.039	PDAM	PDAM	
	Pemeliharaan sumber		22 Lokasi	200.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	22 Lokasi	931.461.500	PDAM	PDAM	
	Pemeliharaan IPA		5 Unit	500.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	5 Unit	98.551.536	PDAM	PDAM	
	Penghijauan Daerah sumber dan tangkapan air		1 Area	50.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	1 Area	844.485.200	PDAM	PDAM	
	Pembuatan sumur resapan		10 Unit	50.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Geolistrik		4 Titik	120.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	4	480.000.000	PDAM	PDAM	
	Penambahan SR		2000 SR	3.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	2650	39.750.023.850	PDAM	PDAM	
	Reklasifikasi golongan pelanggan		2000 SR	100.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Reklasifikasi golongan pelanggan		21 SR	100.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Penggantian Meter/ Tera Meter pelanggan		4000 SR	2.000.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	12.244 SR	0	PDAM	PDAM	hanya dilaksanaka Tera Meter menggunakan biaya pemeliharaan
	Penertiban SR pelanggan		300 SR	450.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	424	0	PDAM	PDAM	Dilakukan penertiban menggunakan anggaran pemeliharaan
	Pemeliharaan jaringan Distribusi		2000 DMA	1.000.000.000	APBD	PDAM	Dilaksanakan	2000 DMA	2.444.812.678	PDAM	PDAM	
	Pembuatan Distrik Meter Area (DMA)	jumlah DMA yang terpasang	2 DMA	1.000.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan
	Promosi dan Sosialisasi Kampanye Penggunaa n Air PDAM	jumlah peserta (bantuan konsumsi)	500 orang	18.000.000	APBD	PDAM	Tidak Dilaksanakan	0	0	PDAM	PDAM	Tidak dianggarkan pada tahun bersangkutan

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Keterangan:

: Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pengganti berdasarkan nomenklatur terbaru

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEKUTAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

LAMPIRAN

LAMPIRAN MATRIKS RAD AMPL

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	93,35	98,73%	1.400.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	93,35	98,73%	1.400.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	-	0	-	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 dokumen	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	301,5 liter/detik	2 lt/detik	600.000.000	2 lt/detik	500.000.000	2 lt/detik	500.000.000	2 lt/detik	500.000.000	2 lt/detik	500.000.000	311,5 liter/detik	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5 lembaga	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	30 Lembaga	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 desa	5 desa	350.000.000	5 desa	350.000.000	5 desa	350.000.000	5 desa	350.000.000	5 desa	350.000.000	30 desa	DPUPR	APBN, APBD
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	48.333 SR	50 SR	300.000.000	50 SR	300.000.000	50 SR	400.000.000	50 SR	400.000.000	50 SR	400.000.000	48.583 SR	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS dalam kondisi baik	100 %	100 %	130.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	130.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	DPUPR	APBN, APBD
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	0	0,1 ton/hari	130.000.000	0,1 ton/hari	500.000.000	0,1 ton/hari	1.300.000.000	0,1 ton/hari	1.300.000.000	0,1 ton/hari	1.300.000.000	0,5 ton/hari	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1,42%	1,9 %	3.625.000.000	2,21 %	3.300.000.000	2,21 %	3.350.000.000	2,21 %	3.150.000.000	2,21 %	3.350.000.000	2,21%	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	3.625.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.350.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	3.350.000.000	100%	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	6 dokumen	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	5 desa	150.000.000	5 desa	150.000.000	5 desa	150.000.000	5 desa	150.000.000	5 desa	150.000.000	25 desa	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	55,8 m3/hari	3 m3/hari	1.000.000.000	3 m3/hari	1.000.000.000	3 m3/hari	1.000.000.000	3 m3/hari	1.000.000.000	3 m3/hari	1.000.000.000	70,8 m3/hari	DPUPR	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Berbasis Masyarakat yang Dibangun														
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 unit	1 unit	1.435.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	7 unit	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1540 RT	300 RT	700.000.000	300 RT	900.000.000	300 RT	750.000.000	300 RT	750.000.000	300 RT	750.000.000	3040 RT	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja OPLT	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT yang dioptimalisasi	0	1 unit	220.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	DPUPR	APBN, APBD
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	928 RT	350 RT	1.360.000.000	350 RT	1.360.000.000	350 RT	1.360.000.000	200 RT	700.000.000	150 RT	600.000.000	2328 RT	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	62,31%	61,51 %	2.180.000.000	61,52 %	2.550.000.000	63,64 %	2.550.000.000	63,94 %	3.050.000.000	64,24 %	3.050.000.000	64,24 %	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	62,31%	61,51 %	2.180.000.000	61,52 %	2.550.000.000	63,64 %	2.550.000.000	63,94 %	3.050.000.000	64,24 %	3.050.000.000	64,24 %	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	230.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	250.000.000	13 dokumen	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0	1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	5 Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR	APBN, APBD
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0	1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000	5 Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR	APBN, APBD
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	22,50	99,97	205.000.000	99,98	212.500.000	99,99	295.000.000		227.500.000		235.000.000		DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penanganan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dilakukan			205.000.000		212.500.000		295.000.000		227.500.000		235.000.000		DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi permukiman kumuh tersusun	2 dokumen					1 Dokumen	75.000.000					3 Dokumen	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh terbentuk dan terbina	3 kelompok	3 kelompok	30.000.000	3 kelompok	32.500.000	3 kelompok	35.000.000	3 kelompok	37.500.000	3 kelompok	40.000.000	18 kelompok	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh yang dilakukan	5 kali	5 kali	75.000.000	5 kali	77.500.000	5 kali	80.000.000	5 kali	82.500.000	5 kali	85.000.000	30 kali	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP tersusun	2 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	7 dokumen	DISPER WASKIM	APBN, APBD
1.04.03.2.02.15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 rumah tangga	50 Rumah Tangga	50.000.000	50 Rumah Tangga	52.500.000	50 Rumah Tangga	55.000.000	50 Rumah Tangga	57.500.000	50 Rumah Tangga	60.000.000	300 rumah tangga	DISPER WASKIM	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbunan sampah diperkotaan yang tertangani	72,98 %	70,00 %	11.921.210.000	69,00 %	11.829.804.000	68,00 %	13.606.000.000	67,00 %	14.748.500.000	66,00 %	14.492.375.000	66%	DLH	APBN, APBD
		Persentase jumlah sampah yang berkurang	25,56%	30,00 %		31,00 %		32,00 %		33,00 %		34,00 %		34%	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbunan sampah diperkotaan yang tertangani	72,98%	81%	11.921.210.000	83%	11.829.804.000		13.606.000.000		14.748.500.000		14.492.375.000	89%	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 kelompok	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	1.450.000.000	10 kelompok	1.522.500.000	10 kelompok	1.598.625.000	80 kelompok	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	0	350.000.000	2 Dokumen	300.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	2 dokumen	DLH	APBN, APBD
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	107 unit	5 Unit	3.471.210.000	5 Unit	3.479.804.000	10 unit	2.961.000.000	11 unit	3.576.000.000	8 unit	2.766.000.000	146 unit	DLH	APBN, APBD
2. 11. 11. 2.01. 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	34.560 ton	35,000 Ton	7.500.000.000	35,000 Ton	7.450.000.000	36750 ton	9.100.000.000	36750 ton	9.555.000.000	38500 ton	10.032.750.000	38500 ton	DLH	APBN, APBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan STBM	100%	100%	4.100.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.368.000.000	100%	4.542.720.000	100%	4.724.428.800	100%	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
		Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN	APBN, APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	100,00%	100,00%	4.100.000.000	100,00%	4.200.000.000	100,00%	4.368.000.000	100,00%	4.542.720.000	100,00%	4.724.428.800	100,00%	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34 dokumen	34 dokumen	2.200.000.000	34 dokumen	2.200.000.000	34 dokumen	2.288.000.000	34 dokumen	2.379.520.000	34 dokumen	2.474.700.800	34 dokumen	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	1.900.000.000	12 dokumen	2.000.000.000	12 dokumen	2.080.000.000	12 dokumen	2.163.200.000	12 dokumen	2.249.728.000	12 dokumen	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	72%	64%	82.200.000,00	66%	82.200.000,00	66%	82.200.000,00	68%	82.200.000,00	68%	82.200.000,00	68%	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	99%	99%	82.200.000,00	99%	82.200.000,00	99%	82.200.000,00	99%	82.200.000,00	99%	82.200.000,00	99%	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	12 dokumen	12 dokumen	82.200.000,00	12 dokumen	82.200.000,00	12 dokumen	82.200.000,00	12 dokumen	82.200.000,00	12 dokumen	82.200.000,00	12 dokumen	DINAS KESEHATAN	APBN, APBD

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,20	91,90	1.216.000.000	92,50	1.190.000.000	92,75	1.820.000.000	92,90	1.820.000.000	0,93	1.820.000.000	0,93	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	71,80	74,40		75,50		80,00		80,15		80,55		80,55	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	67,10%	77%	190.000.000	82%	190.000.000	86%	570.000.000	88%	570.000.000	90%	570.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1 Unit	190.000.000	1 Unit	190.000.000	3 Unit	570.000.000	3 Unit	570.000.000	3 Unit	570.000.000	21 Unit	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	80%	80%	1.026.000.000	81%	1.000.000.000	83%	1.250.000.000	85%	1.250.000.000	90%	1.250.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	7 unit	750.000.000	8 unit	700.000.000	10 Unit	900.000.000	15 Unit	900.000.000	15 Unit	900.000.000	79 Unit	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Unit	7 unit	276.000.000	8 unit	300.000.000	10 Unit	350.000.000	13 Unit	350.000.000	13 Unit	350.000.000	108 Unit	DINAS PENDIDIKAN	APBN, APBD
I. PUSAT																
1. Pemasangan Jaringan																
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Ds. Nglinggi s/d Ds Banyuanyar	Panjang m'	0 meter			1.300	4.200.000.000							1.300	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Stadion Trikooyo	Panjang m'	0 meter					1.000	2.000.000.000					1.000	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 300 & 250 mm dari Ds. Banyuanyar s/d Nartosabdo	Panjang m'	0 meter					1.000	2.000.000.000					1.000	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari Dk. Jetak S./d Balai Desa Ngrundul	Panjang m'	0 meter							1.100	3.600.000.000			1.100	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC Ø 400 mm dari MA Geneng s/d Dk Jetak	Panjang m'	0 meter									1.100	4.300.000.000	1.100	PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	20.136	300	900.000.000	300	900.000.000	300	2.700.000.000	300	2.700.000.000	300	2.700.000.000	21.636	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa Distribusi	Panjang m'	0 meter			11000	1.800.000.000							11.000	PDAM	PDAM
2. Zonasi														-	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 mm dari Soto Sabar , karanglo s/d Perempatan GOR Gelar Sena Klaten	Panjang m'	1.800	11.800	13.561.831.000									13.600	PDAM	APBD, PDAM
	Pemasangan Konstruksi Jembatan Pipa Ø 300 mm	TITIK	0 titik	4	3.668.024.000									4	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan SMP N 1 Mayungan s/d PR. Griya Klaten Utara	Panjang m'	0	1.250	496.772.498									1.250	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 mm Perempatan Gereja Mayungan s/d Permpatan Gergunung	Panjang m'	0	835	331.844.029									835	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 300 Bramen s/d Menara	Panjang m'	0	1.650	2.202.001.700									1.650	PDAM	PDAM
	Pemasangan Pipa PVC-O Ø 150 dari jl. Mondokaki s/d Terminal Sukarno	Panjang m'	0	800	317.934.399									800	PDAM	PDAM
II. CABANG BARAT																

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1. IKK Prambanan														-		
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	1.229	30	90.000.000	30	90.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	1.379	PDAM	PDAM
2. IKK Karangnongko					-									-		
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	726	30	90.000.000	30	90.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	876	PDAM	PDAM
	Renovasi Broncaptering di Mata Air Sliling 10 l/dt	TITIK	1	1	300.000.000									1	PDAM	PDAM
	Jaringan Perpipaan Distribusi	Panjang m'	0			1.000	1.500.000.000							1.000	PDAM	PDAM
3. IKK Kemalang					-											
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	2.507	50	150.000.000	50	150.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	2.757	PDAM	PDAM
	Pembangunan Rumah Jaga berikut perlengkapannya	Unit	0	1	260.000.000									1	PDAM	PDAM
	Pembuatan Pagar Sumur Dalam	m'	0	1	260.000.000									1	PDAM	PDAM
4. IKK Wedi					-											
1	Taping pipa Ø 200mm dari Sendang dengan Pipa dari MA. Geneng	Titik	0	1	130.000.000									1	PDAM	PDAM
2	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 150mm dari Desa Trunuh s/d Masjid jami	Panjang m'	0	3.700	1.654.252.420									3.700	PDAM	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 100mm dari Masjid Jami s/d Kadisimo	Panjang m'	0	1.900	472.515.507									1.900	PDAM	PDAM
3	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Ø 75mm di Pasung	Panjang m'	0	1.000	328.900.000									1.000	PDAM	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	2.597	50	150.000.000	50	150.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	2.847	PDAM	PDAM
5. IKK Gantiwarno					-											
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	248	30	90.000.000	30	90.000.000	30	270.000.000	35	315.000.000	35	315.000.000	408	PDAM	PDAM
III. CABANG UTARA					-											
1. IKK Karanganom														-	PDAM	PDAM
1	Pembangunan/Renovasi Broncaptering Mata Air Ponggok	Unit	0			1	600.000.000							1	PDAM	PDAM
2	Pemasangan Jaringan dari pongkok s/d Jurangjero	Panjang m'	0		-	5.300	3.679.059.338							5.300	PDAM	PDAM
3	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	5.855	300	900.000.000	200	600.000.000	200	1.800.000.000	200	1.800.000.000	200	1.800.000.000	6.955	PDAM	PDAM
2. IKK Delanggu					-		-		-		-					
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	4.159	50	150.000.000	50	150.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	4.409	PDAM	PDAM
3. IKK Jatinom					-		-		-							
1	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	367	20	60.000.000	30	90.000.000	30	270.000.000	25	225.000.000	25	225.000.000	497	PDAM	PDAM
CABANG TIMUR																
1. IKK Ceper																
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Kurung	Panjang m'	0	3.000	1.000.000.000									3.000	PDAM	PDAM
	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	3.048	200	600.000.000	200	600.000.000	200	1.800.000.000	200	1.800.000.000	200	1.800.000.000	4.048	PDAM	PDAM
2. IKK Pedan																
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	434	30	90.000.000	30	90.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	30	270.000.000	584	PDAM	PDAM
3. IKK Cawas																

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD	Sumber Pembiayaan
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Pembuatan Pagar Reservoir Karanglo	Unit	0	1	250.000.000		-		-		-		-	1	PDAM	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Burikan	Panjang m'	0	1000	1.000.000.000		-		-		-		-	1.000	PDAM	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Nanggulan	Panjang m'	0	1000	500.000.000		-		-		-		-	1.000	PDAM	PDAM
4	Rencana Investasi Sambungan Rumah	SR	8.740	700	2.100.000.000	700	2.100.000.000	700	6.300.000.000	700	6.300.000.000	700	6.300.000.000	12.240	PDAM	PDAM
4. IKK Bayat																
1	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Jambakan	Panjang m'	0		-	2000	1.500.000.000		-		-		-	2.000	PDAM	PDAM
2	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Ngerangan	Panjang m'	0		-		-	1500	2.000.000.000		-		-	1.500	PDAM	PDAM
3	Pemasangan jaringan distribusi di Desa Dukuh		0		-		-		-	3000	3.000.000.000	2000	2.000.000.000	5.000	PDAM	PDAM
5. IKK Karangdowo																
1	Jaringan Perpipaan Distribusi	Panjang m'	0		-		3.000.000.000		-		3.000.000.000		-	-	PDAM	PDAM
2	Rencana Investasi Sambungan Rumah		410	300	900.000.000	300	900.000.000	300	2.700.000.000	300	2.700.000.000	300	2.700.000.000	1.910	PDAM	PDAM
6. IKK Trucuk																
1	Jaringan Perpipaan Distribusi	Panjang m'	0			3000	3.000.000.000		-	3000	3.000.000.000		-	6.000	PDAM	PDAM
CSR																
	Penanaman Pohon		18.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	100.000.000	28.000	PDAM	PDAM

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN 2025-2029